



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN  
KELOMPOK USAHA PEMUDA PRODUKTIF (KUPP)  
(STUDI PADA EMPAT KUPP DI KABUPATEN BEKASI)**

**TESIS**

**Wuri Ayu Dwi Hartanti**

**NPM 0906596525**

**Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan  
Jakarta  
Juni 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN  
KELOMPOK USAHA PEMUDA PRODUKTIF (KUPP)  
(STUDI PADA EMPAT KUPP DI KABUPATEN BEKASI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**Wuri Ayu Dwi Hartanti**

**NPM 0906596525**

**Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan  
Jakarta  
Juni 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Wuri Ayu Dwi Hartanti**

**NPM : 0906596525**

**Tanda tangan :**



**Tanggal : 30 Juni 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Wuri Ayu Dwi Hartanti  
NPM : 0906596525  
Program Studi : Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan  
Judul Tesis : Analisis Implementasi Program Pengembangan  
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)  
(Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Wilman Dahlan Mansoer, M.Org.Psy.

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.

Penguji : Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung selama masa pendidikan dan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan beasiswa pendidikan S-2 selama 4 semester pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Wilman Dahlan Mansoer, M.Org.Psy., sebagai Pembimbing Tesis, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. sebagai Ketua Sidang Tesis dan Ibu Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si. sebagai Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan berharga dalam Tesis saya.
4. Seluruh informan/narasumber yang telah memberikan berbagai informasi dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan Tesis ini, yaitu:
  - a. Bapak Drs. Ponidjan Puspodihardjo, M.Pd, Kepala Bidang Kelembagaan, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Pengembangan Pemuda, Kemempora RI.
  - b. Bapak Drs. H. Wahyu Iskandar, M.M.Pd., Sekretaris Dinas, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
  - c. Bapak I Ketut Wiriada, S.Sos., M.Si., Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
  - d. Bapak Drs. Ade Komarudin, M.M., Kepala Bidang Pemuda, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi.
  - e. Bapak H. Karyasa Darsono, S.AP., Kepala Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi.
  - f. Bapak Drs. H. Asan Asari, M.Pd., Kepala Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

- g. Bapak Drs. Rajawali Agung, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda pada tahun 2009, pada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi.
  - h. Para pengurus KUPP, yaitu Ibu Yayah (KUPP El Hawa), Sdr. Edi Kasah (KUPP Bhakti Remaja), Sdr. Edi Saiful (Karang Taruna Desa Kertarahayu), Sdr. Syarifudin (KUPP Mekar Bahagia).
  - i. Para pejabat, staf, serta warga masyarakat pada Kecamatan Kedungwaringin, Cibitung, Setu, dan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.
5. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya selama saya mencempuhmasa studi pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
  6. Keluarga Besar Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Bekasi yang mendukung saya selama ini, sejak awal saya ditempatkan sebagai PNS pada akhir tahun 2002 hingga saat ini.
  7. Suamiku tercinta, Mochamad Husni, yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri dan memberi teladan bagi saya dan anak-anak kami, Ridhani Ramadhana, Arhamni Ramadhana, dan Humayra Muharrama. Terima kasih atas segala doa, keikhlasan, dan dukungan kepada bunda. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan perlindunganNya kepada kita.
  8. Keempat orang tua saya, di Pisangan Lama, di Karang Tengah, dan Bapak H. Wahyono bin Kasan yang telah berada di alam barzah. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan kepada saya.
  9. Seluruh rekan di PKN IV yang selalu memberikan motivasi, berbagi pengalaman, dan saling mendoakan. Semoga pertemuan kita dapat menjadikan kita memperoleh lebih banyak berkah dari Allah Swt.
  10. Seluruh sahabat dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah dicurahkan semua pihak. Saya berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi pemicu lahirnya tesis lain yang jauh lebih baik.

Jakarta, Juni 2011

Wuri Ayu Dwi Hartanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wuri Ayu Dwi Hartanti  
NPM : 0906596525  
Program studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan : Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Implementasi Program Pengembangan Kelompok Usaha  
Pemuda Produktif (KUPP) (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan



Wuri Ayu Dwi Hartanti

## ABSTRAK

**Nama** : Wuri Ayu Dwi Hartanti  
**NPM** : 0906596525  
**Program Studi** : Kajian Ketahanan Nasional  
**Peminatan** : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan  
**Judul Tesis** : Analisis Implementasi Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi)

Penelitian ini fokus pada implementasi Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) (Studi pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi). Selain itu diteliti pula pemberdayaan yang terjadi pada empat KUPP tersebut. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi program pengembangan KUPP pada tahun 2009, sudah berjalan baik dalam aspek komunikasi, namun kurang berhasil dalam aspek sumber-sumber, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hal tersebut adalah salah satu yang menyebabkan kurang berhasilnya 3 KUPP yang memperoleh bantuan dana untuk dapat tumbuh menjadi kelompok yang survive. Upaya pemberdayaan pada 3 KUPP yang kurang optimal dari pemerintah daerah disebabkan minimnya sumber-sumber, yaitu dana, sumber daya manusia, dan fasilitas. Untuk pelaksanaan program pengembangan KUPP pada 2010, dapat dikatakan sudah lebih baik dari masa sebelumnya, karena pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberlangsungan program pengembangan KUPP. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah kunci dari suksesnya salah satu KUPP yang diteliti, yaitu KUPP Mekar Bahagia, yang terletak di daerah pesisir dan bergerak dalam usaha budidaya rumput laut dan bandeng. KUPP ini memperoleh pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi sejak sekitar tahun 2008. KUPP Mekar Bahagia berhasil survive dan ketuanya dapat dikatakan memiliki karakter entrepreneur, antara lain : sifat inovatif, sifat instrumental, sifat prestatif dan pengambilan resiko.

**Kata Kunci** : implementasi, kelompok usaha, pemberdayaan, kewirausahaan.

## ABSTRACT

**Name** : Wuri Ayu Dwi Hartanti  
**NPM** : 0906596525  
**Faculty** : Post-Graduate Program  
**Discipline** : National Resilience Study  
**Subject of Interest** : Leadership Development  
**Thesis Title** : Analysis of Implementation of KUPP Development Program (Study at four KUPP at Kabupaten Bekasi)

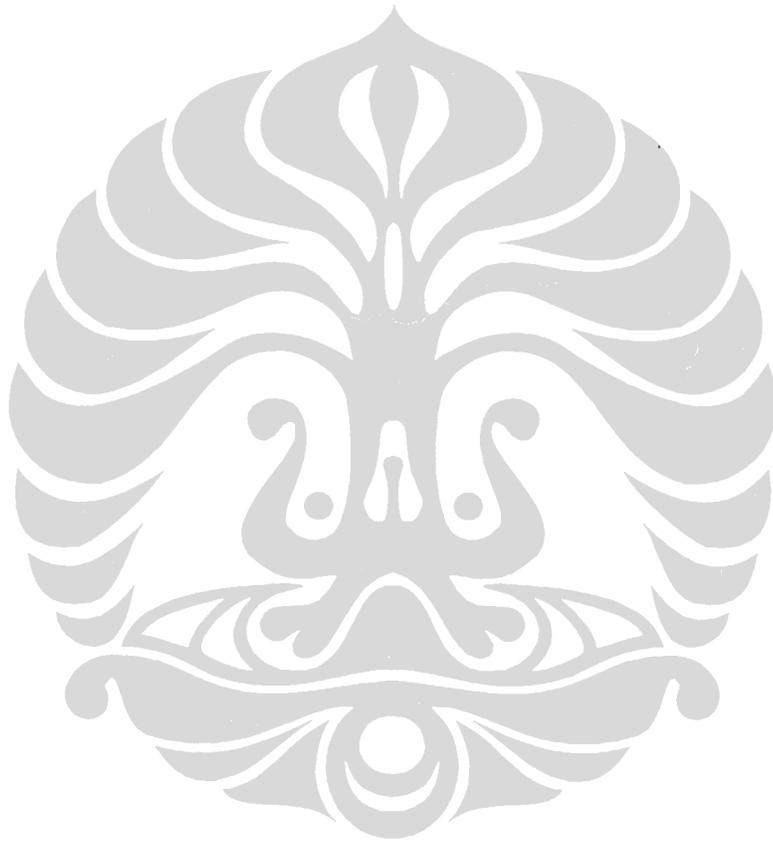
This study focuses on the implementation of KUPP Development Program (Studies on four KUPP in Kabupaten Bekasi). It also investigated the empowerment that occurred in the four KUPP. KUPP is initial of Productive Youth Business Group. From the analysis conducted, it was concluded that the implementation of KUPP Development Program in 2009, has been running well in aspects of communication, but less successful in terms of resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structures. It is one that causes less successful on 3 KUPP who obtain funding to be able to grow into a survival group. 3 KUPP received less empowerment efforts from the local government due to lack of resources, the funding, human resources, and facilities. For the implementation of the program in 2010, it can be said is better than ever before, because the local government has been carrying out activities that support the sustainability of KUPP development programs. Empowerment and community development is key to the success of one of KUPP studied, namely KUPP Mekar Bahagia, located in coastal areas and engaged in the cultivation of seaweed and milkfish. This KUPP obtain facilitation from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Regional Fisheries Service of Kabupaten Bekasi since 2008. This group managed to survive and its chairman can be said to have the character of entrepreneurs, such as: the innovative nature, the nature of instrumental, high achiever, and risk-taking nature.

*Keywords: implementation, business groups, empowerment, entrepreneurship.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB 1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Permasalahan Penelitian .....	15
1.3.Pertanyaan Penelitian .....	16
1.4.Tujuan Penelitian .....	16
1.5.Manfaat Penelitian .....	16
1.6.Batasan Penelitian .....	17
1.7.Kerangka Pikir Penelitian .....	17
1.8.Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB 2. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>21</b>
2.1.Penelitian Sebelumnya .....	21
2.2.Kelompok Usaha .....	23
2.3.Pemberdayaan.....	26
2.4.Pengembangan Karakter Kewirausahaan .....	30
2.5.Implementasi Kebijakan Publik .....	37
<b>BAB 3. Metode Penelitian .....</b>	<b>43</b>
3.1.Pedekatan Penelitian.....	43
3.2.Jenis Penelitian .....	44
3.3.Ruang Lingkup Penelitian .....	44
3.4.Peran Peneliti .....	45
3.5.Informan .....	45
3.6.Jenis Data .....	46
3.7.Tehnik Pengumpulan Data .....	47
3.8.Prosedur Analisa Data .....	48
3.9.Operasionalisasi Konsep .....	50
<b>BAB 4. Gambaran Umum .....</b>	<b>51</b>
4.1.Program Pengembangan KUPP .....	51
4.2.Dana Dekonsentrasi.....	56
4.3.Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat .....	58
4.4.Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi .....	59
4.5.KUPP El Hawa.....	61
4.6.KUPP Bhakti Remaja .....	64

4.7.Karang Taruna Desa Kertarahayu .....	65
4.8.KUPP Mekar Bahagia .....	67
BAB 5. Pembahasan .....	71
BAB 6. Kesimpulan dan saran .....	105
Daftar Referensi .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambar Kerangka Pikir Penelitian .....	17
Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	40
Gambar 4.1. Gambar Konsep Pengembangan KUPP .....	55
Gambar 4.2. Grafik Data Keterlibatan Pemuda Dalam KUPP Nasional Tahun 2005 – 2009 .....	56
Gambar 4.3. Gambar Struktur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat .....	59
Gambar 4.4. Gambar Struktur Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	KUPP di Kabupaten Bekasi yang menerima dana bantuan melalui Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 .....	8
Tabel 1.2.	KUPP di Kabupaten Bekasi KUPP yang memiliki anggota istimewa namun belum pernah memperoleh dana bantuan KUPP melalui Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 .....	9
Tabel 1.3.	<i>Existing Condition</i> Empat KUPP di Kabupaten Bekasi...	11
Tabel 3.1.	Operasionalisasi Konsep .....	50
Tabel 5.1.	Daftar Informan .....	71



## BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan, akan diberikan gambaran sebagai dasar penelitian Analisis Implementasi Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi). Selain itu akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### 1.1. Latar Belakang

Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 9,42 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Dari jumlah 9,42 juta orang pengangguran tersebut, sebanyak 7,4 juta orang (78,38%) adalah pemuda usia produktif (dalam *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*, Kemeneppora 2009). Selanjutnya menurut BPS, pada tahun 2009, jumlah pemuda Indonesia yang masih menganggur mencapai 17% dari 70 juta jiwa, atau sekitar 12 juta pemuda. Sebagian besar dari mereka juga hidup dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah. Menurut data BPS per Agustus 2010, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, pada Agustus 2010 mencapai 7,14% dari 98,32 juta orang, dengan angkatan kerja sebesar 116,53 juta jiwa (dalam <http://visijobs.com/beta/news/detail/2011/02/22/Menakertrans-Targetkan-247-juta-Orang-Dapat-Kerja>).

Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan sangat diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati jika terjadi ketimpangan ekonomi di

masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya masih sangat nyata.

Ketika kondisi di mana jumlah pengangguran yang ada menunjukkan angka yang tinggi dan pada sisi lain terdapat lapangan pekerjaan yang terbatas, maka wirausaha merupakan suatu alternatif pekerjaan yang rasional (Wijaya, 2007). Saat ini, proporsi wirausaha Indonesia baru sekitar 0,24% dari populasi, padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju menurut sosiolog David Mc Clelland dibutuhkan minimal 2% atau 4,8 juta wirausaha dari populasi penduduk Indonesia. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki wirausaha 7,2%, Malaysia 2,1%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4,0%, dan Amerika Serikat 11,5%, dari seluruh populasi penduduknya. (dalam Makalah *Peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Untuk Kewirausahaan Muda Indonesia*, oleh Kusmuljono, Chairman CPR Indonesia, disampaikan pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Provinsi Tahun 2011, 7 April 2011, Bandung).

Kementerian Pemuda dan Olahraga, ketika masih bernama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, sejak tahun 2005 telah mencanangkan Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda (GNKP). Tujuan dari gerakan ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan karakter dan budaya wirausaha di kalangan pemuda Indonesia. Melalui penanaman karakter dan budaya wirausaha di kalangan pemuda, diharapkan muncul wirausahawan-wirausahawan baru sebagai cikal bakal penggerak ekonomi nasional dari berbagai penjuru daerah di Indonesia (dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Peran Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009*, Kemeneqpora, 2009).

Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga (Deputi III) adalah bagian dalam struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2005 – 2009. Saat itu, dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : PER.0013/MENPORA/II/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, disebutkan bahwa Deputi III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga. Dalam deputi ini terdapat 5 (lima) Asisten Deputi (Asdep), yaitu Asdep Kader Kewirausahaan Pemuda, Asdep Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda, Asdep Pengembangan Produk Industri Olahraga, Asdep Pengembangan Manajemen Industri Olahraga, dan Asdep Informasi.

Salah satu dari beberapa Asisten Deputi tersebut, yaitu Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda, memiliki visi mendukung Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda (GNKP) yang telah dicanangkan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga melalui penguatan aspek-aspek kelembagaan (dalam *Dokumen Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009*, Kemenegpora, 2009). Terdapat tiga pilar penguatan aspek-aspek kelembagaan, yaitu :

1. Penguatan kebijakan pengembangan kelembagaan kewirausahaan pemuda.
2. Pengembangan pranata lembaga kewirausahaan pemuda.
3. Pengembangan kerjasama strategis dengan lintas sektor.

Dalam dokumen tersebut dicantumkan bahwa terdapat tiga program yang menyentuh ketiga pilar kelembagaan tersebut dan menjadi program unggulan dalam Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda, yaitu :

1. Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
2. Pengembangan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP).
3. Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3).

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dan akan terus dikembangkan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2005 telah menciptakan kader-kader wirausahawan muda, antara lain melalui Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Sentra Kewirausahaan Pemuda, serta melalui berbagai Pelatihan Kader Wirausaha Muda pada berbagai sektor usaha (dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan*

*Peningkatan Kapasitas Peran Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009*, Kemeneppora, 2009).

Salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut dapat diciptakan melalui interaksi yang saling mendukung dan saling memperkuat daya tahan pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam suatu lembaga. Melalui pendekatan kelembagaan diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas peran lembaga-lembaga kewirausahaan pemuda dalam upaya mengembangkan karakter dan budaya kewirausahaan pemuda.

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) merupakan salah satu lembaga kewirausahaan pemuda yang secara khusus diinisiasi oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan etos kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas pemuda. Program Pengembangan KUPP adalah salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2005, melalui Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda (dalam *Dokumen Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009*, Kemeneppora 2009). Pada tahun 2009, Program Pengembangan KUPP masih merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang saat itu bernama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Dalam dokumen tersebut, terdapat Data Keterlibatan Pemuda Dalam KUPP Nasional, dimana pada tahun 2009 terdapat 755 KUPP dengan 2222 anggota.

Dari dokumen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009 diperoleh pengertian tentang KUPP sebagai berikut :

- a. Merupakan unit usaha produktif (bisnis) yang belum berbadan hukum (akte notaris), memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil milik kelompok yang beranggota 3 s.d. 10 orang pemuda;
- b. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 18 s.d. 35 tahun;
- c. Kriteria Usaha Mikro menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Kriteria Usaha Kecil menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Pengembangan KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.

Visi Program Pengembangan KUPP adalah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil di daerah pedesaan dan perkotaan yang dirintis, dikembangkan oleh pemuda dan mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai ekonomi, serta dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan misi Program Pengembangan KUPP adalah mendorong dan memfasilitasi pemuda putus sekolah dan menganggur untuk berwirausaha dengan memproduksi barang dan jasa berbasis sumberdaya lokal yang berkualitas dan diterima oleh pasar (dalam *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*, Kemeneqpora 2009). Tujuan program ini adalah :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan KUPP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang mampu memproduksi barang dan jasa yang diterima oleh pasar.
2. Meningkatkan peran KUPP dalam pembangunan karakter dan budaya wirausaha bagi pemuda di daerah, penciptaan lapangan kerja, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Hasil yang diharapkan dari berkembangnya KUPP di daerah adalah :

1. Semakin terbukanya lapangan usaha bagi pemuda dan lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya.

2. Meningkatnya penghasilan pemuda yang menjalankan usaha produktif.
3. Munculnya sentra-sentra kewirausahaan pemuda di berbagai daerah yang ditopang oleh berbagai KUPP terkait dan bersinergi dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasaran.

Program Pengembangan KUPP dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga di tingkat pusat dan daerah. Di Tingkat Pusat, program ini dikelola oleh Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda. Di daerah, program ini dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang mengurus masalah kepemudaan (dalam *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*, Kemenegpora 2009). Di tingkat pusat, kegiatan yang dirancang untuk pengembangan KUPP antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan modul pengembangan KUPP.
2. Sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan KUPP.
3. Pemilihan tiga puluh tiga KUPP terbaik dari seluruh Indonesia.

Di tingkat daerah, kegiatan pengembangan KUPP dilaksanakan dalam bentuk tugas dekonsentrasi yang berupa kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dan penyaluran dana bantuan bagi kelompok KUPP. Penyelenggara kegiatan dekonsentrasi KUPP di daerah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang mengelola program kepemudaan di tingkat propinsi. Pada tahun 2009, Kemenegpora melakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka pengembangan KUPP, yaitu dengan melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Kepemudaan untuk KUPP. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah program pengembangan KUPP khususnya pada kegiatan penyaluran bantuan dana bagi kelompok KUPP.

Dalam dokumen Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009, pada bagian rekomendasi mengenai Program KUPP disebutkan bahwa :

- a. Pemerintah Daerah perlu didorong agar menyediakan anggaran untuk KUPP didaerahnya;
- b. Jenis usaha di bidang perikanan laut masih perlu digalakkan, demikian pula dengan usaha kerajinan;
- c. Setiap Pemerintah Daerah perlu memetakan potensi daerah yang menjadi peluang untuk membuka usaha bagi pemuda;
- d. Diversifikasi usaha pemuda untuk setiap daerah perlu digalakkan;
- e. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan KUPP di setiap propinsi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;
- f. Jenis usaha pemuda dibidang perkebunan, pertanian, dan industri kecil sebaiknya mendapat "perhatian".

Di Kabupaten Bekasi, dinas yang menangani masalah kepemudaan telah berdiri sejak tahun 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dengan nama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Selanjutnya pada tahun 2010 nama dinas ini berubah menjadi Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah melaksanakan Pendataan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), dan diperoleh data sebanyak 50 KUPP yang terdapat di 15 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi (dalam *Dokumen Hasil Pendataan Kelompok Usaha Pemuda Produltif (KUPP) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010*, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, 2010). Sebagaimana dijelaskan oleh Karyasa, Kasie Kewirausahaan pada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, dalam wawancara awal yang berlangsung di ruang kantornya (Jum'at, 18 Maret 2011), tujuan dari pendataan tersebut untuk mengetahui jumlah KUPP yang ada dan potensi yang dimiliki oleh kelompok usaha muda dimaksud. Di Kabupaten Bekasi, kelompok-kelompok tersebut bergerak di berbagai bidang usaha, antara lain : peternakan (kambing/ayam buras/ayam kampung/bebek/ikan air tawar),

budidaya (rumput laut/jamur tiram), kerajinan (tas/daur ulang limbah), perbengkelan, percetakan, dan pakaian jadi (konveksi).

Pada tahun 2009, terdapat 3 (tiga) KUPP di Kabupaten Bekasi yang memperoleh dana bantuan penyelenggaraan KUPP dari Pemerintah Pusat (Kemengpora) melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat), untuk pengembangan usahanya, serta 1 (satu) KUPP yang memiliki anggota istimewa (yaitu Ketua Kelompoknya berhasil terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2009 dan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009). Perincian kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

KUPP di Kabupaten Bekasi yang menerima dana bantuan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009

<b>Nama KUPP</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
1. El Hawa	Kedungwaringin	Kerajinan Bunga Bonsai	Rp. 5.000.000,-
2. Bhakti Remaja	Cibitung	Peternakan Bebek	Rp. 5.000.000,-
3. Karang Taruna DesaKertarahayu	Setu	Budidaya ikan air tawar	Rp. 5.000.000,-

Sumber : Data berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, nomor 427/374-BIDKEM, tanggal 13 Juli 2009, tentang Penerima Bantuan Penyelenggaraan KUPP Jawa Barat Tahun 2009.

Tabel 1.2.

KUPP di Kabupaten Bekasi yang memiliki anggota istimewa namun belum pernah memperoleh dana bantuan melalui Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

Nama KUPP	Kecamatan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan	Keterangan
Mekar Bahagia	Muara Gembong	Budidaya rumput laut dan bandeng	-	Ketua kelompok yang bernama Syarifudin, menjadi Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2009 dan Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

Sumber :Telah diolah kembali berdasarkan informasi dari Kasie Kewirausahaan pada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi dan Ketua KUPP Mekar Bahagia.

Selanjutnya berkaitan dengan dana bantuan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009, dalam rangka pemandirian KUPP, pemerintah menyediakan bantuan modal dalam bentuk *block grant* sejumlah Rp. 4 juta s.d. 5 juta per kelompok KUPP. Modal awal yang relatif kecil tersebut dapat digunakan untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada, yang pada intinya sebagai upaya pemandirian pemuda.

Untuk memperoleh dana bantuan pengembangan program KUPP tersebut bukanlah hal yang mudah, melainkan melalui seleksi pada tingkat kabupaten dan provinsi. KUPP yang mengajukan proposal permohonan dana tersebut cukup banyak, sedangkan jumlah dana yang dikururkan terbatas. Oleh sebab itu, KUPP penerima dana tersebut dapat digolongkan sebagai KUPP yang merupakan unggulan atau minimal berpredikat lebih baik di antara KUPP lainnya. Begitu

pula dengan KUPP yang memiliki anggota istimewa, yaitu KUPP Mekar Bahagia yang berdomisili di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Meskipun kelompok tersebut belum menerima dana bantuan pengembangan KUPP dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun ketua kelompoknya berhasil menjadi Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2009 dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

Kemudian berdasarkan wawancara awal dengan ketua/pengurus tiga KUPP yang pernah menerima dana bantuan pengembangan KUPP, diperoleh fakta bahwa saat ini usaha pada tiga KUPP yang menerima dana bantuan KUPP tahun 2009 tersebut tidak berjalan lancar.

Yayah, Ketua KUPP El Hawa, dalam wawancara awal di rumahnya (Rabu, 6 April 2011) menyatakan bahwa saat ini kegiatan di KUPP El Hawa telah berhenti sejak awal tahun 2010 karena kesibukannya mengurus rumah tangga. Seperti diungkapkan Yayah :

*“Saya tidak tau kapan kelompok ini akan aktif lagi, saya sendiri masih sangat repot mengurus rumah tangga mbak”.*

Selanjutnya, menurut Nasir Ma'ruf, Ketua KUPP Bhakti Remaja, dalam wawancara awal (Selasa, 5 April 2011) menyatakan bahwa KUPP Bhakti Remaja saat ini tidak melakukan kegiatan usaha. Dia mengatakan bahwa usaha peternakan bebek milik kelompok ini tidak berkembang, namun jika ada program lain yang sejenis, maka kelompok tersebut berniat akan melakukan kegiatan usaha kembali. Usaha tersebut belum sempat membuahkan hasil karena kebanyakan dari ternak bebek dimakan hewan pemangsa yaitu musang/rase.

Pada kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu, sesuai dengan keterangan ketuanya, Edi Saiful, pada wawancara awal di rumahnya (Senin, 4 April 2011), saat ini kelompok tersebut tidak melakukan kegiatan usaha. Usaha peternakan lele yang dilakukan saat menerima bantuan dana tahun 2009 dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Barat itu sempat menghasilkan satu kali panen lele, yaitu sekitar 3 bulan setelah benih lele disebar di empang

(sekitar awal Desember 2009). Namun setelah itu empang lele terkena banjir yang menghanyutkan ikan didalamnya dan menurutnya setelah peristiwa banjir tersebut, kegiatan usaha di kelompoknya belum dilakukan kembali. Saat ini, ikan yang masih tersisa di dalam kolam belum untuk usaha, melainkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi warga sekitar.

Pada KUPP Muara Bahagia, sesuai dengan keterangan yang diberikan ketuanya, Syarifudin, pada wawancara awal dirumahnya (Kanis, 31 Maret 2011), kelompok ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2008 dan usaha yang dilakukan adalah budidaya bandeng dan rumput laut. Kelompok ini sempat mengalami kerugian, yaitu ketika datang musim hujan dan air pasang rob yang berakibat rusaknya tanggul pada tambak bandeng mereka. Namun selanjutnya, kelompok ini berhasil bangkit dan hingga kini lebih berkonsentrasi melakukan usaha budidaya rumput laut. Dari usaha tersebut, menurut Syarifudin dia dapat memperoleh penghasilan mencapai sekitar Rp. 8 juta tiap bulan.

Berikut ini penulis membuat tabel ringkasan *existing condition* empat KUPP di Kabupaten Bekasi.

Tabel 1.3.

*Existing Condition* Empat KUPP di Kabupaten Bekasi

Nama KUPP	Informan	Kondisi existing	Keterangan
1. El Hawa	Yayah (Ketua)	Kelompok tidak ada lagi (bubar); usaha berhenti.	Pernah mendapat bantuan dana KUPP Rp. 5 juta.
2. Bhakti Remaja	Nasir Ma'ruf (Ketua) Edi Kasah (Sekretaris)	Kelompok masih ada; usaha tidak berjalan (ternak bebek masih tersisa sekitar 10 ekor).	Pernah mendapat bantuan dana KUPP Rp. 5 juta.
3. Karang Taruna Desa Kertarahayu	Edi Saiful (Ketua)	Kelompok masih ada; usaha tidak berjalan (ikan masih tersisa di empang, namun perkiraan jumlah tidak diketahui).	Pernah mendapat bantuan dana KUPP Rp. 5 juta.

4. Mekar Bahagia	Syarifudin (Ketua)	Kelompok ada; usaha berjalan baik.	Belum pernah mendapat bantuan dana KUPP dari Kemenpora, namun ada sumber dana lain.
------------------	--------------------	------------------------------------	---

Sumber :Telah diolah kembali berdasarkan hasil wawancara awal dengan para pengurus 4 KUPP di Kabupaten Bekasi (El Hawa, Bhakti Remaja, Karang Taruna Desa Kertarahayu, Mekar Bahagia).

Mengenai bantuan yang diberikan kepada KUPP, dana tersebut adalah dana dekonsentrasi, yaitu dana (anggaran) kementerian yang bersumber dari APBN yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditunjuk/ditetapkan oleh Gubernur (dalam makalah "*Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan*", oleh Ramidin Saragih, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Pemuda, pada tanggal 5 April 2011, Hotel Savoy Homann Bandung).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2009, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat telah menyerap dana dekonsentrasi untuk kepemudaan sebesar Rp. 2.750.000.000,-. Dalam jumlah tersebut, terdapat alokasi untuk kegiatan kepemudaan 2009 dalam Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda sebesar Rp. 1.951.010.000,-. Dari jumlah alokasi tersebut, tercakup berbagai kegiatan seperti Latihan Kepemimpinan Pemuda, Pengelola Program, Seleksi Proposal, Bantuan Lembaga Kepemudaan, Bantuan Sentra Pemberdayaan Pemuda, Bantuan Sentra Kewirausahaan Pemuda, Bantuan Rintisan Penumbuhan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI), Bantuan KUPP, Tahap Pelatihan Pembinaan Generasi Muda, Jambore Pemuda Indonesia, Pelaksanaan Bakti Pemuda Antar Provinsi, Bakti Pemuda Antar Provinsi, dan Pemantauan Evaluasi (dalam *Buku Data dan Informasi Pemuda dan Olahraga, Dinas Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan-Profil Umum Pemuda-Dana Dekonsentrasi Pemuda dan Olahraga - Kegiatan-Prasarana dan Sarana Olahraga-Mobil Pemuda dan Olahraga,*

Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Desember 2009).

Dari data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2009, dana bantuan KUPP telah diberikan hampir ke seluruh provinsi, kecuali ke Provinsi Lampung. Dari data tersebut, belum dapat dilihat adanya keberhasilan atau petunjuk berjalannya program KUPP di daerah secara eksplisit, kecuali dalam hal penyerapan dananya.

KUPP adalah salah satu program yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2009, Program Pengembangan KUPP masih merupakan strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang saat itu bernama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 2010, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat masih menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima Dana untuk Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Sentra Pemberdayaan Pemuda, dan Lembaga Kepemudaan, yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, nomor 188.4/942-Bidmud/2010, tanggal 24 Agustus 2010. Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa KUPP adalah program pemerintah pusat (dalam hal ini Kemenpora) yang implementasinya terdapat pada tingkat *grass root*, melibatkan pemerintah daerah, dan hingga kini program tersebut masih berjalan dalam masyarakat. Selain itu, dana dekonsentrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga masih melekat (masih ada) dan harus disalurkan (dalam Makalah *Peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Untuk Kewirausahaan Muda Indonesia*, oleh Kusmuljono, Chairman CPR Indonesia, disampaikan pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Provinsi Tahun 2011, 7 April 2011, Bandung). Dalam hal ini, KUPP adalah salah satu unit yang setiap tahun menerima penyaluran dana tersebut.

Sementara itu, rekomendasi dari Laporan Kegiatan Program Pengembangan KUPP 2005-2009, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009, pada bagian rekomendasi mengenai Program KUPP disebutkan bahwa :

- a. Pemerintah Daerah perlu didorong agar menyediakan anggaran untuk KUPP didaerahnya;
- b. Setiap Pemerintah Daerah perlu memetakan potensi daerah yang menjadi peluang untuk membuka usaha bagi pemuda;
- c. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan KUPP di setiap propinsi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;

Selanjutnya peneliti berusaha mencari karya ilmiah atau penelitian mengenai KUPP, namun hingga kini belum ditemukan. Dalam pencarian data awal, penulis juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara *existing conditions* pada tiga dari empat KUPP di Kabupaten Bekasi dengan KUPP yang seharusnya (normatif). Kenyataan tersebut adalah bahwa seluruh KUPP di Kabupaten Bekasi yang memperoleh bantuan dana pengembangan KUPP pada tahun 2009 (tiga KUPP, yaitu El Hawa, Bhakti Remaja, dan Karang Taruna Desa Kertarahayu), tidak berkembang sebagaimana dicita-citakan dalam pengertian normatif KUPP yang tercantum dalam Buku Pedoman Pengembangan KUPP. Berdasarkan pada realita tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi).

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana implementasi program pengembangan KUPP yang terjadi di Kabupaten Bekasi, karena dari implementasi dapat ditemukan bukti-bukti yang mengungkapkan ketidakefektifan dari suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah (Wahab, 2001). Selain itu, menurut Jenkins (1978, dalam Parsons 2008), studi implementasi adalah studi perubahan, yaitu : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Penelitian ini juga akan membahas mengenai pemberdayaan yang pernah terjadi pada empat KUPP tersebut, sebab dalam normatifnya, sebagaimana yang

tercantum , dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pengembangan KUPP, disebutkan bahwa pengembangan KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.

Studi akan dilakukan pada KUPP di Kabupaten Bekasi yang pernah menerima dana bantuan dari pemerintah melalui dana dekonsentrasi Kantor Kemenegpora pada tahun 2009, yaitu KUPP El Hawa, KUPP Bhakti Remaja, dan Karang Taruna Desa Kertarahayu, serta KUPP yang belum menerima dana bantuan KUPP dari pemerintah (dalam hal ini Kemenegpora), namun memiliki keistimewaan, yaitu KUPP Mekar Bahagia.

## **1.2. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi), dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pengembangan KUPP tahun 2009 di Kabupaten Bekasi, studi pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi.
2. Pemberdayaan yang terjadi pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi.

Studi akan dilakukan pada KUPP di Kabupaten Bekasi yang pernah menerima dana bantuan KUPP dari Kemenegpora pada tahun 2009, yaitu KUPP El Hawa, KUPP Bhakti Remaja, dan Karang Taruna Desa Kertarahayu, serta KUPP yang belum menerima dana bantuan KUPP dari Kemenegpora namun memiliki keistimewaan, yaitu KUPP Mekar Bahagia di Muara Gembong yang memiliki ketua yang juga menjadi Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2009 dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan perumusan masalah penelitian ini, maka disusunlah pertanyaan penelitian yang merupakan arahan bagi pengembangan metode penelitian dalam analisis data. Pertanyaan penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Pengembangan KUPP tahun 2009, di Kabupaten Bekasi ?
2. Bagaimana pemberdayaan yang terjadi pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi Program Pengembangan KUPP tahun 2009 yang terdapat di Kabupaten Bekasi, khususnya pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis pemberdayaan yang terjadi pada empat KUPP yang terdapat di Kabupaten Bekasi.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dan berbagai *stakeholder*, dan diharapkan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

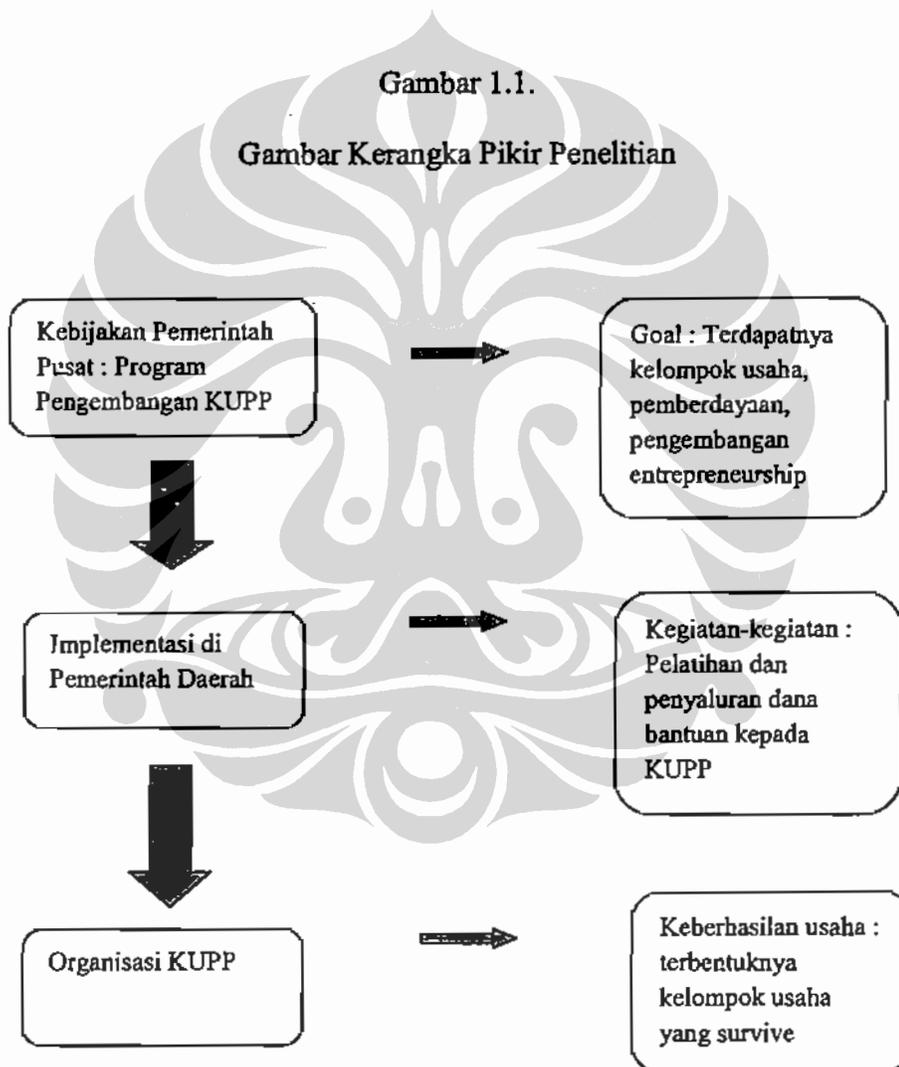
1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang kebijakan, kelompok usaha, praktek pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai salah satu praktek pembangunan kewirausahaan pemuda di Indonesia.

## 1.6. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan tidak mencakup data tentang dana.

## 1.7. Kerangka Pikir Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pikir dalam penelitian Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi).



## 1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam enam bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan yang berisi uraian tentang hal-hal yang mendasar dengan penelitian ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, batasan penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2, Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka pemikiran yang akan memperluas wawasan yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kelompok, kelompok usaha, pemberdayaan, pengembangan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan. Kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk menganalisis temuan-temuan di lapangan dari obyek yang diteliti.

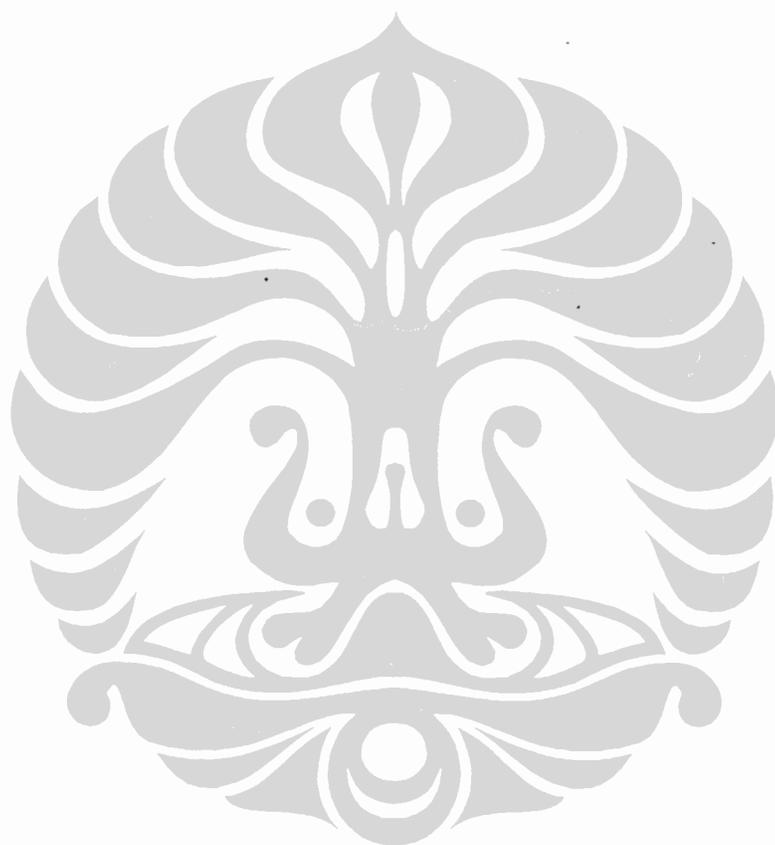
Bab 3, Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

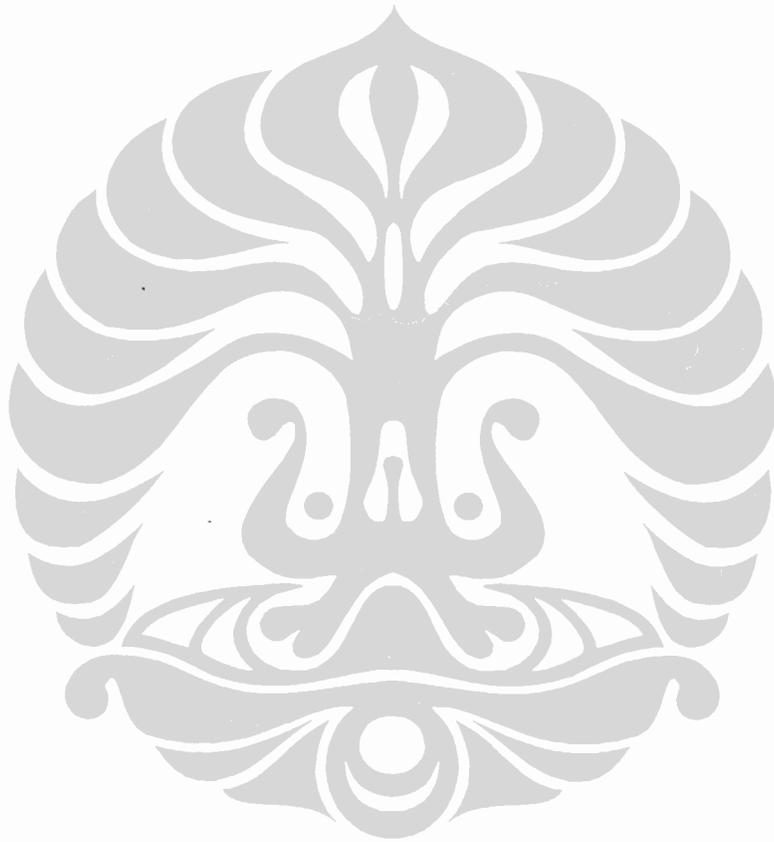
Bab 4, Gambaran Umum yang berisi berbagai hal yang merupakan hal mendasar yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu empat KUPP di Kabupaten Bekasi, karakteristik umum KUPP, Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, dan azas dekonsentrasi.

Bab 5, Pembahasan yang berisi analisis temuan lapangan berdasar pada teori-teori yang relevan. Terdapat pembahasan tentang implementasi program pengembangan KUPP pada 4 (empat) KUPP di Kabupaten Bekasi, serta pembahasan tentang pemberdayaan di kelompok-kelompok tersebut. Analisis ini pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Bab 6, Penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan secara singkat tentang isi bahasan penelitian. Dalam bab ini juga dicantumkan saran sebagai

rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah tentang implementasi program pengembangan KUPP di Kabupaten Bekasi.





## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dicantumkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, kelompok usaha, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan. Teori-teori tersebut diharapkan dapat berguna dalam memberikan analisis terhadap informasi yang ada.

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti meninjau beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian memiliki relevansi dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun perbandingan dalam proses penulisan.

##### **2.1.1. Leonardus Ricky Rengkung (1997) dengan judul tesis Efektivitas Pengelolaan Dana IDT serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Suatu Studi pada Beberapa Kelompok Masyarakat/POKMAS di Kabupaten Minahasa).**

Dalam tesis itu, dikatakan bahwa sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada, yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan penduduk miskin dalam berusaha. Guna mempercepat upaya tersebut, disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk berusaha sehingga mereka bisa membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Sifat dari usaha yang digerakkan dengan dana bantuan program IDT ini dapat dikatakan sebagai suatu jenis usaha kecil karena melibatkan tenaga atau pekerja yang sedikit dengan jumlah modal yang diusahakan relatif sedikit. Kesuksesan usaha yang digerakkan dengan dana IDT tergantung dari beberapa faktor yang ada, baik eksternal maupun internal, yaitu adanya penganalisaan lingkungan usaha, kemampuan kewirausahaan, adanya penentuan strategi usaha, pengelolaan modal yang baik, serta adanya manajemen yang baik.

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT ternyata memiliki kontribusi atau korelasi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Peluang sukses pelaksanaan usaha yang dijalankan POKMAS hanya dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (organisasi), *Consumen* (konsumen) dan kewirausahaan. Walaupun usaha yang dijalankan oleh POKMAS adalah usaha yang berskala kecil, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktek pengelolaan usaha berskala besar yang mempertimbangkan faktor proses manajemen, analisa lingkungan usaha, kewirausahaan dalam upaya membantu mensukseskan usaha yang dijalankan Pokmas.

**2.1.2. Rakhmani (2009) dengan judul tesis Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha bersama di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan).**

Fokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, dan dampak usaha ekonomi produktif pada tiga kelompok usaha bersama dalam komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara. Landasan utama program ini adalah pengembangan berbasis komunitas yang didukung oleh pendamping dalam memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri.

Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, namun disebabkan keterbatasan pengetahuan, waktu, aktivitas pekerjaan lain, pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan program adalah terdapatnya kebijakan anggaran dari pemerintah, dan kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapatan. Faktor penghambatnya adalah faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendampingan pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial pelaksanaan program adalah semakin baiknya hubungan sosial diantara

kelompok. Dampak lainnya adalah program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya perusakan hutan. Saran yang disampaikan berdasarkan penelitian adalah diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan program, bimbingan dan pelatihan terus menerus, serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain yang terkait, membina jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun bukan pemerintah.

### **2.1.3. Budiyanto (2009) dengan judul tesis Pengembangan Strategi Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Pemuda pada Kementerian XYZ.**

Tesis ini menghasilkan temuan bahwa program-program pemberdayaan kader kewirausahaan belum efektif menghasilkan kader-kader yang memiliki karakter yang kokoh sebagai wirausaha. Disebutkan dalam tesis ini bahwa pemberdayaan kader kewirausahaan adalah suatu strategi yang tepat untuk menimbulkan karakter kewirausahaan pada kader, tetapi strategi tersebut belum berhasil dengan baik karena sifatnya yang belum berkelanjutan. Proses pemberdayaan yang terjadi tidak berjalan optimal.

## **2.2. Kelompok Usaha**

Charles Horton Cooley, seorang sosiolog Amerika, memperkenalkan konsep kelompok yang disebut *primary group* yaitu "*characterized by intimate face-to-face association and cooperation*", yaitu bahwa kelompok ditandai oleh pergaulan dan kerja sama tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting dari kelompok ini adalah keluarga, teman bermain pada waktu kecil, dan rukun warga serta komunitas pada orang dewasa. Pergaulan intim ini menghasilkan terpadunya individu dalam satu kesatuan sehingga dalam banyak hal diri seseorang menjadi hidup dengan tujuan bersama kelompok (Cooley 1909, dalam Sunarto 2004).

Charles Horton Cooley, seorang sosiolog Amerika, memperkenalkan konsep kelompok yang disebut *primary group* yaitu "*characterized by intimate face-to-face association and cooperation*", yaitu bahwa kelompok ditandai oleh pergaulan dan kerja sama tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting dari kelompok ini adalah keluarga, teman bermain pada waktu kecil, dan rukun warga

serta komunitas pada orang dewasa. Pergaulan intim ini menghasilkan terpadunya individu dalam satu kesatuan sehingga dalam banyak hal diri seseorang menjadi hidup dengan tujuan bersama kelompok (Cooley 1909, dalam Sunarto 2004).

Robbins (1995) mengartikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung, serta bermaksud mencapai tujuan khusus.

Selanjutnya Merton (1965) mendefinisikan konsep kelompok sebagai *"a number of people who interact with one another in accord with established pattern"*. Maksudnya adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Menurutnya, terdapat tiga kriteria obyektif bagi suatu kelompok, yaitu (a) kelompok ditandai dengan seringnya terjadi interaksi; (b) pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota; (c) pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.

McDavid dan Harari dalam Gibson et.al (1993:h.202) mengatakan bahwa kelompok adalah suatu sistem yang terorganisasi, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, terdapat beberapa faktor pengikat kelompok, yaitu : interaksi, tujuan bersama, kepemimpinan, ikatan emosional, dan norma bersama. Dalam suatu kelompok, terdapat pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Sebaliknya, perilaku individu juga memberikan pengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok. Ini terutama terjadi karena adanya interaksi antara para anggotanya. Dalam berinteraksi, paling tidak harus punya satu tujuan bersama, karena itu perlu ada pemimpin yang mengarahkan.

Definisi selanjutnya tentang kelompok dikemukakan Hackman (1989, dalam Schwarz, 1994: h. 4-5), yang merupakan kelompok kerja yang memiliki

karakteristik tertentu, yaitu : (a) sebuah kelompok yang memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan satu atau lebih tugas, dengan hasil yang dapat dinilai; (b) sebuah kelompok kerja adalah suatu sistem sosial terbuka; (c) sebuah kelompok kerja beroperasi dalam konteks organisasi, yang mengharuskan untuk mengelola transaksi dengan individu dan kelompok.

Selanjutnya dalam Buku Pedoman Program Pengembangan KUPP Tahun 2009, diperoleh pengertian tentang KUPP sebagai berikut :

- a. Merupakan unit usaha produktif (bisnis) yang belum berbadan hukum (akte notaris), memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil milik kelompok yang beranggota 3 s.d. 10 orang pemuda;
- b. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 18 s.d. 35 tahun;
- c. Kriteria Usaha Mikro menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Kriteria Usaha Kecil menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Pengembangan KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.

Dari uraian tersebut maka diperoleh pengertian bahwa kelompok usaha yang dimaksud sebagai KUPP dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dalam suatu kelompok yang bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini kriteria usahanya adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman tersebut.

### 2.3. Pemberdayaan

Salah satu konsep pemberdayaan adalah yang dikemukakan oleh Rubin (1992:h.43), dimana konsep tersebut muncul dalam definisi Pembangunan Masyarakat, yaitu :

*“Pembangunan Masyarakat (Community Development) adalah pemberdayaan masyarakat melalui sekelompok orang yang terorganisasi, yang bertindak secara kolektif untuk mengendalikan keputusan, proyek, program, dan kebijakan yang mempengaruhi mereka sebagai suatu komunitas”.*

Selanjutnya menurut Payne dalam Adi (2008:h.77-78), pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Selain itu, konsep tentang pemberdayaan juga dikemukakan oleh Clinard (1996:h.117), yang menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat membentuk dua elemen penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam usaha memperbaiki tingkat kehidupannya, dengan mengandalkan sebisa mungkin pada inisiatif mereka sendiri.
2. Penyediaan bantuan teknis dan lainnya, dengan cara mendorong inisiatif, kemandirian, dan saling membantu, serta mengusahakan agar upaya dilakukan secara lebih efektif.

Dalam pengertian menurut PBB (dalam Conyers 1991:h.174-175), istilah pembangunan masyarakat (*community development*) telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan

kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kultural, serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberi kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Selanjutnya, dalam proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan, yaitu : (a) Kecenderungan primer : yaitu proses pemberdayaan dengan penekanan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, tujuannya membuat individu lebih berdaya. Terdapat kemungkinan adanya upaya membangun aset material sebagai pendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi; (b) Kecenderungan sekunder : yaitu proses pemberdayaan dengan menekankan pada proses pemberian stimulasi, yaitu memberi motivasi kepada individu agar memiliki keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog (Oakley and Marsden, 1984).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan kelompok, yang dapat berfungsi sebagai sarana yang mampu memberi manfaat kepada individu anggotanya, seperti : menunjang proses perkembangan intelektual, emosional dan sosial seseorang, dan sebagai pendorong munculnya perubahan situasi dan lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan proses pemberdayaan yang dapat berlaku sebagai pendorong munculnya perubahan situasi dan lingkungan masyarakat, maka hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Masyarakat tidak akan dapat berubah begitu saja dalam menghadapi persoalan yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Masyarakat tidak akan dapat begitu saja menyatu dengan program-program pembangunan, dan tidak dapat begitu saja meningkat kinerja kelompoknya dan menjadi manusia yang paripurna dalam segala hal kebaikan, mereka adalah manusia yang merupakan individu-individu yang memiliki rasa, mereka bukan robot atau mesin. Dalam hal ini, maka dalam masyarakat dibutuhkan adanya fasilitasi kelompok (Schwarz, 1994:h. 4).

Menurut Schwarz, fasilitasi kelompok adalah suatu proses di mana terdapat seseorang, yaitu yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok, yang bersikap netral, dan yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan intervensi (campur tangan) dengan tujuan membantu kelompok tersebut meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah, dan dalam membuat keputusan, dalam rangka meningkatkan efektivitas kelompok. Seseorang dimaksud adalah yang disebut fasilitator. Untuk dapat menjadi fasilitator diperlukan beberapa kemampuan dan keterampilan, agar fasilitasi kelompok yang dilakukan dapat berjalan baik dan efektif. Fasilitator memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja kelompok. Di dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009, antara lain diperoleh pengertian tentang KUPP sebagai berikut : KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing. Dari petunjuk tersebut maka telah disebutkan tentang adanya fasilitas bimbingan pendampingan.

Menurut Adi (2008:115), terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat metode intervensi sosial di level komunitas, seperti yang dijelaskan oleh Rothman (dalam Adi, 2008), yaitu berupa : intervensi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, aksi sosial, kebijakan sosial, ataupun menurut Glen (dalam Adi, 2008 :116) yaitu berupa pengembangan masyarakat (*community development*), aksi komunitas (*community action*), dan pelayanan masyarakat (*community services*).

Menurut Adi (2008:244-246), pengembangan masyarakat, khususnya yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat, secara umum melalui tahapan sbagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi : a. persiapan petugas (*tenaga community worker*), terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan pengembangan masyarakat; b. persiapan lapangan, yang pada awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan

dijadikan sasaran formal maupun informal. Setelah itu menjalin kontak dengan tokoh informal.

2. Tahap asesment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Pada tahap ini juga, pelaku perubahan memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, tahap perencanaan. Pengkajian yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu, namun juga dapat secara berkelompok.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya.
4. Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap implementasi program atau kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antar pelaku perubahan dan warga masyarakat ataupun kerjasama warga.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk

melakukan pengawasan internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi, yaitu tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena batas waktu yang telah ditetapkan atau karena anggaran sudah selesai.

Kemudian, menurut Seidman (1983), dalam membicarakan perubahan, maka erat kaitannya dengan intervensi sosial, yang salah satu definisinya sebagai berikut : intervensi sosial adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan hubungan-hubungan yang bersifat kemasyarakatan, baik direncanakan maupun tidak, baik diinginkan maupun tidak. (Seidman, 1983, dalam Schwarz, 1994). Lalu siapakah yang melakukan proses intervensi? Jawabannya adalah orang yang disebut fasilitator. Tidak semua orang bisa menjadi fasilitator, karena untuk itu diperlukan kemampuan khusus agar fasilitasi kelompok dapat berjalan baik dan dapat meningkatkan efektifitas kelompok.

Schwarz mengemukakan bahwa fasilitator harus dapat diterima oleh semua anggota kelompok, secara substantif netral, yakni tidak menunjukkan kecenderungan untuk memihak dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, menurut definisi, seorang anggota kelompok secara formal tidak dapat mengisi peran fasilitator.

#### 2.4. Pengembangan Karakter Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah sebuah fenomena yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan dunia. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut sebenarnya berawal dari bahasa Perancis yaitu '*entreprende*' yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar

ekonomi J.B. Say pada tahun 1803 untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak lagi (dalam Lupiyoadi, 2007).

Joseph C. Schumpeter adalah pakar ekonomi pertama yang mendukung gagasan J.B. Say, dia mengemukakan bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah untuk melakukan inovasi, atau menciptakan kombinasi-kombinasi baru. Wirausaha melakukan suatu proses yang disebut dengan '*creative destruction*' terhadap keseimbangan pasar. Inovasi yang diciptakannya akan menghancurkan keseimbangan yang terdapat pada pasar untuk kemudian mencapai keseimbangan baru dengan keuntungan-keuntungan atas inovasi tersebut.

Raymond W.Y. Kao (1995, dalam Lupiyoadi, 2007) menyebut bahwa kewirausahaan sebagai suatu proses, yaitu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi). Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan wirausaha mengacu pada orang yang melaksanakan proses penciptaan kesejahteraan/kekayaan dan nilai tambah, melalui penciptaan gagasan, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Dengan kata lain, seorang wirausaha adalah orang yang mampu meretas gagasan menjadi realitas. Seorang wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkannya untuk peningkatan kesejahteraan diri, masyarakat dan lingkungannya.

Definisi lain entrepreneurship dikemukakan oleh Robert D. Hisrich dan Candida G. Brush, sebagai berikut :

*"...entrepreneurship adalah proses, dimana diciptakan sesuatu yang berbeda yang bernilai, dengan jalan mengorbankan waktu dan upaya yang diperlukan, di mana orang menanggung resiko finansial, psikologikal, serta sosial, dan orang yang bersangkutan menerima hasil-*

*hasil berupa imbalan moneter, dan kepuasan pribadi sebagai dampak kegiatan itu.*"(Hisrich, et.al. 1985:18, dalam Lupiyoadi, 2007).

Sukardi (1992, dalam Lupiyoadi, 2007) menemukan sembilan karakteristik tingkah laku kewirausahaan yang paling sering ditemukan dalam penelitian-penelitian terhadap wirausaha di seluruh dunia, yaitu :

a. Sifat Instrumental

Sifat instrumental sebagai karakteristik wirausaha menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada dilingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Segala sesuatu yang ada dilingkungannya dipandang sebagai alat (instrumen) tujuan pribadi.

b. Sifat Prestatif

Sifat prestatif sebagai karakteristik wirausaha menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Wirausaha selalu berbuat lebih baik, tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai sekarang, dan selalu membuat target yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya.

e. Sifat Keluwesan Bergaul

Sifat keluwesan bergaul sebagai karakteristik wirausaha menunjukkan wirausaha selalu berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia, seperti aktif bergaul, membina kenalan-kenalan, mencari kenalan baru, ramah, akomodatif, dan lainnya.

d. Sifat Kerja Keras

Sifat kerja keras sebagai karakteristik wirausaha menunjukkan ia selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Wirausaha mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan yang nyata untuk mencapai tujuan, ia adalah orang yang tidak mau berpangku tangan.

e. Sifat Keyakinan Diri

Sifat ini menunjukkan ia selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Selalu yakin akan berhasil.

f. Sifat Pengambilan Resiko

Sifat ini menunjukkan bahwa dia selalu memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan berusaha.

g. Sifat Swa-Kendali

Sifat ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi, batas-batas kemampuan dalam berusaha. Mereka menyadari bahwa melalui pengendalian diri, kegiatan dapat lebih terarah pada pencapaian tujuan.

h. Sifat Inovatif

Sifat ini menunjukkan bahwa ia selalu berusaha mendekati berbagai masalah dalam berusaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Terbuka untuk gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Selalu berpandangan ke depan untuk mencari cara baru atau memperbaiki cara-cara yang biasa dilakukan orang lain untuk peningkatan kinerja.

i. Sifat Kemandirian

Sifat ini menunjukkan bahwa ia selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan konsekuensi pribadi wirausaha.

Tingkah laku seorang wirausaha adalah juga sifat wirausaha tersebut. Dengan demikian, bagi seseorang yang tertarik untuk menjadi wirausaha, dia dapat mempelajari dan menjalani tingkah laku wirausaha yang telah disebutkan

sebelumnya sehingga terbiasa dan memiliki sifat wirausaha. Mitos bahwa *entrepreneur is born* tidak berlaku, karena pada realitanya kewirausahaan dapat dibentuk melalui proses belajar.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sarasson (1996, dalam Lupiyoadi, 2007), yang menegaskan bahwa karakteristik adalah hasil dari proses belajar :

1. Bila seorang individu dewasa sebelumnya yakin bahwa dia dapat dan mampu mengadopsi cara-cara tingkah laku baru, khususnya untuk mengubah kepribadiannya, maka kemungkinan keberhasilannya akan lebih besar.
2. Bila seorang individu dewasa mempersepsikan bahwa perubahan yang harus dia lakukan sesuai dengan tuntutan yang wajar dari tujuan yang ia capai, perubahan akan mudah terjadi.
3. Bila seorang individu dewasa dapat secara lebih jelas mendapatkan gambaran langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk mengubah pribadinya, perubahan akan mudah terjadi.
4. Makin mengalami secara nyata seorang individu dewasa bahwa perubahan yang ia lakukan memang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan, maka makin mudah dia untuk mengubah diri.
5. Makin mendapatkan pengalaman nyata seorang individu dewasa bahwa perubahan pribadi membawa keberhasilan, makin mudah perubahan terjadi. Perubahan pribadi makin terwujud apabila lingkungan si individu dewasa menunjang perubahan tadi.

Munculnya banyak wirausaha telah menarik perhatian para pakar untuk meneliti bagaimana mereka terbentuk, yang pada intinya bahwa menjadi wirausaha adalah sebuah proses. Terdapat beberapa teori mengenai proses pembentukan wirausaha, antara lain :

### 1. *Life path change*

Menurut Shapero dan Sokol (1982) dalam Lupiyoadi, 2007, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur sistematis dan terencana. Banyak orang menjadi wirausaha justru tidak melalui proses yang sistematis, antara lain karena : (1) *negative displacement* yaitu karena adanya tekanan atau kondisi keterpaksaan (hambatan) sehingga wirausaha adalah pilihan utama; (2) *being between things* yaitu umumnya terjadi karena ada orang-orang yang baru keluar dari kondisi keteraturan tertentu, seperti kemiliteran, sekolah, penjara, dan lainnya, sehingga mereka seperti memasuki dunia baru yang belum mereka kuasai. Kondisi ini membuat mereka seakan berada ditengah-tengah dari dua dunia yang berbeda, namun mereka tetap harus berjuang untuk kelangsungan hidup. Disinilah biasanya pilihan menjadi wirausaha muncul karena bisa bekerja mengandalkan diri mereka sendiri. (3) *having positive pull*, yaitu orang-orang yang mendapat dukungan membuka usaha dari mitra kerja, investor, pelanggan atau pun mentor. Dukungan ini memudahkan mereka mengantisipasi peluang usaha dan menciptakan rasa aman dari resiko berusaha.

### 2. *Goal directed behaviour*

Menurut Wolman (1973), dalam Lupiyoadi, 2007, seseorang dapat saja menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini hendak menggambarkan bagaimana seseorang tergerak menjadi wirausaha, motivasinya dapat terlihat dari langkah-langkahnya dalam mencapai tujuan (*goal directed behaviour*). Diawali dari dorongan *need*, kemudian *goal directed behaviour*, hingga tercapainya tujuan. Sedangkan *need* itu sendiri dari skema muncul karena adanya defisit dan ketidakseimbangan tertentu pada diri individu yang bersangkutan (wirausaha). Seseorang terjun dalam dunia wirausaha diawali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan, ini mendorong kegiatan-kegiatan tertentu, yang ditujukan pada pencapaian tujuan. Dari kacamata teori *need* dan motivasi tingkah laku, seperti menemukan kesempatan berusaha, sampai mendirikan dan melembagakan usahanya merupakan *goal directed behaviour*. Sedangkan tujuannya adalah mempertahankan dan memperbaiki kelangsungan hidup wirausaha.

### 3. Pengambilan keputusan

Sebelum mengambil keputusan terjun ke dunia wirausaha, seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Menurut Sukardi (1991) dalam Lupiyoadi, 2007, jika seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha, maka dia akan menyelaraskan tindakan dengan hasil keputusannya. Ini membuktikan bahwa seseorang dapat menjadi wirausaha tanpa harus memikirkan faktor genetik (keturunan), namun selama dia rajin dan tekun mendalami keputusannya, maka akan menyesuaikan dengan sendirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan : (a) Faktor-faktor yang berasal dari situasi lingkungan keputusan itu sendiri; (b) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pengambil keputusan sendiri (contohnya adalah kesaharan dan keuletan).

### 4. *Outcome expectancy*

Bandura (1986) dalam Lupiyoadi, 2007, menyatakan bahwa *outcome expectancy* bukan suatu perilaku tetapi keyakinan tentang konsekuensi yang diterima setelah seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. *Outcome expectancy* adalah keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperolehnya jika ia melaksanakan suatu perilaku tertentu, yaitu perilaku yang menunjukkan keberhasilan. Seseorang memperkirakan bahwa keberhasilannya dalam melaksanakan tugas tertentu akan mendatangkan imbalan dengan nilai tertentu juga.

Selanjutnya Stoner (1995) dan Bureh (1986) (dalam Lupiyoadi, 2007), menyebutkan adanya dampak sosio ekonomis dari adanya wirausaha, yaitu:

- a. Menciptakan lapangan kerja
- b. Meningkatkan kualitas hidup
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- d. Memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional.

- e. Meningkatkan kesejahteraan pemerintah melalui program pemerintahan, contohnya pajak

Selanjutnya karena KUPP bergerak pada tataran usaha kecil, maka penting untuk juga mencantumkan definisi usaha kecil. Menurut Stoner et.al. (1995, Lupiyoadi, 2007), bentuk usaha yang sesuai bagi wirausaha adalah usaha kecil, karena usaha kecil biasanya memiliki beberapa pekerja sehingga memudahkan wirausaha mengorganisasikan usahanya. Usaha kecil adalah suatu bentuk usaha yang tidak tergantung kepada pemilik dan manajemennya, serta tidak mendominasi pasar di mana ia berada. Usaha kecil tidak menjadi bagian dari bisnis lainnya, sehingga sebagai perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pasar dimana dia berada.

## 2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan itu disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam Parson, 2005).

Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah (Heidenheimer et.al., 1990:3, dalam Parson, 2005).

Arti publik dalam konteks kebijakan publik menurut Wibisana, tercakup dalam empat dimensi : (1) kebijakan tersebut adalah kebijakan negara/pemerintah berupa pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan; (2) bertujuan untuk mengatasi situasi tertentu dan bermakna demi melindungi kepentingan publik atau memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan publik; (3) kebijakan tersebut memandu tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah; (4) didasarkan pada peraturan perundangan dan bersifat otoritatif.

Wibisana juga mengemukakan definisi kebijakan publik yaitu menggambarkan kebijakan secara umum yang mencakup respon pemerintah

terhadap situasi tertentu yang dijiwai dengan nilai tertentu dan disertai pula dengan petunjuk atau cara dan program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam studi kebijakan publik, terdapat bagian yang disebut implementasi. Jenkins (1978, dalam Parson, 2005) mengemukakan bahwa studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Anderson (1975, dalam Parson, 2005) menyatakan bahwa kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan/lembaga dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat. Anderson juga menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap *demands/claim* yang mengalir dari lingkungannya”. Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.

Menurut Pressman dan Wildavsky (1973, dalam Parson, 2005), implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, hal itu adalah kemampuan untuk “membangun hubungan” dalam mata rantai sebab-akibat agar kebijakan bisa berdampak. Implementasi akan semakin tak efektif jika hubungan antara semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan “defisit implementasi”.

Tujuan harus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus bisa berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas. Kedua peneliti itu juga menekankan bahwa implementasi membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top down* dan sumber daya yang

dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Pandangan Pressman dan Wildavsky ini merupakan salah satu pandangan tentang hubungan kebijakan-implementasi dengan model pendekatan *top down*.

Model *top down* sebagai model dalam melihat proses implementasi dikritik karena tidak menjelaskan peran aktor dan unsur lain. Menurut Elmore (1979, dalam Parson, 2005), pembuat kebijakan mestinya menyadari bahwa kebijakan paling baik diimplementasikan dengan apa yang diistilahkan sebagai "*backward mapping*" (pemetaan mundur) atas problem dan kebijakan. Maksudnya, dalam implementasi maka definisi sukses adalah berdasarkan term manusia atau perilaku manusia, dan karenanya kesuksesan bukanlah sekadar pemenuhan sebuah "hipotesis". Pemetaan maju (*forward mapping*) – atau pendekatan *top down* – menurut Elmore adalah tak lebih dari mitos yang "semakin sulit dipertahankan di hadapan kenyataan dalam sifat proses implementasi (Elmore, 1985:20).

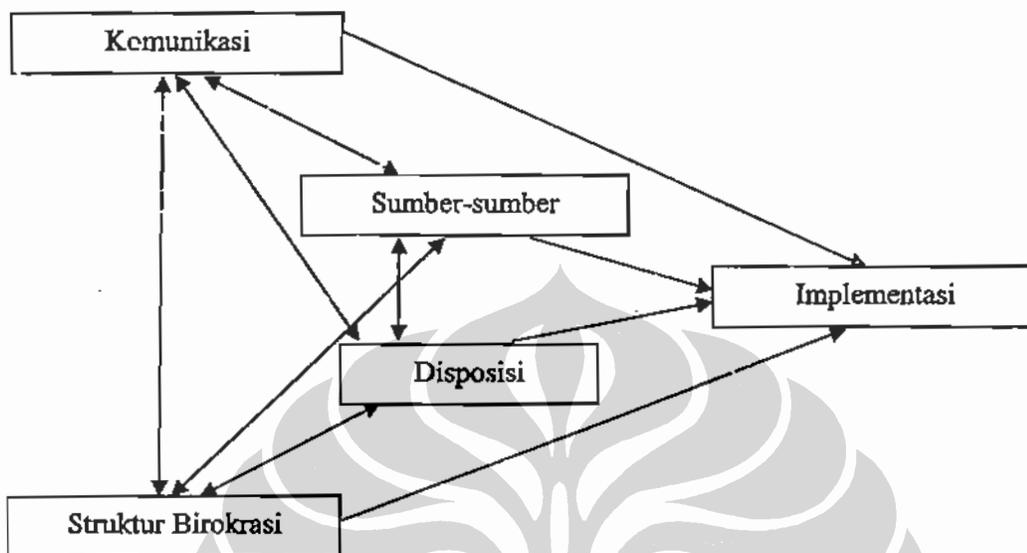
Elmore menyarankan agar kita mulai dengan pernyataan yang konkret tentang perilaku yang menciptakan peluang intervensi kebijakan, mendeskripsikan seperangkat operasi organisasional yang diperkirakan dapat mempengaruhi perilaku, mendeskripsikan perkiraan efek dari operasi itu, dan kemudian mendeskripsikan perkiraan efek dari setiap level proses implementasi terhadap perilaku sasaran dan sumberdaya apa yang diperlukan agar efek itu terjadi.

Ide pemetaan mundur (*backward mapping*) adalah memulai pada fase ketika kebijakan meneapai titik terakhirnya, kemudian analisis dan susun kebijakan dari pola perilaku dan konflik yang ada.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik, salah satunya adalah yang dikemukakan George C. Edwards III (1980). Menurutny ada empat faktor atau variabel utama yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resources*), disposisi atau sikap (*dispotisions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

## Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III



Sumber : Wahab, Abdul, Solichin, (2001). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*.

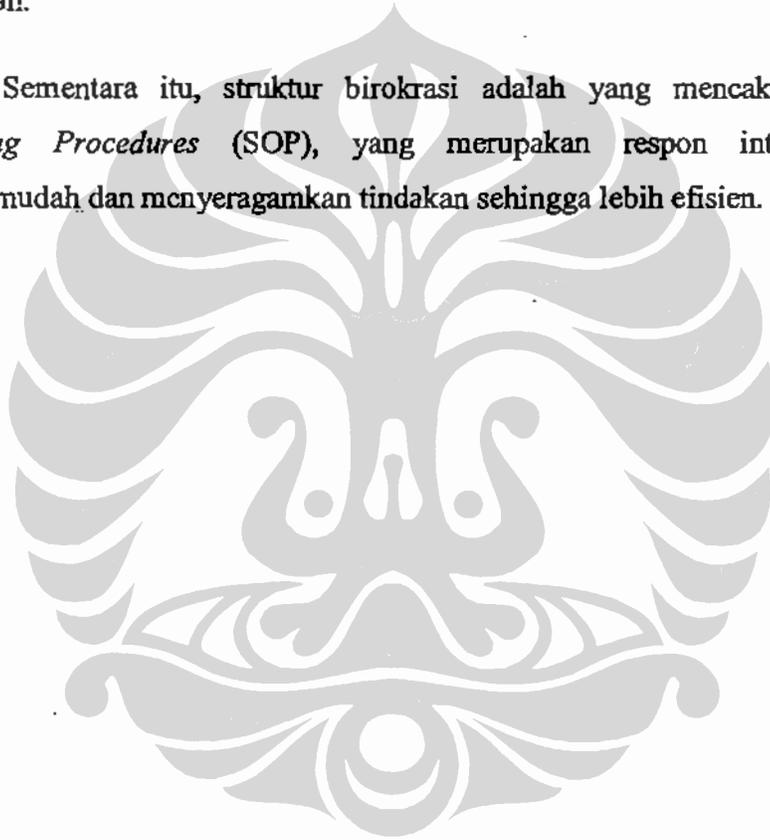
Menurut Edwards (1980), penerapan keempat faktor atau variabel tersebut harus berlangsung secara simultan satu sama lain, integral dan tidak parsial, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi. Edwards mengatakan bahwa agar implementasi kebijakan efektif, maka pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Petunjuk atau perintah untuk implementasi kebijakan harus diteruskan kepada personil yang tepat dan jelas, akurat dan konsisten. Berbagai petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah untuk mengikutinya. Dalam aspek ini dibutuhkan kejelasan standar dan tujuan yang harus dicantumkan dan dikomunikasikan kepada pelaksana, serta konsistensi.

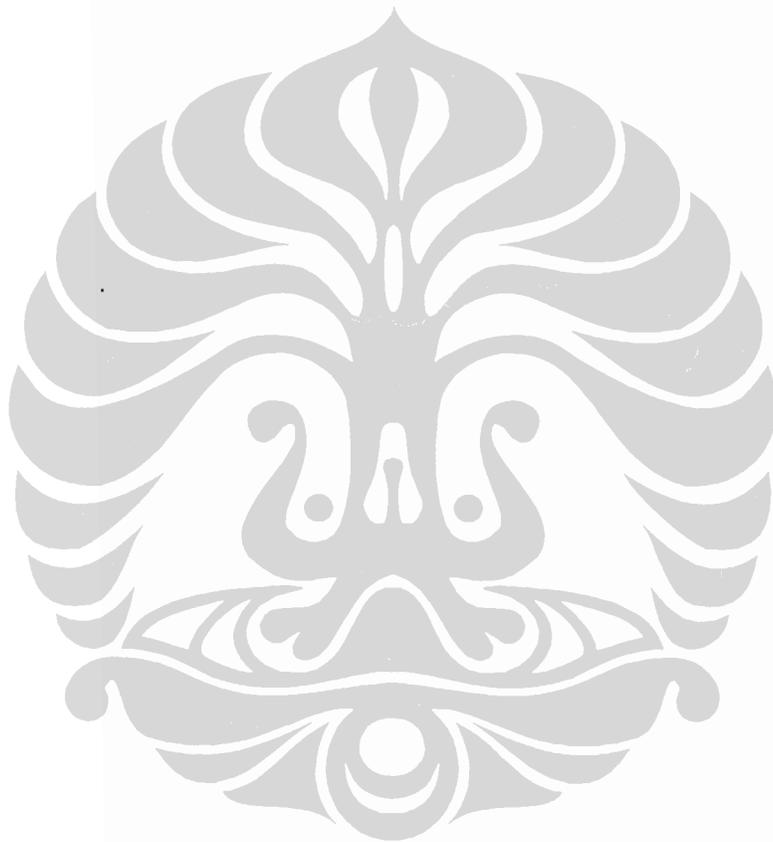
Mengenai sumberdaya, Edwards mengatakan bahwa jika sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kurang atau tidak tersedia, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik antara lain adalah sumber daya manusia, informasi, dana,

kewenangan, dan fasilitas. Keseluruhan unsur tersebut dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan baik.

Selanjutnya, Edwards menjelaskan tentang disposisi atau sikap, menurutnya disposisi berhubungan dengan kecenderungan sikap dari pelaksana yang dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Menurutnya, di lapangan, implementor kerap melakukan kecenderungan tersebut daripada mengikuti petunjuk yang ditetapkan.

Sementara itu, struktur birokrasi adalah yang mencakup *Standard Operating Procedures* (SOP), yang merupakan respon internal untuk mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga lebih efisien.





### BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan sebagai kerangka kerja bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya di lapangan. Bagian ini membahas tentang pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan dan teknik pengolahan data.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan KUPP, dengan studi pada empat KUPP di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan program KUPP yang akan diteliti adalah mulai dari peranan masyarakat peranan pemerintah, hingga implementasi di lapangan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang dapat menunjukkan bagaimana berjalannya program tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat diperoleh informasi yang menggambarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program tersebut di masyarakat. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Alston dan Bowles (1995,1.9) penelitian kualitatif lebih tertarik pada pemahaman bagaimana pengalaman hidup dalam penafsiran arti dan fenomena sosial, penjelajahan konsep-konsep dan pengembangan teori-teori baru.

Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (1992), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan : (1) pengamatan langsung (*direct observation*) terhadap kegiatan KUPP yang masih ada; (2) wawancara tidak berstruktur dan mendalam (*unstructured or intensive interview*) dengan para pengurus KUPP dan para aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan pendekatan ini peneliti dapat menjajaki secara lebih mendalam obyek yang akan diteliti. Dengan langsung melihat kondisi di lapangan dan mengadakan interaksi langsung dengan pengurus KUPP dan aparat pemerintah yang terlibat didalamnya, peneliti

berusaha mendeskripsikan jawaban secara obyektif dan seakurat mungkin tentang berjalannya program pengembangan KUPP.

### 3.2. Jenis Penelitian

Untuk menggambarkan pelaksanaan program pengembangan KUPP pada tahun 2009 di Kabupaten Bekasi, mulai dari keadaan yang terjadi pada KUPP saat itu hingga proses yang melibatkan aparat pemerintahan, maka jenis penelitian yang sesuai dan akan digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Menurut Neuman (1997, h.19), penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, hubungan sosial atau setting sosial. Metode deskriptif dapat diartikan pula sebagai tata cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada kondisi sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Fakta-fakta tersebut pada tahap awal tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap, termasuk upaya mengemukakan hubungansatu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti.

### 3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup waktu dan lokasi sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Waktu penelitian : pengumpulan data dan penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2011 hingga bulan Juni 2011.
2. Lokasi penelitian dibatasi dengan cakupan 4 (empat) KUPP di Kabupaten Bekasi, yaitu KUPP El Hawa (lokasi di Kecamatan Kedungwaringin), KUPP Bbakti Remaja (lokasi di Kecamatan Cibitung), Karang Taruna Desa Kertarahayu (lokasi di Kecamatan Setu), KUPP Mekar Bahagia (lokasi di Kecamatan Muara Gembong). Selain itu juga mencakup Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi.
3. Masalah yang diteliti mencakup : implementasi program pengembangan KUPP pada 4 (empat) KUPP di Kabupaten Bekasi; pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada 4 (empat) KUPP tersebut. Masalah dibatasi

pada konsep yang memfokuskan pada : (a) implementasi program pengembangan KUPP; (b). pemberdayaan masyarakat; (c) kewirausahaan.

### 3.4. Peran Peneliti

Dalam penelitian Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi) ini, peneliti adalah instrumen utama pengumpulan data. Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman (1987 dalam Creswell 2003), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif sehingga terdapat bias, nilai, dan penilaian peneliti, namun keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif.

### 3.5. Informan

Berdasarkan pada konsepsi informan, di dalam penelitian ini, informan yang akan digunakan dibagi dalam dua klasifikasi yaitu :

#### 1. Pelaksana program, yaitu :

- Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yaitu pada Seksi Kewirausahaan Pemuda, di Bidang Pemuda, pada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
- Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada Bidang Kepemudaan ataupun unit lain yang melayani kegiatan KUPP, pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;
- Pejabat yang mengelola Program Pengembangan KUPP tahun 2009 di Kemenpora, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan Kewirausahaan Pemuda pada Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga Tahun 2009. Sebagai catatan, saat ini telah terjadi perombakan organisasi dan tata laksana pada institusi Kemenpora, sehingga unit yang mengelola KUPP mengalami perubahan nama unit kerja. Saat ini tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan KUPP terdapat pada Deputi Pengembangan Pemuda, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Bidang Kelembagaan.

2. Penerima program atau layanan, yaitu pengurus KUPP, yang telah peneliti pilih berdasarkan berbagai alasan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, yaitu Ketua atau Pengurus KUPP El Hawa, KUPP Bhakti Remaja, Karang Taruna Desa Kertarahayu, KUPP Mekar Bahagia.

Menurut Moeloeng (2002, h.90), informan adalah orang dalam pada latar penelitian, atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Disamping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan & Biklen, 1992).

Menurut Sarantakos (1993, dalam Foerwandari, 1998), prosedur pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik : (1) diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian; (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian, dan (3) tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah/peristiwa acak) melainkan pada kecocokan konteks. Didalam penelitian ini, teknik sampling yang dipilih adalah *purposive sampling*, yaitu peneliti memiliki dan menetapkan sampel populasi (informan) berdasarkan tujuan penelitian (dalam Alston dan Bowles, 1998, h. 90)

### 3.6. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer yang didapat dari informan pertama, yaitu individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, pihak dinas terkait yang

dianggap memahami masalah dalam penelitian ini. Data primer antara lain berupa :

- Catatan hasil wawancara
  - Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian
  - Data-data mengenai informan
2. Data sekunder, merupakan data yang disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau data lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh, baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 1999: 99-100). Data sekunder tersebut antara lain berupa :
- SK Penerima Bantuan
  - Data Kelompok
  - Modul

### 3.7. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam *indepth interview* dengan aparat pemerintah terkait (aparat pada Kemenpora, aparat pada Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, aparat pada Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, Pengurus KUPP)
- b. Observasi ke empat KUPP.
- c. Studi dokumentasi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan Program Pengembangan KUPP di Kabupaten Bekasi, dimana dokumen tersebut akan diperoleh dari para informan.

Wawancara mendalam adalah mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada semua informan berdasar pada daftar pertanyaan (pedoman) wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Alston dan Bowles (1998; h.120), wawancara mendalam bertujuan untuk melihat dunia dari pandangan responden, untuk menyelidiki pemikiran dan perasaan mereka dan untuk memahami secara seksama sudut pandang mereka.

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian baik peristiwa, kehidupan keseharian (perilaku) informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati secara langsung dan merasakan pelaksanaan kegiatan KUPP.

Studi dokumentasi adalah yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan mempelajari dokumen/laporan, gambar atau bahan-bahan tertulis, ataupun rekaman yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.8. Prosedur Analisa Data**

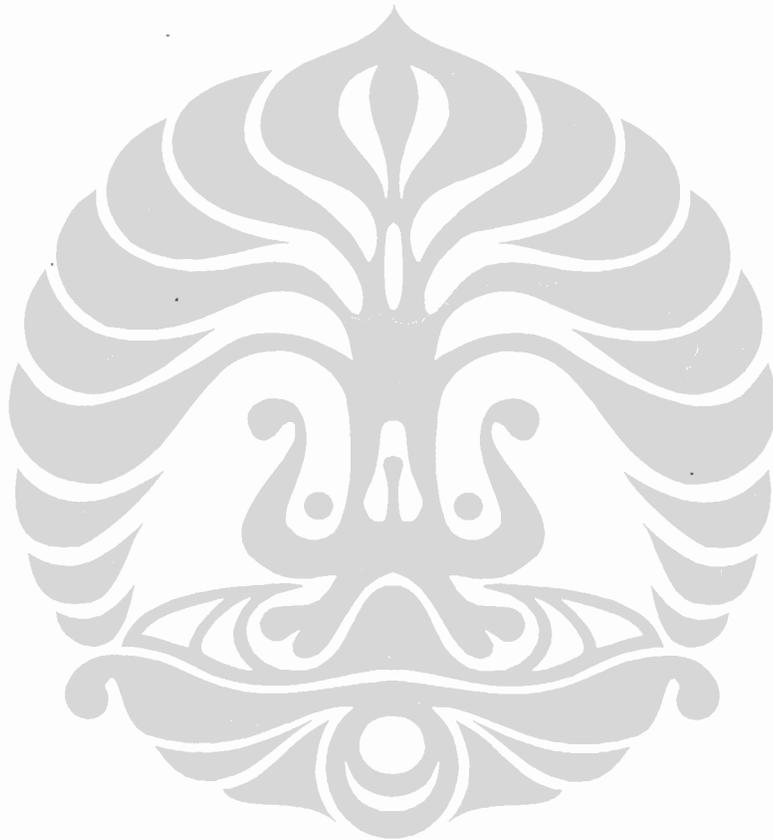
Penelitian yang dilakukan meliputi analisis terhadap implementasi Program Pengembangan KUPP, dan akan dilakukan penelitian pada 4 KUPP di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya akan diteliti pemberdayaan yang terjadi pada 4 KUPP tersebut.

Merriam (1988) dan Marshall & Rossman (1998) (dalam Creswell, 2003, h. 60) berpendapat bahwa pengumpulan dan analisa data harus merupakan sebuah proses yang bersamaan dalam penelitian kualitatif. Selama analisa data, data akan disusun secara kategori dan kronologis, ditinjau secara berulang-ulang, dan terus menerus dikategorisasikan.

Teknik (prosedur) analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data-data yang akan terkumpul dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi akan dianalisis. Proses analisis akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yakni sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Hasil proses data, kemudian dirangkum dan diseleksi sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, serta akhirnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Jadi, untuk melakukan analisa dalam penelitian tentang KUPP ini, peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip yang dijelaskan dibawah ini.

Menurut Sarantakos dalam Alston dan Bowles (1998, h. 195), dalam menganalisis data kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu:

1. **Reduksi Data**, dalam tahap ini data telah dikode, diringkas dan dikategorisasikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang diteliti;
2. **Pengorganisasian Data**, dalam tahap ini informasi yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema dari penelitian;
3. **Interpretasi Data**, pada tahap ini dilakukan proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, penjelasan-penjelasan yang membawa kesimpulan yang telah diuji melalui data yang benar-benar lengkap.



### 3.9. Operasionalisasi Konsep

Tabel 3.1.  
Operasionalisasi Konsep

No.	Faktor-faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1.	Implementasi Program Pengembangan KUPP, syarat implementasi : 1. Komunikasi 2. Sumber-sumber 3. Disposisi/sikap 4. Struktur Birokrasi	Primer, sekunder	informan	interview	1. Pejabat Kemenpera 2. Pejabat Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 3. Pejabat Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi
2.	Kelompok dan Kelompok usaha	Primer, sekunder	informan	interview	1. Pejabat Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi 2. Ketua/Pengurus KUPP 3. Fasilitator
3.	1. Pemberdayaan : a. Partisipasi masyarakat b. Penyediaan bantuan teknis/pendampingan 2. Pengembangan masyarakat, terdiri dari : tahap persiapan; asesment; perencanaan; formulasi rencana aksi; implementasi program; evaluasi; terminasi	Primer, sekunder	informan	interview	1. Pejabat Dinas Pemuda Jawa Barat. 2. Pejabat Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi 3. Ketua/Pengurus KUPP 4. Fasilitator/pendamping
4.	Pengembangan karakter kewirausahaan/entrepreneurship : sifat instrumental; prestatif; keluwesan bergaul; kerja keras; keyakinan diri; pengambilan resiko; swa-kendali; inovatif; dan kemandirian	Primer, sekunder	informan	interview	1. Ketua/Pengurus KUPP

## BAB 4 GAMBARAN UMUM

Dalam Gambaran Umum dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dalam penelitian Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi). Dalam bab ini akan dibahas mengenai Program Pengembangan KUPP, azas dekonsentrasi, Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, dan 4 (empat) KUPP di Kabupaten Bekasi

### 4.1. Program Pengembangan KUPP

Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) merupakan salah satu strategi yang dilakukan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, untuk menumbuhkan gairah usaha di daerah sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda yang diluncurkan sejak tahun 2005 dengan tujuan mengembangkan karakter dan budaya wirausaha di kalangan pemuda Indonesia. Melalui penanaman karakter dan budaya wirausaha di kalangan pemuda, diharapkan muncul wirausahawan-wirausahawan baru sebagai cikal penggerak ekonomi nasional dari berbagai penjuru di Indonesia (dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Tahun 2009*, Kemenegpora, 2009).

Dari dokumen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009 diperoleh pengertian tentang KUPP sebagai berikut :

- a. Merupakan unit usaha produktif (bisnis) yang belum berbadan hukum (akte notaris), memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil milik kelompok yang beranggota 3 s.d. 10 orang pemuda;
- b. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 18 s.d. 35 tahun;
- c. Kriteria Usaha Mikro menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- d. Kriteria Usaha Kecil menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Pengembangan KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.

Visi Program Pengembangan KUPP adalah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil di daerah pedesaan dan perkotaan yang dirintis, dikembangkan oleh pemuda dan mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai ekonomi, serta dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan misi Program Pengembangan KUPP adalah mendorong dan memfasilitasi pemuda putus sekolah dan menganggur untuk berwirausaha dengan memproduksi barang dan jasa berbasis sumberdaya lokal yang berkualitas dan diterima oleh pasar (dalam *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*, Kemenegpora, 2009). Menurut Ponidjan Puspodihardjo, pada wawaneara awal yang dilakukan di Kantor Kemenpora pada tanggal 27 April 2011, dikatakan bahwa filosofi dari program pengembangan KUPP adalah bagaimana mengubah mindset pemuda, agar pemuda memiliki jiwa entrepreneurship, menciptakan peluang usaha sendiri, dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada disekelilingnya. Puspodihardjo merupakan Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan Kewirausahaan Pemuda pada Asdep Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda pada tahun 2009.

Selanjutnya, program pengembangan KUPP bertujuan :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan KUPP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang mampu memproduksi barang dan jasa yang diterima oleh pasar.
2. Meningkatkan peran KUPP dalam pembangunan karakter dan budaya wirausaha bagi pemuda di daerah, penciptaan lapangan kerja, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Hasil yang diharapkan dari berkembangnya KUPP di daerah adalah :

1. Semakin terbukanya lapangan usaha bagi pemuda dan lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya.
2. Meningkatnya penghasilan pemuda yang menjalankan usaha produktif.
3. Munculnya sentra-sentra kewirausahaan pemuda di berbagai daerah yang ditopang oleh KUPP-KUPP terkait dan bersinergi dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasaran.

Program Pengembangan KUPP dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga di tingkat pusat dan daerah. Di Tingkat Pusat, program ini dikelola oleh Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda. Di daerah, program ini dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang mengurus masalah kepemudaan (dalam *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*, Kemenegpora 2009). Di tingkat pusat, kegiatan yang dirancang untuk pengembangan KUPP antara lain sebagai berikut :

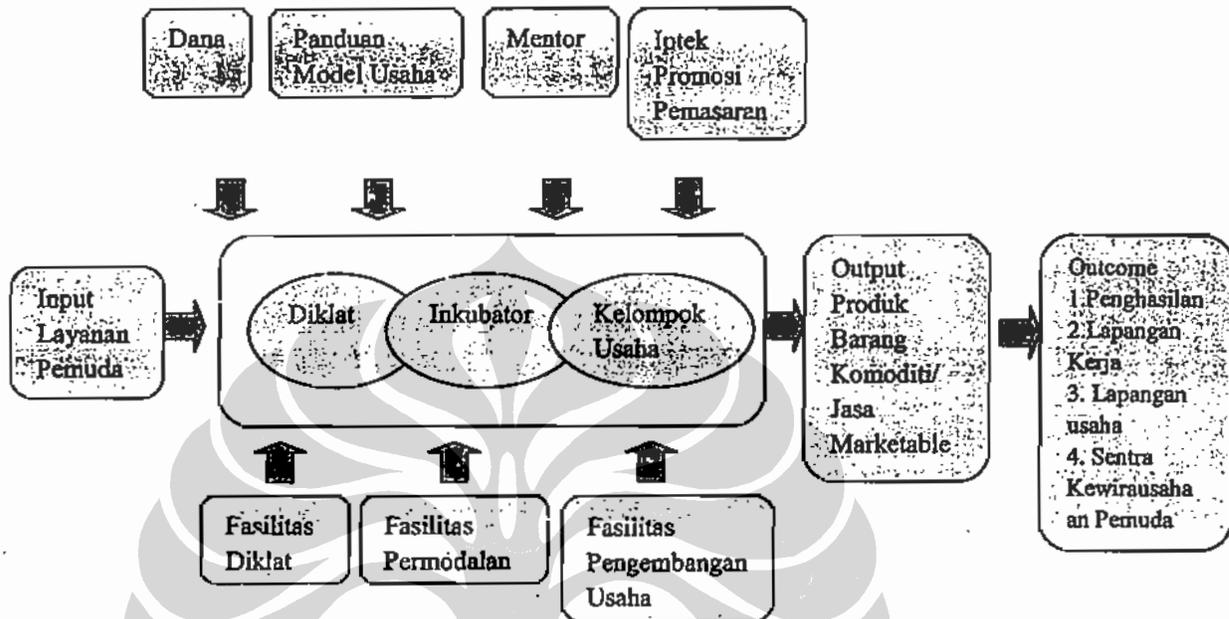
1. Penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan modul pengembangan KUPP.
2. Sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan KUPP.
3. Training of Trainer (TOT) pengembangan KUPP, yang meliputi pelatihan pengembangan KUPP.
4. Pengkajian Pengembangan KUPP di lima propinsi.
5. Pemilihan tiga puluh tiga KUPP terbaik dari seluruh Indonesia.

Di tingkat daerah, kegiatan pengembangan KUPP tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk tugas dekonsentrasi yang berupa kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dan penyaluran dana bantuan bagi kelompok KUPP. Penyelenggara kegiatan dekonsentrasi KUPP di daerah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang mengelola program kepemudaan di tingkat provinsi. Pada tahun 2009, Kemenegpora juga melakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka pengembangan KUPP, yaitu dengan melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Kepemudaan untuk KUPP. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah program pengembangan KUPP yang bukan merupakan kerjasama Kemenegpora dengan kementerian lain, namun khususnya pada kegiatan penyaluran bantuan dana bagi KUPP. Untuk dapat memperoleh dana bantuan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh KUPP, antara lain pengajuan proposal usaha. Lembaga kepemudaan lain, yang memiliki unit kegiatan usaha, contohnya Karang Taruna, diperbolehkan mengajukan proposal untuk diseleksi agar dapat memperoleh bantuan dana pengembangan KUPP tersebut.

Program Pengembangan KUPP pada dasarnya terdiri dari tiga proses penciptaan dan pemberdayaan, yaitu : (a) Pendidikan dan Pelatihan; (b) Inkubasi; (c) Pelembagaan Kelompok Usaha. Ketiga proses tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan diperkuat oleh tujuh aspek pendukung, yaitu : dana, panduan dan modul, mentor, pengembangan iptek dan pemasaran, sarana dan prasarana, fasilitasi permodalan, serta fasilitasi pengembangan usaha. Secara lebih jelas, konsep pengembangan KUPP sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan KUPP Tahun 2009 adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1.

## Konsep Pengembangan KUPP



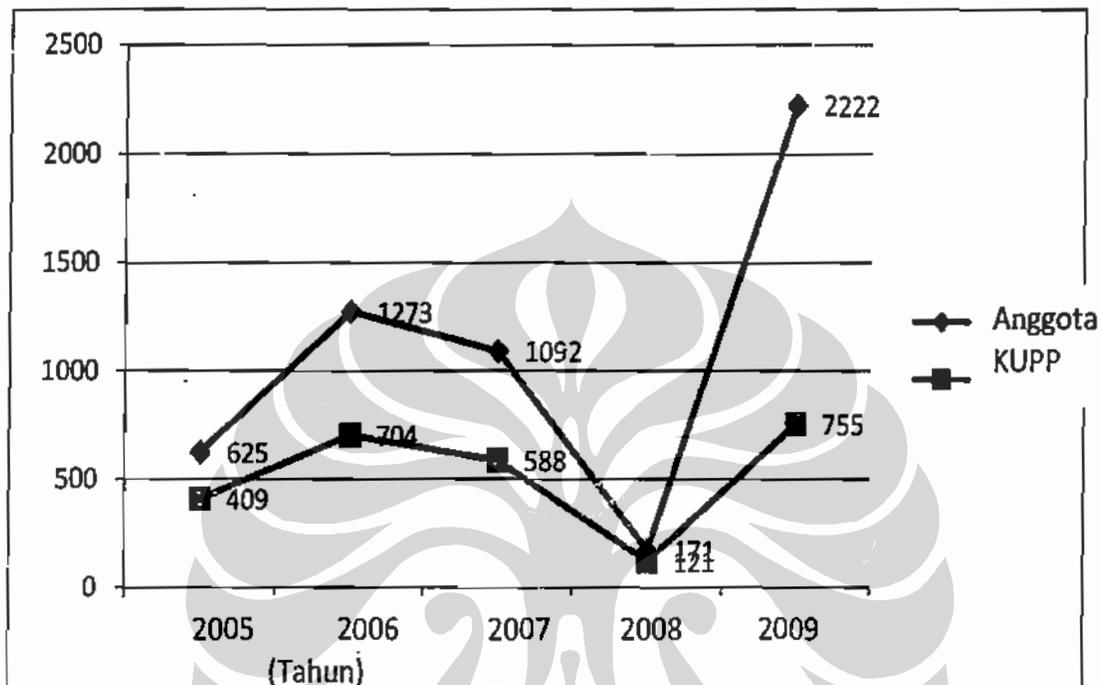
Sumber : Buku Pedoman Program Pengembangan KUPP Tahun 2009, Kemeneppora, 2009.

Dalam buku pedoman pengembangan KUPP tersebut juga dijelaskan bahwa strategi pengembangan KUPP dilakukan mengacu kepada potensi sumberdaya yang dimiliki Indonesia menurut tipologi wilayahnya, yaitu tipologi pantai dan pesisir dengan usaha perikanan; tipologi dataran tinggi dengan potensi pertanian dan perkebunan; serta tipologi sub-urban dan daerah wisata dengan potensi industri kecil dan kerajinan.

Dalam Dokumen laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Tahun 2005 – 2009, diperoleh data keterlibatan pemuda dalam KUPP nasional tahun 2005 – 2009 sebagaimana dalam gambar grafik berikut.

Gambar 4.2

Grafik Data Keterlibatan Pemuda Dalam KUPP Nasional Tahun 2005 – 2009



Sumber : Dokumen laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Tahun 2005 – 2009, Kemenegpora, 2009.

Penelitian Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP ini akan dilakukan pada 4 (empat) KUPP di Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari 3 (tiga) KUPP yang pernah menerima dana bantuan yang berasal dari dana dekonsentrasi Kemenegpora dalam Program Pengembangan KUPP Tahun 2009 dan 1 (satu) KUPP yang belum menerima dana bantuan tersebut, tetapi memiliki keistimewaan (prestasi) yaitu sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi dan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dan kelompoknya mengalami kemajuan usaha.

#### 4.2. Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah peimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah

tertentu. Prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan. Dana dekonsentrasi adalah dana (anggaran) Kementerian yang bersumber dari APBN yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah melalui SKPD yang ditunjuk/ditetapkan oleh Gubernur (dalam Makalah "*Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan*", oleh Ramidin Saragih, Kepala-Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Pemuda, pada tanggal 5 April 2011, Hotel Savoy Homann, Bandung).

Selanjutnya SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah propinsi, kabupaten/kota. Dalam prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi, Kementerian/Lembaga menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD/Dinas Provinsi berfungsi (bertanggung jawab) atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada suatu program melalui pengerahan SDM, barang modal atau sumber daya lainnya sebagai input (masukan) untuk menghasilkan output (keluaran) dalam bentuk barang dan jasa.

Dasar hukum pengelolaan dana dekonsentrasi bidang kepemudaan antara lain adalah :

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005;
3. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

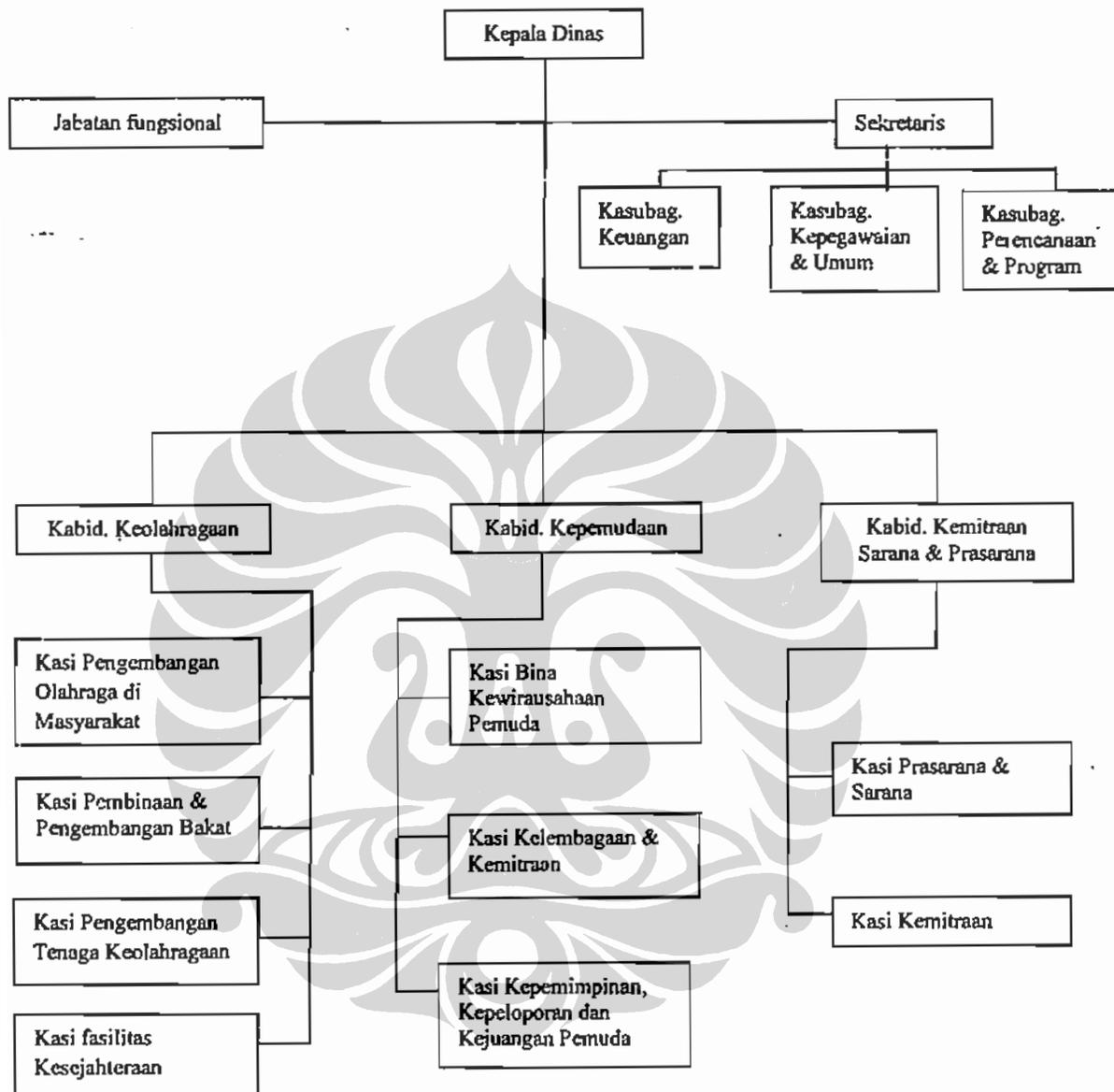
Untuk dana dekonsentrasi yang disalurkan melalui Program Pengembangan KUPP yang berupa Bantuan Penyelenggaraan KUPP Jawa Barat Tahun 2009, dengan jumlah bantuan Rp. 5 juta per kelompok, dasar hukumnya antara lain adalah DIPA (APBN) Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Propinsi Jawa Barat, Nomor : 0009.0/092-01.3/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, nomor 427/374-BIDKEM, tanggal 13 Juli 2009, tentang Penerima Bantuan Penyelenggaraan KUPP Jawa Barat Tahun 2009.

#### **4.3. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat**

Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 2008, berdasarkan Perda No.21 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2009. Dalam Renstra dinas dicantumkan bahwa dinas ini baru terbentuk 24 Oktober 2008 dan pengisian jabatan mulai dilakukan pada 31 Desember 2008. Peneliti merasa perlu memaparkan struktur dinas ini karena pada implementasi kebijakan, maka sumber daya dan SOP (*Standard Operation Procedures*) merupakan salah satu faktor yang dinilai. Struktur organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga saat ini adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 4.3. sebagai berikut :

Gambar 4.3.

## Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat



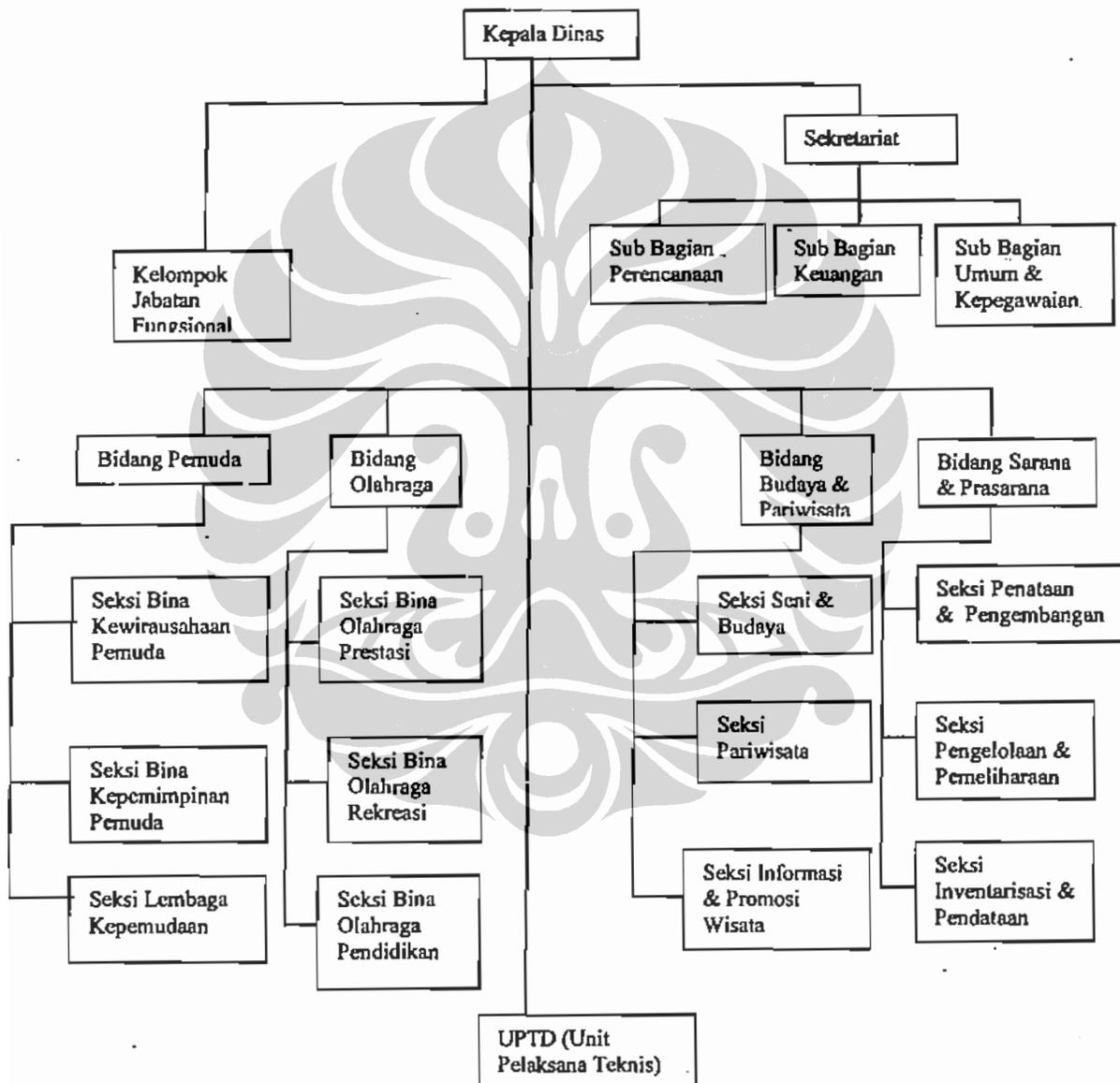
Sumber : Dokumen Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 2009 – 2013.

#### 4.4. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Bekasi

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi dibentuk melalui Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. Struktur organisasi ini pada tahun 2009, ketika program pengembangan KUPP, yaitu pada kegiatan pemberian

bantuan dana pengembangan KUPP tahun 2009 dilaksanakan, adalah sebagaimana yang disajikan pada Gambar 4.4. berikut ini :

Gambar 4.4.  
Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata  
Kabupaten Bekasi pada Tahun 2009



Sumber : Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan Asan Ashari, Kasi Bina Kepemimpinan Pemuda yang menjabat saat ini, pada waktu belum terbentuknya Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, urusan KUPP ditangani oleh Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan pengumpulan data awal di ruang kantornya pada Jum'at, 18 Maret 2011, Asari menjelaskan,

*"Sebelum ada dinas pemuda, memang KUPP ada melekat di tugas fungsi di Dinas Pendidikan. Di sana itu, KUPP bentuknya lebih ke semacam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Jadi, bentuknya kursus-kursus, setelah ikut kursus itu, diharapkan pemuda dapat bekal ketrampilan dan wawasan, jadi dia diharapkan dapat mandiri."*

Selanjutnya, Karyasa, Kasi Bina Kewirausahaan Pemuda saat ini (2010 - sekarang), pada waktu dan tempat yang sama, menjelaskan mengenai KUPP sebagai berikut,

*"Jadi kalau di Dinas Pemuda, saat ini saya baru melakukan pelatihan keterampilan bagi pemuda kurang mampu, putus sekolah, semacam itu. Pelatihan yang saya rancang itu isi materinya nanti keterampilan seperti perbengkelan, menjahit, dan sejenisnya. Diharapkan dari pelatihan tersebut, pemuda yang sudah mengikutinya dapat membuka usaha dan mengajak rekan-rekannya untuk membentuk kelompok sebagai cikal bakal KUPP nantinya."*

Karyasa menambahkan bahwa dirinya telah melakukan kegiatan Pendataan KUPP pada tahun 2010, dan berdasarkan pendataan tersebut, dari 15 kecamatan yang sudah didata, terdapat 50 KUPP yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini.

#### 4.5. KUPP El Hawa

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) El Hawa didirikan pada awal tahun 2009, sekitar bulan Januari. Menurut Yayah, ketua kelompoknya, pendirian kelompok ini adalah atas inisiatif sendiri. Saat itu, suaminya yang bernama Acep menemukan cara membuat hiasan pohon bonsai imitasi berbahan

baku limbah gabus *sterofoam* setelah melakukan beberapa kali percobaan mandiri. Acep tertarik membuat hiasan tersebut karena pernah melihatnya di beberapa pameran dan menurutnya dia dapat membuatnya sendiri. Sehari-hari, Acep yang berpendidikan SD dan pada tahun 2009 usianya sekitar 40 tahun tersebut, adalah seorang petani.

Setelah melihat dan juga mempraktekkan cara membuat pohon bonsai imitasi dari suaminya, akhirnya Yayah (pendidikan SD, pada tahun 2009 berusia 35 tahun), berhasil membuat karya-karya tersebut dengan lebih variatif dan dia memajang karyanya di rumah. Ternyata, produk itu diminati oleh warga sekitar dan ibu-ibu peserta majelis taklim sekitar rumahnya (Majelis Taklim Babussalam). Saat kunjungan pertama peneliti ke rumahnya pada 6 April 2011, Yayah mengungkapkan,

*“Pernah juga saya diajak ikut pameran waktu acara Maulid, terus saya bawa 10 pohon, terjual semua. Lumayan dapetnya sekitar tigapuluh sampai limapuluh ribu per pohon, tergantung besar kecilnya pohon.”*

Akhirnya banyak tetangga sekitar yang ingin belajar membuat kerajinan bonsai imitasi. Saat itulah Yayah dan tetangganya yang masih memiliki hubungan kekerabatan, membuat satu kelompok. Mereka mulai memproduksi kerajinan bonsai imitasi. Yayah sebagai ketua, suaminya (Acep) sebagai sekretaris, dengan anggotanya adalah Suhanah (30 tahun) dan Bayhaki (26 tahun).

Produk kerajinan kelompok El Hawa ini makin banyak peminatnya. “Sampai terakhir saya produksi itu sekitar akhir tahun 2009, barang saya sudah di beli warga dari empat kampung sekitar sini,” Yayah menjelaskan. Saat itu setiap anggotanya akan dapat keuntungan Rp.7000,- per pohon dan Yayah yang menanggung kebutuhan makan anggotanya.

Yayah yang sehari-hari adalah ibu rumah tangga ini, juga menjelaskan cara-cara membuat kerajinan tersebut, yaitu bahan dasarnya adalah gabus bekas, sedikit bensin, koran bekas, kawat untuk batang, bunga-bunga kecil untuk hiasan, dan wadah berbagai jenis ukuran sebagai pot pohon imitasi tersebut. Menurutny,

dari modal awal untuk belanja limbah diperlukan Rp. 100 ribu, dan itu akan menghasilkan keuntungan bersih Rp. 300 ribu bagi Yayah.

Kemudian pada awal tahun 2009, Yayah diberi informasi mengenai adanya bantuan untuk kelompok usaha yang dapat diakses oleh jenis usaha yang sedang dia rintis. Informasi tersebut disampaikan Zaenal Abidin, seorang tetangganya yang berprofesi sebagai guru SD, namun Yayah tidak mengetahui tempat kerja Abidin. Kemudian seluruh urusan proposal dan berbagai surat rekomendasi diselesaikan oleh Abidin, hingga akhirnya Yayah dengan kelompoknya berhasil memperoleh bantuan dana pengembangan KUPP sebesar Rp. 5 juta sebagaimana yang tercantum dalam SK Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

Setelah mendapat bantuan tersebut, KUPP El Hawa tetap memproduksi kerajinan bonsai dan produknya dibeli orang. Namun pada awal tahun 2010 (sekitar enam bulan setelah menerima bantuan tersebut), Yayah harus mengurus ibunya yang sakit keras hingga akhirnya meninggal pada bulan Maret 2011. Sejak itu tidak ada lagi produksi kerajinan bonsai imitasi. Anggota kelompoknya tidak ada yang melanjutkan hingga kini, sebagaimana diungkapkan Yayah kepada peneliti pada kunjungan pertama ke rumahnya,

*“Anggota kelompok semua tergantung saya, saya lagi repot begini mereka tidak jalan, padahal sebenarnya sudah bisa bikin sendiri. Ya bisa dibilang kelompok ga jalan lagi. Saya sangat repot mengurus keluarga.”*

KUPP El Hawa berdomisili di Kampung Cebong, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Kecamatan yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Karawang itu memiliki luas wilayah 3.153 Ha dan terdiri dari 7 desa. Di Kecamatan Kedungwaringin, terdapat beberapa jenis industri yaitu kerajinan anyaman bambu, kerajinan keramik dan mobil mainan (dalam Buku *Selayang Pandang Kabupaten Bekasi Tahun 2010*, Bappeda Kabupaten Bekasi, 2010).

#### 4.6. KUPP Bhakti Remaja

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Bhakti Remaja didirikan pada tanggal 10 April 2009 (dalam *Dokumen Hasil Pendataan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010*, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, 2010). Kelompok ini berdomisili di Kampung Cibuntu, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Peneliti melakukan kunjungan ke rumah ketua kelompok, Nasir Ma'ruf, di Rt 11 Rw 4 No. 97, Kampung Cibuntu, sebanyak 2 (dua kali) yaitu pada tanggal 24 Maret 2011 dan 5 April 2011. Namun dari dua kesempatan itu, peneliti tidak berhasil bertemu langsung dengan Ma'ruf karena kesibukannya. Akhirnya peneliti berhasil menghubungi melalui telepon dan memperoleh sedikit penjelasan tentang kelompok ini. Selanjutnya Ma'ruf merekomendasikan untuk menghubungi sekretaris kelompok, Edi Kasah, untuk keperluan wawancara lebih lanjut.

Dari Kasah, diketahui bahwa sebenarnya kelompok ini bukan bergerak di usaha peternakan bebek (seperti yang tercantum di SK Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2009), namun lebih sebagai usaha penggemukan bebek. Menurut Kasah yang ditemui pada 9 April 2011, usaha penggemukan bebek tersebut belum membuahkan hasil karena hewan ternak tersebut diserang hama musang/rase. Pada kesempatan wawancara di TPA Nabila, Desa Cibuntu, Kasah mengungkapkan bahwa usaha yang dijalankan pada tahun 2009 itu belum menghasilkan uang bagi kelompok.

Kasah (30 tahun) menjelaskan awal keterlibatan kelompoknya pada program pengembangan KUPP dari Kemenegpora. Menurutnya,

*"Awal informasi dari Pak Haji Asan, Kasi di Dinas Pemuda Kabupaten. Dari informasi beliau, kita akhirnya melengkapi berkas dan proposal. Tidak sulit buat kita, karena kelompok ini bagian dari Karang Taruna Desa Cibuntu, sudah sering bikin kegiatan. Selanjutnya ketika sudah di acc, kita tinggal jalan saja".*

Menurut Kasah, uang itu digunakan untuk membuat kandang bebek, membeli anak bebek, dan membeli pakan bebek. Dia mengatakan bahwa yang bertugas merawat bebek adalah anggota yang bernama Ciwang dan Manan, karena sehari-hari mereka adalah peternak bebek. Namun, dia melanjutkan bahwa saat belum sampai tiga bulan setelah menerima dana, ternak bebek tersebut dimangsa oleh musang/rase.

Menurut Kasah, hal itu terjadi karena di sekitar kandang bebek memang masih banyak musang/rase. Selain itu karena kandang yang mereka buat ternyata tidak cukup rapat untuk menghalangi masuknya musang. Lokasi kandang adalah di bantaran sungai Kalimalang Cibitung. Menurutnya, faktor biaya menyebabkan kandang yang dibuat tidak terlalu baik untuk melindungi bebek dari serangan hewan pemangsa. Hingga kini, kelompok tersebut masih memiliki bebek sisa dari kegiatan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan dirawat bersama-sama dengan yang dimiliki Ciwang (30 tahun). Saat ini, kegiatan usaha kelompok tidak ada, dan masing-masing anggota sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kasah bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan di sore hari dia mengelola Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Nabila dimana dia menjabat Ketua TPA Nabila.

Desa Cibuntu adalah salah satu dari 6 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di kecamatan dengan luas 4.530 Ha ini, terdapat industri kerajinan berupa batu bata, anyaman bambu, dan rotan.

#### **4.7. Karang Taruna Desa Kertarahayu**

Dalam kunjungan ke rumah Edi Saiful (26 tahun), Ketua Karang Taruna Desa Kertarahayu pada 4 April 2011, peneliti mendapat penjelasan bahwa awal keterlibatan kelompoknya dalam program Kemenegpora adalah atas arahan dari Acep Leo. Leo merupakan warga desa tersebut dan sebelum tahun 2009 dia aktif di Karang Taruna Desa. Menurut Saiful, semua surat dan urusan dalam kaitannya dengan usaha memperoleh bantuan itu dikerjakan oleh Leo, yang sehari-hari bekerja sebagai guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di SMPN 3 Setu.

Saiful mengungkapkan, dia adalah pengelola dana bantuan tersebut. Ketika pelaksanaan usaha tersebut dimulai, sebagian besar pemuda di Desa Kertarahayu ikut berpartisipasi membantu. Saiful menjelaskan bahwa,

*"Waktu bikin empangnya itu, rame banget. Pak lurah dan bu lurah datang. Pak lurah bilang saat itu, kalau usaha ini lancar, anak-anak boleh pake tanah kas desa itu untuk melanjutkan usaha."*

Dana bantuan yang diperoleh digunakan untuk membeli bibit lele dan membuat empang sebanyak empat petak di lokasi tanah kas desa. Saiful dan salah satu anggota Karang Taruna bernama Asim (25 tahun) aktif merawat usaha awal kelompok mereka.

Menurut Saiful, usaha peternakan lele yang baru dijalankan kelompoknya ini sempat mengalami panen satu kali. Dia menjelaskan,

*"Tiga sampai empat bulan setelah terima bantuan, kita sempat ngangkat, satu kali ngangkat kita dapat 1 kuintal lebih dan yang beli sudah ada, orang pasar setu, dia yang ke sini, kita ga repot. Kita dapat harga Rp. 7 ribu per kilogram"*

Setelah itu uang yang diperoleh sebagian mereka belikan bibit ikan lele dan mujair, dan menunggu untuk siap panen sekitar dua bulan. Namun, saat itu akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010, curah hujan sangat tinggi menurut cerita Saiful. Peristiwa tersebut menyebabkan empang yang berisi ikan yang sebentar lagi siap panen tersebut diterjang banjir, sehingga menghanyutkan ikan-ikan tersebut.

Sejak itu usaha yang baru dirintis oleh pemuda-pemuda Desa Kertarahayu tersebut mulai berhenti, kata Saiful yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Pasar Setu Kabupaten Bekasi. Untuk memperbaiki tanggul dan empang mereka tidak memiliki biaya. Akhirnya ikan-ikan yang tersisa dibiarkan begitu saja, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya untuk melakukan usaha kembali, menemui jalan buntu. Mereka tidak punya uang dan belum ada yang menolong mereka untuk berusaha di budidaya ikan lele.

Karangtaruna desa Kertarahayu, berdomisili di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu. Kecamatan ini memiliki luas 6.216 Ha dan terdiri dari 11 desa (dalam *Buku Selayang Pandang Kabupaten Bekasi 2010*, Bappeda Kabupaten Bekasi, 2010). Potensi desa Kertarahayu yang paling menonjol adalah buah salak dan melinjo, namun hingga kini potensi tersebut belum diolah dengan baik, waiga sekitar belum dapat mengolahnya menjadi produk yang bernilai tinggi .

#### 4.8. KUPP Mekar Bahagia

KUPP Mekar Bahagia berdomisili di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong, bergerak di bidang budidaya rumput laut sebagai usaha utamanya. Ketua Kelompok yang bernama Syarifudin, pada tahun 2009 terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi dan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Saat ini, kelompok yang didirikan sejak tahun 2008 telah berhasil memproduksi rumput laut yang merupakan bahan baku pada industri makanan, kosmetik, industri medis, dan lainnya. Beranggotakan sepuluh orang, masing-masing anggota kelompok mengelola 2 sampai 4 Ha tambak, dan seluruhnya dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut.

Syarifudin dan anggota kelompoknya menghasilkan rumput laut dengan kisaran jumlah 1 ton rumput laut kering basil dari tambak seluas 4 Ha. Kelompok ini juga menampung hasil budidaya rumput laut petani di desa-desa sekitar. Menurut Syarifudin, setiap dua bulan mereka berhasil mengirim puluhan ton rumput laut kering ke pembelinya, yaitu PT Agrindo. Syarifudin menjelaskan,

*“Pekerjaan ini butuh tenaga kerja yang sangat banyak, ada yang merawat rumput, memanen, mengeringkan, menyortir, mengepak, sampai mengirim ke pembeli di Pasar Kemis Tangerang.”*

Syarifudin menjelaskan awal keterlibatannya dalam usaha budidaya rumput laut. Dia mengatakan,

*“Terus terang, awalnya saya memelihara bandeng, lalu datang orang dari Tim Penyuluh Perikanan dari Kementerian Perikanan. Saya diajari budidaya rumput laut. Tadinya saya tidak mau, disini tidak ada trend itu,*

*tapi akhirnya coba-coba. Itu tahun 2007-2008. Terus saya dikirim ikut diklat di Karawang oleh dinas perikanan pusat. Dari pemda Kabupaten Bekasi juga ajak diklat, ada yang ke Cirebon, terus Karawang lagi. Macam-macam diklat, terutama tentang rumput laut. Akhirnya saya coba-coba sendiri di tambak saya, ternyata berhasil, lebih pengalaman. lebih gampang njalanin”.*

Syarifudin kemudian menjelaskan suka duka yang dia rasakan bergelut di usaha rumput laut. Dia mengatakan,

*“Awalnya sulit cari pembeli. Terus saya cari-cari pasar sendiri. Untungnya saya dari kecil biasa cari duit sendiri, mulai dari budidaya udang, jual beli udang, bandeng, akhirnya saya punya kenalan yang bisa menghubungkan saya dengan PT Agrindo yang di Tangerang itu. Setelah itu pasar rumput laut lancar.”*

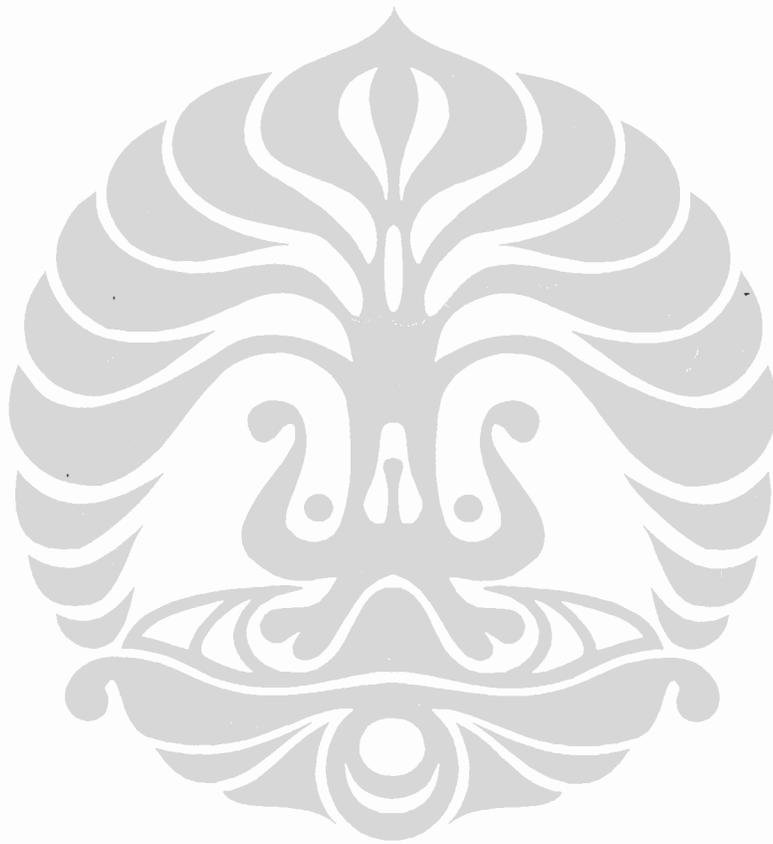
Dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis 4 Mei 2011 di lokasi gudang penampungan rumput laut itu, Syarifudin menceritakan kiprahnya di usaha rumput laut bersama kelompoknya. Menurut Syafrudin, dia berinisiatif mengajarkan pengetahuannya tentang rumput laut ke masyarakat sekitar, dengan dibantu juga oleh Tim Penyuluh dari Departemen Perikanan dan Kelautan dan dari Dinas Perikanan setempat. Hal itu dilakukan Syarifudin karena menurutnya prospek usaha rumput laut ternyata terlihat lebih menguntungkan serta tidak terlalu sulit dan mahal perawatannya jika dibandingkan dengan budidaya bandeng.

Awalnya masyarakat banyak menolak ide tersebut, namun Syarifudin tetap sabar dalam menghadapi teman-teman sesama petani di desanya dan desa sekitar, karena dia juga mengalami perasaan yang sama pada awal usaha rumput laut. Akhirnya pada awal 2010, masyarakat di sana mulai mengikuti jejak Syarifudin dalam budidaya rumput laut. Bukan hanya anggota kelompoknya saja, melainkan hingga ke desa-desa sekitar. Lalu dengan fasilitasi dari pemerintah dan sebuah lembaga swadaya masyarakat, Syarifudin berkeliling daerah untuk membagi dan mengajarkan pengetahuan dan pengalaman suksesnya, antara lain

ke Subang, Indramayu, Karawang, dan daerah lainnya. Kesejahteraan mulai dinikmati petani tambak rumput laut di Muara Gembong terutama di Desa Pantai Sederhana dan Pantai Mekar, serta desa sekitarnya. Menurut Syarifudin, hal itu secara jelas dapat dilihat dari banyaknya motor-motor model terbaru yang terparkir di halaman rumah warga setempat saat ini. Ditambah lagi saat musim panas, menurut Syarifudin akan membuat proses pengeringan rumput laut makin baik dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Jika kadar air 18 %, maka perusahaan mitra akan memberi harga rumput dengan lebih tinggi. Syarifudin menjelaskan keuntungannya sebagai berikut,

*“Pokoknya, anak-anak yang kerja ngeringin dan packing ini pasti dapet 100 sampe 300 per kilo bersih. Kita tiap ngirim pasti hitungan ton. Kalo petaninya pasti di atas itu.”*

Kecamatan Muaragembong terletak berbatasan langsung dengan Laut Jawa, kecamatan ini memiliki luas 14.009 Ha, dan terdiri dari 6 desa. Potensi utamanya adalah hasil laut seperti udang, kepiting, kerang, bandeng, rumput laut, dan sebagainya.



## BAB 5 PEMBAHASAN

Pembahasan memuat hasil penelitian dan analisis penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian, Analisis Implementasi Program Pengembangan KUPP (Studi pada Empat KUPP di Kabupaten Bekasi), bagian ini membahas tentang penilaian informan terhadap implementasi program pengembangan KUPP di Kabupaten Bekasi; pemberdayaan yang terjadi pada kelompok; dan pengembangan kewirausahaan yang terjadi dalam kelompok.

### 5.1. Daftar Informan

Berikut ini adalah daftar informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 5.1.

Daftar Informan

1.	Ponidjan Puspodihardjo	Kepala Bidang Kelembagaan, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI
2.	Wahyu Iskandar	Sekretaris Dinas, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
3.	I Ketut Wiriada	Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kejuangan Pemuda, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
4.	Rajawali Agung	Kepala Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda, Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, Tahun 2009
5.	Karyasa Darsono	Kepala Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda, Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, Tahun 2010 s.d. sekarang
6.	Asan Asari	Kepala Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda, Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi
7.	Ibu Yayah	Ketua KUPP El Hawa
8.	Edi Kasah	Sekretaris KUPP Bhakti Remaja
9.	Edi Saiful	Ketua Karang Taruna Desa Kertarahayu
10.	Syarifudin	Ketua KUPP Mekar Bahagia

11.	Wendi	Ketua Forum Pemuda Produktif Jawa Barat
12.	Acep Leo	Warga Desa Kertarahayu

## 5.2. Implementasi Program Pengembangan KUPP di Kabupaten Bekasi

Edwards mengemukakan bahwa dalam proses implementasi, terdapat empat faktor atau variabel utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resources*), disposisi atau sikap (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Menurut Edwards, agar implementasi kebijakan efektif, maka pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Petunjuk atau perintah untuk implementasi kebijakan harus diteruskan kepada personil yang tepat dan jelas, akurat dan konsisten. Berbagai petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah untuk mengikutinya. Kemudian pelaksana memahami maksud, tujuan dan sasaran kebijakan, serta memiliki persepsi dan pemahaman yang benar tentang kebijakan tersebut, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi jika kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi dapat juga diartikan sebagai sosialisasi atau informasi yang diperoleh tentang kebijakan tersebut.

Dalam wawancara dengan Puspodihardjo, pada tanggal 27 April 2011 dan 24 Juni 2011, diperoleh keterangan bahwa dalam proses implementasi program pengembangan KUPP, informasi yang lengkap telah disampaikan kepada pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi, melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepemudaan, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda Tingkat Provinsi. Puspodihardjo mengungkapkan tentang bagaimana program pengembangan KUPP ini dikomunikasikan ke pemerintah daerah, sebagai berikut,

*"Seluruh pedoman tentang program pengembangan KUPP telah kita sampaikan ke daerah dalam acara rakor dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia, itu pasti ada setiap tahun. Langkah-langkah untuk melaksanakan program tersebut juga sudah jelas ada di buku-buku*

*pedoman, juga sudah dijelaskan secara langsung dalam rakor, dan kita sangat terbuka terhadap berbagai pertanyaan dari daerah. Itu kan demi suksesnya kebijakan ini. Saya juga sering ke daerah dan dalam kesempatan tersebut juga saya jelaskan program ini dan program lain yang terkait. Pada dasarnya, penyaluran besaran dana dekon tergantung dengan pengajuan dari daerah, sistem paket begitu. Misalnya, provinsi A memiliki 20 kabupaten/kota, maka mereka harus memperhitungkan berapa paket yang akan diajukan ke sini agar cukup atau proporsional dengan daerah tersebut. Langkah-langkah untuk dapat memperoleh dana pengembangan KUPP ini sudah jelas kita informasikan ke daerah, dilengkapi modul, yang saya juga sudah saya. Untuk pelaksanaan tahun berikutnya, 2010 dan seterusnya, sama saja proses kamunikasinya. Kita adakan rakor, kita undang pemda khususnya SKPD yang mengurus pemuda, kita bagikan modul, beri penjelasan, mereka mengajukan KUPP yang sudah diseleksi pemerintah daerah. Mengenai pelatihan, memang itu 2009 belum ada dari dekon, tapi bisa dianggarkan dari APBD, karena di SKPD bidang kepemudaan, selayaknya itu sudah melekat sebagai bagian kebijakan.”*

Pada tahun 2009, Puspodihardjo menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan Kewirausahaan Pemuda, pada Asdep Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda, dan saat itu juga merupakan Plh. Asdep Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda. Puspodihardjo menjelaskan tentang Program Pengembangan KUPP sebagai berikut:

*“Filosofi KUPP adalah bagaimana mengubah mindset pemuda agar pemuda mau berusaha dengan melihat pada potensi diri dan lingkungannya. Peranan pemerintah daerah sangat penting untuk berkembangnya KUPP, karena merekalah sesungguhnya yang paling mengetahui pemuda dan potensi daerah masing-masing. Karenanya, tugas dan fungsi yang melekat pada aparat pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan baik. Kita ini kan abdi, pelayan masyarakat.”*

Selanjutnya, dari Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, peneliti mewawancarai Wahyu Iskandar, yang pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Pemuda. Pada kesempatan wawancara tanggal 23 Juni 2011 di ruang kerjanya, dia menjelaskan,

*"Saya mengetahui kebijakan itu. Saat itu dinas pemuda ini baru dibentuk. Jadi dibentuk pada akhir 2008 dan berjalan sejak 2009. Pegawainya itu berasal dari berbagai lintas SKPD yang berkaitan dengan kepemudaan, seperti Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, dan lain-lain. Saat itu, dana dekan untuk pengembangan KUPP ini diarahkan oleh pimpinan saat itu, Bapak Amung yang sekarang sudah pensiun, untuk dilaksanakan oleh seksi kemitraan, ke Bu Diah, jadi yang 2009 bukan di saya, bukan di bidang kepemudaan."*

Menurut Iskandar tentang program Pengembangan KUPP Tahun 2009 adalah sebagai berikut,

*"Kalau untuk program yang 2009 itu memang saya hanya mengetahui sedikit, tidak mengurus langsung. Saya sempat juga diminta untuk memonitor KUPP oleh Bu Diah, saya terima alamatnya saja KUPP itu. Tapi yang untuk 2010, itu sudah ke bidang pemuda, bukan di kemitraan lagi. Kami tahun 2010, mengawal dana dekon KUPP dengan seksama. Pemberitahuan disampaikan, dan proses-proses mendapat bantuan kami terapkan, kami juga memantau, tapi memang tidak bisa seluruhnya. Pada tahun 2010 kami mengadakan pelatihan dulu terhadap calon KUPP penerima bantuan, seingat saya ada 30 KUPP yang dilatih. Jumlah itu ditambah 20 KUPP yang pernah menerima bantuan tahun 2009, jadi dia agak terbalik ya, diberi dana dulu baru dilatih, yang 20 KUPP itu. Pada 2009, saat itu dinas ini memang baru berdiri, jadi mungkin masih menyesuaikan tupoksi begitu, jadi yang dekon KUPP 2009 itu bukan bidang kepemudaan yang menangani. Saat itu setahu*

*saya, KUPP yang mendapat dana bantuan tersebut tidak dapat pelatihan dulu."*

Peneliti juga mewawancarai Kasie Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda pada Dinas Provinsi Jawa Barat, I Ketut Wiriada. Informasi ini diperoleh peneliti dari Iskandar, Puspodihardjo dan Karyasa (Kasi Kewirausahaan Kabupaten Bekasi). Dalam wawancara dengan Wiriada pada tanggal 23 Juni 2011 di ruang kantornya, dia mengatakan hal yang sama dengan Iskandar,

*"Saya baru pegang KUPP mulai tahun 2010 sampai sekarang. Yang 2009 itu bukan saya, tapi namanya Ibu Diah, dulu Kasi Kemitraan, sekarang sudah pindah ke Badan Pemberdayaan. Arsip-arsipnya saya tidak pegang, tidak ada di saya. Jadi dulu itu setahu saya kenapa pengembangan KUPP yang merupakan dana dekonsentrasi itu tidak ke Bidang Pemuda, itu karena kebijakan pimpinan kami saat itu yang sekarang beliau sudah pensiun. Kalau yang 2010, kita seleksi dan kita latih dulu sebelum dia terima bantuan."*

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Kasi Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, yang menjabat pada tahun 2009, yaitu Rajawali Agung. Dalam wawancara yang berlangsung tanggal 14 Juni 2011 di ruang kantornya, Agung mengatakan,

*"Saya tahu kebijakan pengembangan KUPP tahun 2009 itu dari Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, saya juga sering ke sana dan beberapa kali ke Kantor Menpora, supaya saya tau berita-berita juga. Saya memang aktif ke lapangan. Kita juga informasikan KUPP ini kepada para camat pada kesempatan rapat mingguan, nanti aparat kecamatan yang menurunkan informasi ini ke aparat desa dan masyarakat. Saya dulu pegang panduan untuk mendirikan dan mendapatkan bantuan dana KUPP itu, tapi begitu saya mutasi, saya serahkan ke pejabat pengganti, Pak Karyasa itu."*

Menurut Agung, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemuda telah menyebarkan informasi tentang KUPP. Salah satu yang mendukung tentang hal tersebut adalah adanya kegiatan Pengarahan Pembentukan KUPP di Aula

Kecamatan Cikarang pada akhir Desember 2009. Dalam acara yang dihadiri pemuda yang berasal dari Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut, hadir pula Camat Cikarang Barat saat itu, A. Karim, yang mengemukakan bahwa Program KUPP sangat berguna bagi pengentasan pengangguran khususnya para pemuda yang berusia 15-35, karena menurutnya, sekarang banyak pemuda yang hanya tahu tentang limbah industri untuk mencari uang. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat mengubah paradigma pemuda di Kabupaten Bekasi umumnya atau pemuda Cikarang Barat khususnya, untuk tidak hanya mengandalkan usaha limbah sebagai sumber mata pencarian. (dalam [http://www.bekasinews.com/berita/ daerah/ 1479- pembentukan- kupp- kelompok - usaha -pemuda-produktif-kecamatan-cikarang-barat.html](http://www.bekasinews.com/berita/daerah/1479-pembentukan-kupp-kelompok-usaha-pemuda-produktif-kecamatan-cikarang-barat.html), diunduh pada 1 April 2011).

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Karyasa, Kasi Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi, yang menjabat pada tahun 2010, dia mengatakan,

*“Saya tahu kebijakan pengembangan KUPP tahun 2009 itu dari Pak Agung. Yang 2010 saya tahu, namun saya sedang melakukan pelatihan-pelatihan dulu agar ketika ada dana bantuan, para pemuda itu lebih siap dalam melakukan usaha. Saya mengadakan pendataan KUPP agar mengetahui potensi di Kabupaten Bekasi.”*

Peneliti juga menanyakan tentang proses komunikasi program ini kepada pengurus KUPP. Yayah, Ketua KUPP El Hawa, mengatakan,

*“Saya dulu mengetahui ada dana bantuan KUPP dari Pak Zaenal Abidin. Dia tetangga, bekerja sebagai guru SD. Kalo tidak ada info dari beliau, saya tidak akan tahu. Kelompok saya memang sudah ada sebelum saya tahu info ada bantuan itu. Pak Zaenal juga yang mengurus segala surat tentang kelompok ini.”*

Selanjutnya, Kasah, sekretaris KUPP Bhakti Remaja, menjelaskan awal keterlibatan kelompoknya pada program pengembangan KUPP dari Kemenegpora,

*"Awal informasi dari Pak Haji Asan, Kasi di Dinas Pemuda Kabupaten. Dari informasi beliau, kita tau ada dana bantuan KUPP, akhirnya melengkapi berkas dan proposal. Tidak sulit buat kita, karena kelompok ini kan bagian dari Karang Taruna Desa Cibuntu, sudah sering bikin kegiatan begitu, selanjutnya ketika sudah di acc, kita tinggal jalan aja",*

Pada kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu, informasi tentang program pengembangan KUPP diperoleh Edi Saiful, ketuanya, dari Acep Leo. Saiful menjelaskan,

*"Leo itu dulu aktif di karang taruna desa, dia juga guru honor di SMP 3 Setu. Dari dia, kita tahu ada bantuan usaha. Leo yang urus semua surat-surat. Dia memang kenalannya banyak. Kita senang aja ada kegiatan bagus buat anak-anak sini."*

Ketika peneliti berkesempatan mewawancarai Leo pada tanggal 14 Juni 2011, dia mengatakan,

*"Saya tau program ini dari Pak Rajawali Agung, dia kan tinggal di Setu. Terus saya lihat, banyak pemuda yang ngangur di desa saya ini, ya udah saya pengen ada kegiatan yang baik buat mereka, saya bikin proposal, saya kontak terus sama Pak Agung, alhamdulillah bisa dapet karang taruna ini."*

Kemudian mengenai sumberdaya, Edwards mengatakan bahwa jika sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kurang atau tidak tersedia, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik antara lain adalah sumber daya manusia, informasi, dana, kewenangan, fasilitas.

Mengenai sumber daya, Puspodihardjo menjelaskan,

*"Kita selalu menyiapkan dan membuat kebijakan ini dengan seksama, teliti. Informasi ke daerah selalu kita siapkan, juklak juknis, semua sudah kita serahkan, sudah bikin rakor, dana bantuan juga sudah ada, fasilitas juga kita siapkan, tapi memang jangkauan kita tidak sampai ke daerah. Justru disinilah peranan penting pemerintah daerah. Merekalah yang*

*paling mengetahui kondisi pemuda-pemuda di daerah masing-masing. Selama melekat pada kita tugas dan fungsi, maka kita wajib memberi pelayanan kepada masyarakat. Misalnya ada kelompok yang dapat bantuan dana dekon dari sini, maka tugas pendampingan, pemantauan, juga melekat pada pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Analoginya, kita sudah tebar benih, untuk si KUPP ini, maka bagaimana media tanamnya, perawatannya, dirawat apa tidak dan sejenisnya itu, melekat pada tugas dan fungsi unit pemerintah daerah terkait. Mereka punya unit kerja, ada SDM, ada APBD, seharusnya fungsinya dapat mencakup KUPP. ”*

Selanjutnya, dari Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, Iskandar, menjelaskan,

*“Karena pada saat 2009 itu, kegiatan itu tidak di kita (bidang pemuda), maka saya tidak bisa mengatakan banyak hal, karena saya memang tidak terjun langsung. Kalo masalah tahu tentang adanya dana bantuan untuk KUPP tahun 2009 saya memang mengetahui, tapi teknisnya saya tidak mengetahui. Mengenai pelatihan, setahu saya, tidak ada. Maksudnya sebelum diberi dana bantuan, apakah diberi pelatihan, itu saya rasa tidak ada di APBD kita. Kalau yang tahun 2010, selain jumlah dana menjadi 10 juta/kelompok, kita juga melibatkan FPP (Forum Pemuda Produktif), forum ini sebagai wadah yang mendukung pertukaran informasi mengenai kewirausahaan pemuda, dibentuk berdasarkan SK dari Menpora juga. Sudah ada sejak 2010. Untuk dekon pengembangan KUPP 2010, kita kirim surat pemberitahuan ke seluruh pemda di Jawa Barat. Mereka kemudian proaktif mengirim proposal KUPP yang sudah mereka seleksi tentunya.”*

Menurut Wiriada, tentang Pengembangan KUPP,

*“Secara ideal memang sebelum diberi dana, KUPP diberi pelatihan dulu. Tapi waktu tahun 2009 itu, saya tidak mengetahuinya. Bagaimana kegiatan dan pemantauan 2009 saya tidak tahu. Tapi yang 2010, kita seleksi dan pantau. Kita libatkan FPP, Forum Pemuda Produktif di*

*Jawa Barat untuk monitoring, dari kita juga melakukan pemantauan, tapi memang tidak mencakup keseluruhan, karena sumber daya manusia kita juga sedang melakukan banyak tugas lain selain itu juga tidak ada dana khusus pemantauan itu, sehingga agak sulit juga kalau harus pantau seluruh. Tapi kita sejak 2010 sudah melibatkan FPP untuk membantu memonitor perkembangan KUPP yang ada. Mereka juga diangkat melalui SK dari Kemenpora.”*

Karena terbatasnya waktu penelitian, maka peneliti tidak sempat menemui Ibu Diah, orang yang disebut Iskandar dan Wiriada sebagai pelaksana eksekutor program bantuan KUPP tahun 2009. Kemudian dalam wawancara peneliti dengan Wendi, Ketua Forum Pemuda Produktif Jawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011, peneliti memperoleh informasi bahwa pada pelaksanaan Program Pengembangan KUPP tahun 2010, FPP dilibatkan dalam tugas pemantauan KUPP yang memperoleh bantuan. Menurut Wendi,

*“Kami dari Forum Pemuda Produktif, diminta oleh Dinas Pemuda Jawa Barat untuk membantu dalam memantau KUPP yang memperoleh bantuan dana pengembangan KUPP tahun 2010. Saya diminta secara langsung oleh Pak Ketut. FPP itu sebenarnya semacam wadah komunitas pemuda yang dibentuk kemenpora. Kami di Jawa Barat baru terbentuk pada tahun 2010 dan diangkat berdasarkan SK dari Kemenpora. Saya adalah ketua, pengurus lain berasal dari daerah Jawa Barat lain, seperti Depok, Sumedang, Tasikmalaya. Kami secara berkala melakukan pertemuan. Umumnya yang ada dalam FPP ini memang memiliki kelompok usaha atau dulunya memiliki KUPP. Pemantauan atas KUPP kami lakukan dengan membagi tugas. Saya, memantau KUPP di Bandung dan sekitar, teman yang di Depok memantau KUPP sekitarnya seperti Karawang, Bogor, Bekasi, begitu seterusnya. Umumnya dari hasil pemantauan kami memang KUPP ada yang berkembang ada yang kurang berkembang. Biasanya yang survive itu, dia sudah menjalankan usaha itu dulu sejak lama, tapi kalau dia baru buka usaha setelah dia diberi bantuan dana KUPP itu, biasanya kurang survive. Dalam laporan kami ke Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, kami merekomendasikan*

*agar ke depannya itu, sebaiknya KUPP yang diberi bantuan adalah yang usahanya sudah berjalan dan kalau bisa jumlahnya bantuan banyak tapi hanya untuk sedikit KUPP saja, agar kualitas keberhasilan makin tercapai, jadi maksudnya nanti usahanya bisa lebih leluasa dikreasikan begitu. Kalau jumlah kecil untuk banyak KUPP kan kita lihat jadi kurang terasa dan kurang leluasa mengelolanya untuk menjadikan usaha mereka survive."*

Selanjutnya, mengenai sumber daya, Agung dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi tahun 2009 mengatakan,

*"Saya memberi informasi kepada masyarakat melalui aparat kecamatan, juga secara langsung kepada masyarakat. Kewenangan ini memang ada di tugas dan fungsi Kasi Bina Kewirausahaan secara khusus, namun juga secara umum melekat pada aparat di Dinas Pemuda Provinsi. Makanya Pak Asan Asari, Kasi Bina Kepemimpinan Pemuda, juga menyebarkan informasi ini dan kami memfasilitasi KUPP-KUPP yang ingin memperoleh dana bantuan itu. Kita kasih contoh cara membuat proposal, bagaimana merencanakan usaha, seperti itu, lewat obrolan. Saya sering keliling ke lapangan waktu di Kewirausahaan itu, itu kewajiban dan saya memang suka ke lapangan. Proposal minta agar dapat bantuan itu dulu banyak sekali dari KUPP, mereka membuat proposal, bagus-bagus juga kalo saya nilai, tapi kan kewenangan siapa yang dapat bantuan adalah di dinas provinsi, kita memfasilitasi saja. Secara anggaran, tidak ada pos untuk pemantauan atau pembinaan atau fasilitasi KUPP penerima bantuan, tapi saya pribadi suka keliling atau minimal telpon mereka."*

Selanjutnya, mengenai sumber daya, Karyasa dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi tahun 2009 mengatakan,

*"Saya memang belum banyak terlalu membuat pengumuman tentang pengajuan proposal yang 2010. Saya sedang fokus mengadakan pelatihan dulu. Selain itu untuk monitoring, saya sesekali saja*

*melakukan, karena saya juga sedang ada agenda lain, kegiatan-kegiatan di seksi ini juga butuh konsentrasi, waktu dan tenaga.”*

Selanjutnya, Edwards menjelaskan tentang disposisi atau sikap, menurutnya disposisi berhubungan dengan kecenderungan sikap dari pelaksana yang dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Mengenai disposisi/sikap, Puspodihardjo mengatakan bahwa selama tugas dan fungsi melekat pada diri masing-masing individu dalam unit kerja, maka selama itu pula seseorang harus bertanggung jawab memberi pelayanan dan pengabdian. Dia mengatakan, masalah mutasi atau pergantian pejabat maupun pergantian tempat kerja, sebaiknya tidak bermuatan politis, tapi mengacu pada kompetensi. Menurutnya, jika terdapat banyak muatan politis dalam penempatan seseorang pada unit kerja tertentu, maka akan berpengaruh bagi program-program yang sedang berjalan ataupun sedang dirancang. Puspodihardjo sendiri telah mengurus KUPP sejak tahun 2006, hingga sekarang. Puspodihardjo juga mengatakan,

*“Saat ini dana untuk KUPP tersebut juga belum dibarengi dana pelatihan. Rencananya tahun 2012 nanti akan ada dana pelatihan, itu diharapkan program pengembangan KUPP dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Kalau pemantauan adalah tugas pemda setempat.”*

Selanjutnya, dari Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, Iskandar, menjelaskan,

*“Pada saat 2009 itu, memang kebijakan pimpinan yang mengarahkan agar program dekon KUPP ini ditangani Kasi Kemitraan, Ibu Diah itu. Mungkin karena saat itu SKPD ini baru berdiri dan pegawainya baru menyesuaikan, maka terjadi hal-hal seperti itu, mungkin karena pimpinan belum mengetahui seperti apa KUPP itu. Kalau yang 2010 sudah ditangani bidang kepemudaan. Kita seleksi, kita beri semacam pengarahan, kita beri pelatihan, kita pantau, walau tidak seluruhnya kita bisa pantau. Itu karena keterbatasan dana dan SDM juga.”*

Mengenai monitoring, Iskandar menjelaskan bahwa dirinya pernah diminta untuk melakukan monitoring pada sebuah KUPP di Bandung. "Itu diminta Ibu Diah," kata dia. Saat itu Iskandar menemukan bahwa usaha gunting rambut pada KUPP yang didatanginya tersebut juga tidak terlalu berkembang, namun masih berjalan.

Menurut Wiriada, mengenai disposisi/sikap,

*"Saya yang tahun 2009 tidak tahu tentang dekon untuk KUPP. Tapi yang saya jalani sejak 2010, yaitu mengurus dekon untuk KUPP ini, saya turun lapangan langsung, mengecek ke kelompok itu, pada beberapa kesempatan saya memberi informasi tentang bagaimana membuat proposal, melakukan pelatihan, dan lainnya yang mendukung agar KUPP itu dapat berkembang, saya juga melibatkan FPP (Forum Pemuda Produktif) sejak 2010, agar mereka ikut memantau keberlanjutan KUPP, terutama setelah mendapat bantuan. FPP itu adalah seperti perwakilan pemuda yang bergerak di kewirausahaan, ada di tiap provinsi. Umumnya anggotanya adalah yang pernah mengelola KUPP."*

Selanjutnya, mengenai disposisi/sikap, Agung dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi mengatakan,

*"Saya memang orang lapangan. Sebelum dulu di kewirausahaan, saya di pariwisata, sama juga, tugas saya mendorong supaya masyarakat membuat usaha-usaha yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik potensi individu maupun daerah. Jadi dulu 2009 itu, saya turun langsung ke KUPP-KUPP, saya tahu konflik-konflik yang ada di mereka. Saya informasikan juga tentang cara-cara manajemen usaha. Saya sebenarnya suka yang seperti di Kedungwaringin itu, jadi dia membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi bernilai ekonomi (bonsai dari limbah produksi El Hawa). Memang jika dilihat dari anggaran dinas, kegiatan monitoring untuk KUPP yang dapat dekon tidak ada, tapi saat itu saya tetap kontak mereka sesekali, memang saya suka turun lapangan."*

Selanjutnya, mengenai disposisi/sikap, Karyasa, dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi mengatakan,

*"Saya fokus melakukan pelatihan dan pendataan. Selain itu saya memang sedang banyak tugas di SKPD ini, jadi untuk memantau saya memang tidak terlalu banyak melakukan, disamping memang tidak ada dana khusus pemantauan dan keterbatasan jumlah SDM."*

Sementara itu, menurut Edwards dalam implementasi, struktur birokrasi sangat penting, mencakup *Standard Operating Procedures* (SOP), yang merupakan respon internal untuk mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga lebih efisien.

Mengenai SOP, Puspodihardjo mengatakan bahwa semua program di bidangnya saat itu, termasuk KUPP, telah memiliki pedoman. Pedoman itu dibuatnya secara teliti, dengan tim khusus, kemudian dieetak, disebar ke daerah, diagendakan dalam rakor dengan seluruh daerah propinsi, termasuk juga pada bagian monitoring. Puspodihardjo mengatakan,

*"Program Pengembangan KUPP telah memiliki pedoman yang jelas. Pelaksanaannya memang sangat melibatkan pemerintah daerah, yang tentunya telah memiliki unit kerja yang menangani pemuda. Kesuksesan program KUPP sangat tergantung dengan aparat pemerintah daerah, karena pemuda setempat adalah domain tugas mereka, merekalah yang paling mengerti pemuda setempat. Berkaitan dengan pelaporan, saya sudah menyerahkan format monitoring dan evaluasi program ini, termasuk yang dekon untuk bantuan KUPP kepada daerah. Cuma itu, seringkali tidak balik kembali ke sini, kalau ada yang menyerahkan dari mereka, nanti ada saja beda formatnya dengan yang saya kasih itu. Maka saya mengolah kumpulan laporan tadi, jadilah laporan itu bagian dari buku ini, Laporan Kegiatan Asdep Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009."*

Selanjutnya, Iskandar, dari Dinas Pemuda Provinsi Jawa Barat, menjelaskan,

*"Pada saat 2009 itu, saya kurang mengetahui dekon bantuan untuk KUPP itu, karena memang tidak dikelola bidang pemuda, tapi di*

*kemitraan. Namun yang untuk 2010 ke sini, pelaksanaan kembali ke bidang pemuda, kami pantau dan buat laporannya. Memang agak sulit ya, begini, dana sudah diterima, terus KUPP itu kan ga bisa kita pantau setiap saat karena keterbatasan sumber di kita. Jadi kelanjutan setelah terima dana memang agak sulit dipantau. Apalagi pelaporan mereka (KUPP) ke kita juga minim.”*

Menurut Wiriada,

*“Saya yang tahun 2009 tidak tahu tentang dekon untuk KUPP. Tapi yang saya jalani sejak 2010, yaitu mengurus dekan untuk KUPP ini, saya turun lapangan langsung, mengecek ke kelompok itu, pada beberapa kesempatan saya memberi informasi tentang bagaimana membuat proposal, melakukan pelatihan, dan lainnya yang mendukung agar KUPP itu dapat berkembang. Memang tidak semua KUPP. Untuk monitoring kita memang tidak bisa semua terpantau. Dana APBD tidak bisa mendukung kegiatan pusat, kan sasarannya lain. Tapi kalau hanya memantau sesekali kita bisa.”*

Menurut Wiriada, di unit kerja saat ini, jumlah SDM sudah cukup, meskipun terdapat juga yang kurang sesuai antara latar pendidikan dan tugas fungsi. Namun, dia melanjutkan, bahwa makin lama, perform SDM makin bagus, karena sudah terbiasa dengan pekerjaannya.

Selanjutnya, mengenai SOP, Agung dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi mengatakan,

*“Kalau untuk teratur memantau memang kita tidak lakukan. Kan kita juga punya kegiatan lain untuk dilaksanakan. Namun saya saat itu kontak mereka juga untuk tanya-tanya. Lagipula saat itu kita tidak ada pos anggaran khusus untuk melakukan monev KUPP.”*

Sementara itu mengenai SOP, Karyasa dari Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi mengatakan,

*“Prosedurnya jelas. Ada pedoman dari pusat untuk menilai proposal yang diajukan KUPP. Kegiatan KUPP untuk mendukung KUPP juga*

*sudah tercantum dalam Renja Dinas Pemuda, yaitu kita selain melakukan pendataan KUPP, juga melakukan pelatihan keterampilan usaha bagi pemuda pengangguran dan putus sekolah, agar mereka dapat lebih siap ketika ada kesempatan bantuan KUPP dan agar mereka dapat membuka usaha sendiri. Tapi memang dana pemantauan KUPP kita belum ada. Tapi tetap kami disini siap mengawal dekon KUPP. Tugas pembinaan kewirausahaan pemuda ada disini memang, jadi itu sudah tugas pokok kita."*

### 5.3. Pemberdayaan

Konsep tentang pemberdayaan dikemukakan oleh Clinard (1996:h.117), yang menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat membentuk dua elemen penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam usaha memperbaiki tingkat kehidupannya, dengan mengandalkan sebisa mungkin pada inisiatif mereka sendiri.
2. Penyediaan bantuan teknis dan lainnya, dengan cara mendorong inisiatif, kemandirian, dan saling membantu, serta mengusahakan agar upaya dilakukan secara lebih efektif.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai para Ketua KUPP. Menurut Yayah (Ketua KUPP El Hawa),

*"Saya tahu program ini adalah pemberian bantuan dana untuk kelompok usaha sebesar 5 juta. Itu saya tau setelah diberi informasi dari Pak Zaenal Abidin. Tapi saya sebelum dikasih tahu ada ini, kelompok saya sudah membuat bonsai duluan. Jadi pak Zaenal itu kasih tau saya karena dia tahu saya buat kerajinan bonsai limbah. Saya senang saja bisa ikutan, meskipun sebenarnya kalau tidak diajak Pak Zaenal, saya ga tau ada program ini."*

Yayah menambahkan bahwa usaha bonsai itu sebenarnya menjanjikan keuntungan untuk dia dan anggota kelompoknya, namun karena dia harus mengurus ibunya yang sakit saat itu, maka kegiatan terhenti. Menurut dia, anggota kelompoknya sangat tergantung dengannya. Menurut Yayah, jika dia akan

menjalankan usaha bonsai kembali, menurutnya anggota kelompoknya akan ikut kembali. Pembentukan kelompok usaha itu adalah atas inisiatif dia dan suaminya untuk mendapat penghasilan tambahan. Mengenai bantuan teknis dari pemerintah, dia mengungkapkan,

*"Saya belum pernah dapat pelatihan dari dinas kabupaten dan juga propinsi. Tapi memang dulu itu saya dikunjungi dari dinas pemuda kabupaten, terus saya juga beberapa kali ikut pameran di kabupaten, bonsai saya dipajang."*

Sedangkan Kasah, dari KUPP Bhakti Remaja, menjelaskan,

*"Pembentukan kelompok ini karena ada program KUPP itu. Pak Asan Asari yang memberi info, memberi arahan. Tapi sebenarnya, kelompok ini bagian dari Karangtaruna desa Cibuntu, usaha kita selain waktu di KUPP adalah jual beli limbah. Tapi waktu atas nama KUPP ini memang usahanya cuma pengemukan bebek, dan itu belum sukses karena hama musang/rase. Sebenarnya kita sebagai Karang Taruna sering juga bikin kegiatan, seperti kompetisi bola, ada sponsornya. Kalau pelatihan untuk usaha pengemukan bebek itu, kita tidak dapat, Tapi, secara lisan, ngobrol-ngobrol begitu, kita diberitahu tentang cara usaha ini."*

Pada kelompok Karangtaruna Desa Kertarahayu, Saiful menjelaskan bahwa, inisiatif mengajukan proposal bantuan adalah berasal dari Acep Leo, warga setempat yang bekerja sebagai guru SMP. Pelatihan teknis dalam hal ternak lele tidak diperoleh kelompok ini, Saiful menjelaskan,

*"Anak-anak Karang taruna senang ada kegiatan ini. Pak lurah mendukung kita, kita boleh pake tanah kas desa. Kalo untuk pelatihan teknis kita tidak dapat, kita belajar sendiri. Pak Agung nelpon aja."*

Pada kelompok Mekar Bahagia, menurut Syarifudin,

*"Awalnya saya dan teman-teman disini adalah petambak bandeng, udang, rajungan. Dulu waktu tahun 2007 atau 2008, ada orang dinas perikanan pusat datang. Saya diajak belajar budidaya rumput laut. Saya tidak mau awalnya, apalagi orang-orang sini. Kita taunya tambak itu ya*

*untuk bandeng atau udang. Tapi saya ikuti aja. Saya dikirim ikut diklat di Karawang. Ikut diklat lagi di Cirebon, banyak saya ikut diklat. Orang dinas itu disebut Tim Penyuluh Perikanan, saya juga diajak diklat rumput laut sama Pak Dedi dari Dinas Perikanan Kabupaten. Terus akhirnya saya coba-coba sendiri, ditambah saya, saya perhatikan gimana rumput itu tumbuh, saya baca-baca pelajaran diklat, akhirnya tumbuh bagus rumput laut ditambah saya. Nah, saya sebelumnya kan memang sudah lama usaha bandeng, dulu udang. Saya sudah banyak kenal orang dilapangan. Akhirnya saya dapat yang untuk membeli rumput saya, PT. Agrindo. Saya akhirnya bisa jual, dapat pasar. Sampai sekarang. Saya ngajarin juga orang-orang sini untuk beralih ke rumput laut. Tadinya susah membuat mereka mau budidaya rumput laut, tapi karena usaha saya bagus, mereka lihat, mereka tertarik. Sampai sekarang, banyak yang sudah sukses dibandingkan dulu. Di Kelompok Mekar Bahagia, ada 10 orang anggota dan semuanya sekarang budidaya rumput laut. Ada juga yang masih pelihara bandeng, tapi itu bukan usaha yang utama.”*

Menurut Syarifudin, budidaya bandeng memiliki resiko lebih besar. Dia mengungkapkan,

*“Ketika datang rob (pasang laut), bandeng jadi hanyut, tambak rusak. Kalau tidak dijaga, bandeng banyak pemangsanya, ada biawak, trus ada sejenis anjing laut, gampang di ambil maling juga. Kalau rumput laut kan tidak, kalo mau dicuri, kan dia harus jual kering, kalau mau jemur, kan butuh tempat, ketahuan kalo dia tidak ada tambak tapi jemur rumput. Terus lagi, biaya pakan bandeng tinggi, saya pernah mengalami biaya rawat bandeng 24 juta, tapi cuma bisa jual 20 juta, saya rugi.”*

Syarifudin juga mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2010, kelompoknya memperoleh mitra yaitu Yayasan Al Bahri. Dalam kesepakatan kemitraan tersebut, kelompok ini memperoleh bantuan pinjaman lunak dan berbagai pelatihan teknis bagi kelompok. Syarifudin juga yang melakukan pelatihan kepada petani di berbagai daerah, seperti Subang, Lampung, dan daerah lain untuk

mentranfer ilmu dan pengalaman di bidang budidaya rumput laut. Kegiatan ini difasilitasi oleh mitranya, Yayasan Al Bahri. Dia juga menyediakan bibit rumput laut dan dibeli oleh Yayasan Al Bahri.

Mengenai peran dinas pemuda Kabupaten, Syarifudin menjelaskan,

*“Saya pernah ikut acara seperti sosialisasi KUPP di Kecamatan Muara Gembong. Waktu itu hadir dari warga sekitar 30 orang, tapi saat itu saya sudah punya kelompok dan sudah jalan usahanya.”*

Mengenai peranan dinas di Kabupaten ketika dirinya berhasil menjadi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2009 dan Tingkat Provinsi Tahun 2009, Syarifudin mengatakan,

*“Saya dikasih formulir sama Bu Nani dari Dinas Perikanan Kabupaten. Dari situ jalan saya sehingga berhasil jadi Juara satu Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Aparat dari dinas-dinas itu (perikanan dan pemuda) yang memfasilitasi.”*

Selanjutnya, menurut Schwarz, fasilitasi kelompok adalah suatu proses di mana terdapat seseorang, yaitu yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok, yang bersikap netral, dan yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan intervensi (campur tangan) dengan tujuan membantu kelompok tersebut meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah, dan dalam membuat keputusan, dalam rangka meningkatkan efektivitas kelompok. Seseorang dimaksud adalah yang disebut fasilitator.

Berdasarkan wawancara dengan 4 KUPP di Kabupaten Bekasi, maka yang pernah mendapat dukungan fasilitator hanyalah KUPP Mekar Bahagia. KUPP El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu tidak memperoleh pendampingan sebagaimana dikatakan oleh Schwarz.

Selanjutnya, menurut Adi (2008:115), terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat metode intervensi sosial di level komunitas, seperti yang dijelaskan oleh Rothman (dalam Adi, 2008), yaitu berupa : intervensi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, aksi sosial, kebijakan sosial,

ataupun menurut Glen (dalam Adi, 2008 :116) yaitu berupa pengembangan masyarakat (*community development*), aksi komunitas (*community action*), dan pelayanan masyarakat (*community services*).

Mengenai pengembangan masyarakat, menurut Adi (2008:244-246), pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat, secara umum melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi : a. persiapan petugas (*tenaga community worker*), terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan pengembangan masyarakat; b. persiapan lapangan, yang pada awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran formal maupun informal. Setelah itu menjalin kontak dengan tokoh informal.

Pada Kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Karang Taruna Kertarahayu, berdasarkan wawancara dengan para pengurusnya, mereka tidak mendapat kunjungan/pendampingan petugas *community worker*. Pada kelompok Mekar Bahagia, terdapat petugas lapangan yaitu Tim Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penyuluh dari Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Namun karena waktu penelitian yang terbatas, maka peneliti belum berhasil menghubungi TPP untuk menggali informasi lebih jauh mengenai hal tersebut.

2. Tahap asesment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan inereka sendiri. Pada tahap ini juga, pelaku perubahan memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, tahap perencanaan. Pengkajian yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu, namun juga dapat secara berkelompok.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat tahap asesment karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa pada awalnya dia tidak tertarik dengan persuasi dari TPP, namun akhirnya dia ikut kegiatan yang diadakan TPP, dan mulai berpikir tentang hambatan dalam budidaya bandeng dan keuntungan dari rumput laut.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat tahap perencanaan alternatif program karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa pada awalnya dia tidak tertarik dengan persuasi dari TPP, namun akhirnya dia ikut kegiatan yang diadakan TPP, dan mulai berpikir tentang budidaya rumput laut.

4. Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat tahap formulasi rencana aksi karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa pada awalnya hanya dia secara individu yang aktif mengikuti kegiatan TPP, Kelompok Mekar Bahagia belum tertarik. Syarifudin mulai mencoba budidaya rumput laut dengan didampingi TPP.

5. Tahap implementasi program atau kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antar pelaku perubahan dan warga masyarakat ataupun kerjasama warga.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat implementasi program atau kegiatan karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa dia mulai budidaya rumput laut dengan dipantau oleh TPP, sementara itu Syarifudin juga menyebarkan pengetahuan dan keterampilan tentang rumput ke kelompoknya dan warga sekitar .

6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat evaluasi karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa dia mulai budidaya rumput laut dan terus dipantau oleh TPP. Syarifudin juga mencoba menggabungkan cara yang diperoleh dari diklat dan buku-buku panduan dengan kondisi tambaknya, sambil tetap mentransfer pengetahuan rumput laut ke kelompok dan warga sekitar.

7. Tahap terminasi, yaitu tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena batas waktu yang telah ditetapkan atau karena anggaran sudah selesai.

Pada kelompok El Hawa, Bhakti Remaja dan Kertarahayu, tidak terdapat terminasi karena tidak terdapat *community worker*. Berdasarkan wawancara dengan Syarifudin, diketahui bahwa saat ini dia sudah berjalan sendiri bersama kelompok Mekar Bahagia, tanpa pendampingan TPP. Mengenai alasan TPP tidak mendampinginya lagi, Syarifudin tidak mengetahui alasannya. Hingga saat ini, Syarifudin masih aktif mentransfer ilmu dan pengalamannya dalam

budidaya rumput laut kepada warga sekitar dan jika diminta sebagai pembicara maupun pelatih.

#### 5.4. Pengembangan Karakter Kewirausahaan

Tingkah laku seorang wirausaha adalah juga sifat wirausaha orang tersebut. Dengan demikian, bagi seseorang yang tertarik untuk menjadi wirausaha, dia dapat mempelajari dan menjalani tingkah laku wirausaha sehingga terbiasa dan memiliki sifat wirausaha. Mitos bahwa *entrepreneur is born* tidak berlaku, karena pada realitanya kewirausahaan dapat dibentuk melalui proses belajar.

Berkaitan dengan hal tersebut Charles Horton Cooley, seorang sosiolog Amerika, memperkenalkan konsep kelompok yang disebut *primary group* yaitu "*characterized by intimate face-to-face association and cooperation*", yaitu bahwa kelompok ditandai oleh pergaulan dan kerja sama tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting dari kelompok ini adalah keluarga, teman bermain pada waktu kecil, dan rukun warga serta komunitas pada orang dewasa. Pergaulan intim ini menghasilkan terpadunya individu dalam satu kesatuan sehingga dalam banyak hal diri seseorang menjadi hidup dengan tujuan bersama kelompok (Cooley 1909, dalam Sunarto 2004).

McDavid dan Harari dalam Gibson et.al (1993:h.202) mengatakan bahwa kelompok adalah suatu sistem yang terorganisasi, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya.

Sementara itu, proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan kelompok, yang dapat berfungsi sebagai sarana yang mampu memberi manfaat kepada individu anggotanya, seperti : menunjang proses perkembangan intelektual, emosional dan sosial seseorang, dan sebagai pendorong munculnya perubahan situasi dan lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan kelompok, dalam Buku Pedoman Program Pengembangan KUPP Tahun 2009, diperoleh pengertian tentang KUPP sebagai berikut :

- a. Merupakan unit usaha produktif (bisnis) yang belum berbadan hukum (akte notaris), memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil milik kelompok yang beranggota 3 s.d. 10 orang pemuda;
- b. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 18 s.d. 35 tahun;
- c. Kriteria Usaha Mikro menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Kriteria Usaha Kecil menurut UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Pengembangan KUPP adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan KUPP melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.

Dari uraian tersebut maka diperoleh pengertian bahwa kelompok usaha yang dimaksud sebagai KUPP dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dalam suatu kelompok yang bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini kriteria usahanya adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa KUPP merupakan kelompok usaha, dan sebagai kelompok maka didalamnya terdapat pergaulan intim yang menghasilkan terpadunya individu dalam satu kesatuan sehingga dalam banyak hal diri seseorang menjadi hidup

dengan tujuan bersama kelompoknya. KUPP adalah suatu sistem yang terorganisasi, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya.

Sementara itu, proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan kelompok, yang dapat berfungsi sebagai sarana yang mampu memberi manfaat kepada individu anggotanya, seperti : menunjang proses perkembangan intelektual, emosional dan sosial seseorang, dan sebagai pendorong munculnya perubahan situasi dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya kelompok usaha (KUPP) yang merupakan tempat subur bagi tumbuhnya sifat wirausaha akan memberi manfaat bagi anggotanya untuk menimbulkan proses perkembangan intelektualnya termasuk dalam hal ini adalah sifat-sifat kewirausahaan.

Menurut Sarasson (1996, dalam Lupiyoadi, 2007), dikatakan bahwa karakteristik adalah hasil dari proses belajar :

1. Bila seorang individu dewasa sebelumnya yakin bahwa dia dapat dan mampu mengadopsi cara-cara tingkah laku baru, khususnya untuk mengubah kepribadiannya, maka kemungkinan keberhasilannya akan lebih besar.
2. Bila seorang individu dewasa mempersepsikan bahwa perubahan yang harus dia lakukan sesuai dengan tuntutan yang wajar dari tujuan yang ia capai, perubahan akan mudah terjadi.
3. Bila seorang individu dewasa dapat secara lebih jelas mendapatkan gambaran langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk mengubah pribadinya, perubahan akan mudah terjadi.
4. Makin mengalami secara nyata seorang individu dewasa bahwa perubahan yang ia lakukan memang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan, maka makin mudah dia untuk mengubah diri.

5. Makin mendapatkan pengalaman nyata seorang individu dewasa bahwa perubahan pribadi membawa keberhasilan, makin mudah perubahan terjadi. Perubahan pribadi makin terwujud apabila lingkungan si individu dewasa menunjang perubahan tadi.

Pada KUPP El Hawa, dikatakan oleh Yayah bahwa saat ini kelompoknya sudah tidak ada. Masing-masing anggotanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yayah mengatakan,

*"Kelompok ini sudah tidak aktif lagi. Saya sibuk urusan rumah tangga, anggota lainnya juga sibuk masing-masing urus rumah, dan dari kita semua tidak ada yang membuka usaha."*

Menurut Yayah, KUPP El Hawa tidak membuat anggotanya tertarik membuat usaha sendiri karena saat itu pembentukan kelompok menjadi KUPP dan memperoleh bantuan dana juga bukan atas usaha mereka, melainkan diarahkan oleh Zaenal Abidin, tetangganya. Dia mengatakan,

*"Waktu dulu daftar jadi KUPP, kita cuma ikutan Pak Zaenal aja. Iseng-iseng juga bikin kerajinan awalnya, terus ada informasi bantuan KUPP, baru buat KUPP, itu pun diurus Pak Zaenal. Anggota lain kalo saya tidak jalan, mereka tidak jalan juga."*

Pada KUPP Bhakti Remaja, dikatakan Kasah bahwa saat ini anggota kelompoknya sibuk dengan urusan masing-masing. Dia mengatakan,

*"Kita semua kan juga kerja, jadi pegawai kantor, jadi tidak sempat lagi mengurus usaha itu. Ciwang dan Manan memang dari sebelum KUPP terbentuk, pekerjaannya peternak bebek, jadi sampai sekarang mereka beternak bebek. Kelompok ini dulu membentuk kelompok KUPP dan proposal karena dikasih tahu ada program tersebut. Nanti kalo ada program lagi, kita mau saja. Di Karang Taruna juga sering ada kegiatan usaha, seperti usaha jual beli limbah. Tapi kalo sebagai nama KUPP ya baru itu saja."*

Menurut Kasah, dirinya berminat untuk membuka suatu usaha, namun belum terpikir seperti apa usaha tersebut. Kesulitan utama menurut Kasah adalah

masalah dana dan dia pun sibuk bekerja sebagai karyawan. Menurutnya anggota KUPP saat ini sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Pada Kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu, Saiful mengatakan,

*"Sebenarnya anak-anak karang taruna, pemuda sini, mau kerja, tapi bingung mau apa karena tidak ada dana. Kalo ada yang kayak dana kemarin itu (KUPP) kita mau saja. Kemarin pas kena banjir itu kan karena kita tidak tahu bahwa akibat banjir bisa seperti itu, lele jadi hanyut. Kelompok kemarin itu ya belum bisa dibilang sukses sih. Kita juga masih begini aja. Di Kertarahayu banyak salak dan melinjo, tapi kita mau olah tidak mengerti dan tidak ada dana."*

Saiful mengatakan bahwa masalah dana adalah yang paling utama, karena menurutnya jika dana tersedia maka jika ingin mendirikan usaha, akan lebih mudah menurutnya. Menurutnya, anggota kelompoknya saat ini banyak yang menganggur. Saiful sendiri bekerja sebagai juru parkir di Pasar Setu dan tidak melakukan usaha lain.

Pada KUPP Mekar Bahagia, seluruh anggotanya (10 orang) saat ini sudah menjadi pembudidaya rumput laut yang sukses. Menurut Syarifudin,

*"Setiap anggota rata-rata mengolah 4 petak tambak ukuran 4 hektar tiap petaknya. Bisa dapat 1 ton rumput laut kering tiap petaknya, bisa dibilang bisa panen sekali tiap bulan. Tambaknya ada yang punya sendiri, ada juga yang sewa. Dulu, kami disini ga ada kepikiran rumput laut, tau nya bandeng. Sekarang hampir semua kita disini usaha rumput laut."*

KUPP Mekar Bahagia juga membeli rumput laut dari petani sekitar untuk memenuhi pasokan ke PT. Agrindo, yang berlokasi di Pasar Kemis, Tangerang.

Selain itu, Syarifudin, karena kemahirannya dalam budidaya rumput laut, akhirnya juga menyediakan bibit rumput laut untuk dijual kepada Yayasan Al Bahri dan peminat lain. Saat ini, hampir seluruh petambak bandeng di Desa Pantai Mekar, tempat Syarifudin menetap, telah beralih menjadi

pembudidaya rumput laut. Ketika ditanya mengenai keuntungan, Syarifudin menjawab,

*"Kalau yang kerja jemur dan packing bisa mendapat sampai Rp. 300 per kilogram, petaninya pasti di atas itu. Tiap mengirim ke PT Agrisindo, kita bisa sampe 4-5 ton."*

Syarifudin juga menyatakan bahwa dirinya dan kelompoknya memperoleh bantuan alat press untuk *packing* rumput laut dari Kementerian Perikanan dan juga diperbolehkan menggunakan bangunan gudang milik Dinas Perikanan Kabupaten untuk tempat pengeringan dan penyiapan rumput laut sebelum dikirim ke PT. Agrindo.

Saat ini Syarifudin sedang membuat rencana untuk mengolah rumput laut sisa, yaitu yang pendek dan terecer ketika packing, untuk dapat dijadikan dodol rumput laut. Dia mengatakan,

*"Dulu saya dan istri pernah bikin dodol rumput laut, rasanya enak juga, tapi ketika mau dipasarkan, kita masih terganjal izin usaha industri rumah tangga, izin kesehatan, dan lainnya. Akhirnya saya belum jalani lagi rencana itu, tapi pingin saya coba."*

Dari uraian ini, terlihat bahwa Syarifudin menampilkan karakteristik tingkah laku kewirausahaan, yaitu :

1. Sifat Instrumental; menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada dilingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Segala sesuatu yang ada dilingkungannya dipandang sebagai alat (instrumen) tujuan pribadi.
2. Sifat Prestatif; menunjukkan bahwa wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan basil yang dicapai sebelumnya. Wirausaha selalu berbuat lebih baik, tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai sekarang, dan selalu membuat target yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Syarifudin, yang mau melakukan transfer ilmu kepada warga, usaha Syarifudin menyediakan bibit, dan usaha Syarifudin mengolah dodol rumput laut.

3. Sifat Keluwesan Bergaul; menunjukkan wirausaha selalu berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia, seperti aktif bergaul, membina kenalan-kenalan, mencari kenalan baru, ramah, akomodatif, dan lainnya, hal ini dilakukan Syarifudin dengan contoh keberhasilannya memperoleh pembeli rumput lautnya, yaitu PT. Agrindo.
4. Sifat Kerja Keras; menunjukkan ia selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Wirausaha mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan yang nyata untuk mencapai tujuan, ia adalah orang yang tidak mau berpangku tangan. Hal ini ditunjukkan Syarifudin dengan tetap melakukan turun lapangan dan ikut terlibat dalam proses produksi, meskipun saat ini dia bisa mendelegasikan ke orang lain.

5. Sifat Keyakinan Diri

Sifat ini menunjukkan ia selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Selalu yakin akan berhasil. Hal ini terutama dapat dilihat dari fase ketika Syarifudin berusaha memberikan transfer ilmu dan pengalaman tentang rumput laut pada warga sekitar, padahal saat itu baru dia yang mengetahui rumput laut setelah mendapat pendampingan dari TPP.

6. Sifat Pengambilan Resiko

Sifat ini menunjukkan bahwa dia selalu memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan berusaha. Hal ini ditunjukkan Syarifudin ketika pada awal dia mau bergabung untuk mengikuti diklat dan pendampingan oleh TPP.

7. Sifat Swa-Kendali

Sifat ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi, batas-batas kemampuan dalam berusaha. Mereka menyadari bahwa melalui pengendalian diri, kegiatan dapat lebih terarah pada pencapaian tujuan.

## 8. Sifat Inovatif

Sifat ini menunjukkan bahwa ia selalu berusaha mendekati berbagai masalah dalam berusaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Terbuka untuk gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Selalu berpandangan ke depan untuk mencari cara baru atau memperbaiki cara-cara yang biasa dilakukan orang lain untuk peningkatan kinerja. Syarifudin memberi contohnya dengan adanya keinginan untuk memproduksi dodol rumput laut dari rumput laut kering sisa.

## 9. Sifat Kemandirian

Sifat ini menunjukkan bahwa ia selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan konsekuensi pribadi wirausaha. Syarifudin menunjukkan sikap ini, ketika pada awal dia belum memperoleh keuntungan dari usaha budidaya rumput laut, namun dia tekun dan tidak menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Dia tidak menyalahkan TPP yang mengajaknya untuk melakukan usaha budidaya rumput laut, tapi Syarifudin tetap mencoba berbagai cara sehingga dia menemukan cara yang terbaik dalam budidaya rumput laut.

## 5.5. Perbandingan KUPP Existing dengan KUPP Normatif (Sesuai Konsep Pengembangan KUPP Normatif)

### 5.5.1. KUPP El Hawa

Pada KUPP El Hawa, kelompok **tidak memperoleh** :

- a. fasilitas diklat
- b. fasilitas pengembangan usaha
- c. mentor
- d. panduan model usaha

- e. inkubator
- f. fasilitas permodalan

Pada KUPP El Hawa, kelompok memperoleh :

- a. dana bantuan Rp 5 juta dari Kemenegpora tahun 2009
- b. fasilitas promosi dan pemasaran; karena berdasarkan wawancara dengan Yayah, dia mengatakan bahwa saat dia sedang memproduksi kerajinan bonsai tahun 2009, dia beberapa kali ikut pameran di Pemda maupun di tempat lain, seperti pada acara peringatan maulid dan perayaan lain.

Produk yang dihasilkan KUPP, yaitu kerajinan bonsai dari limbah, memiliki nilai jual dan dapat diterima pasar. Menurut Yayah dari modal Rp. 100 ribu, dia memperoleh untung bersih Rp. 300 ribu, jumlah produk kerajinan bonsai yang dihasilkan tergantung dari ukurannya, berkisar antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu. Anggota kelompok saat itu (tahun 2009) adalah 4 orang.

#### 5.5.2. KUPP Bhakti Remaja

Pada KUPP Bhakti Remaja, kelompok tidak memperoleh :

- a. fasilitas diklat
- b. fasilitas pengembangan usaha
- c. mentor
- d. panduan model usaha
- e. inkubator
- f. fasilitas permodalan
- g. fasilitas promosi, pemasaran dan iptek

Pada KUPP Bhakti Remaja, kelompok memperoleh :

- dana bantuan Rp 5 juta dari Kemenegpora tahun 2009

Produk yang dihasilkan KUPP, yaitu bebek, memiliki nilai jual dan dapat diterima pasar, yaitu pada rumah makan bebek yang sangat banyak saat ini. Namun pada kelompok ini, menurut Kasah, belum sempat menikmati hasil usaha karena hanya sekitar dua bulan setelah mulai usaha penggemukan bebek, ternak tersebut dimakan oleh hewan pemangsa, yaitu musang/rase. Hingga kini dari dua ratus anak bebek yang dulu dibeli kelompok ini untuk digemukkan, terakhir, sekitar bulan Oktober 2010, hanya tersisa sekitar 10 ekor. Anggota kelompok pada tahun 2009 adalah 3 orang.

### 5.5.3. Kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu

Pada Kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu, diperoleh fakta bahwa kelompok tidak memperoleh :

- a. fasilitas diklat
- b. mentor
- c. panduan model usaha
- d. inkubator
- e. fasilitas permodalan
- f. fasilitas promosi, pemasaran dan iptek

Pada Kelompok Karang Taruna Desa Kertarahayu, kelompok memperoleh :

- a. dana bantuan Rp 5 juta dari Kemenegpora tahun 2009
- b. fasilitas pengembangan usaha; karena berdasarkan informasi Saiful, Kepala Desa Kertarahayu memberi fasilitas tanah kas desa untuk di pinjam pakai menjadi lokasi empang.

Produk yang dihasilkan KUPP, yaitu ikan lele, memiliki nilai jual dan dapat diterima pasar, yaitu pada pedagang pengepul di Pasar Setu. Harga saat itu adalah Rp 7 ribu per kilogram lele. Pada tahun 2009, kelompok ini menghasilkan panen 1 kuintal lele. Namun setelah panen itu, empang yang telah ditebar benih lele yang baru, terkena banjir sehingga menghanyutkan ikan. Sejak itu, kelompok ini tidak melakukan produksi lagi, dan ikan yang masih tersisa di empang tidak diusahakan kembali, melainkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Anggota kelompok pada tahun 2009 adalah 3 orang.

#### **5.5.4. KUPP Mekar Bahagia**

Pada KUPP Mekar Bahagia, kelompok memperoleh :

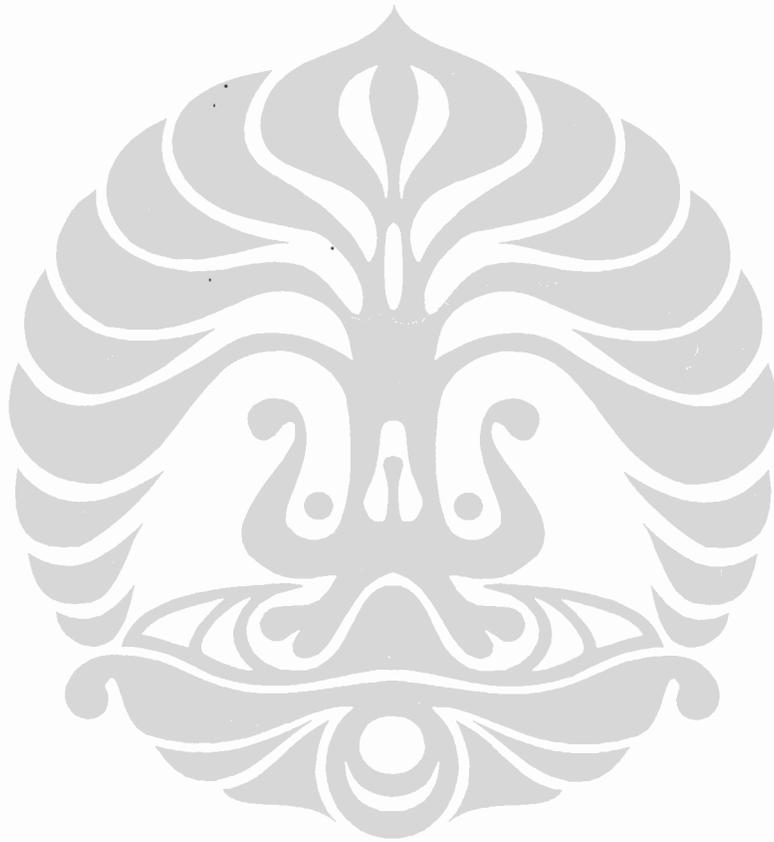
- a. Fasilitas diklat : dari Tim Penyuluh Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi; Perhimpunan Pengusaha Perikanan.
- b. Mentor : dari Tim Penyuluh Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tim Penyuluh dan aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi; Yayasan Al Bahri
- c. Panduan model usaha : dari Tim Penyuluh Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.
- d. Inkubator : dari Tim Penyuluh Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perikanan Kabupaten.
- e. Fasilitas permodalan : dana berasal dari Kemenegpora (hadiah Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi 2009 dijadikan modal usaha oleh Syarifudin); dana berasal dari Yayasan Al Bahri
- f. Fasilitas promosi, pemasaran dan iptek : dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi; Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi; dan Yayasan Al Bahri

g. Fasilitas pengembangan usaha : dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (diberikan alat untuk press rumput laut, alat paekaging); Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi (diperbolehkan menggunakan bangunan milik dinas perikanan Kabupaten untuk digunakan sebagai gudang dan tempat mempersiapkan rumput laut sebelum dikirim ke pembeli, antara lain PT.Agrindo).

Pada KUPP Mekar Bahagia, kelompok tidak memperoleh :

- Dana bantuan Rp 5 juta dari Kemeneppora tahun 2009

Produk yang dihasilkan KUPP, yaitu rumput laut jenis *gracillaria sp*, memiliki nilai jual dan dapat diterima pasar, yaitu pada pabrik PT. Agrindo yang terletak di Pasar Kemis, Tangerang. Setiap pengiriman mencapai jumlah 4 ton rumput laut kering. Untuk harga, Syarifudin tidak memberi informasi jelas, dia hanya mengatakan, "Anak-anak yang kerja ini dapat sampai Rp 100 sampai Rp 300 per kilo dari rumput yang sedang mereka kemas." Menurut Syarifudin, usaha rumput laut telah berjalan sejak 2007-2008, namun baru mulai sangat populer di tempat itu (Desa Pantai Mekar dan sekitarnya) sejak 2009. Kelompok ini juga memproduksi bibit rumput laut, dan salah satu pembelinya adalah Yayasan Al Bahri. Kelompok Mekar Bahagia terdiri dari 10 orang, dan seluruhnya bergerak dalam usaha budidaya rumput laut.



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian berdasarkan analisis informasi dan observasi yang dilakukan. Saran-saran yang disampaikan berdasarkan temuan peneliti, yang diharapkan dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem atau program yang sudah berjalan.

#### 6.1. Kesimpulan

1. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa, implementasi program pengembangan KUPP pada tahun 2009 sudah baik dalam aspek komunikasi, namun kurang berhasil dalam aspek sumber-sumber, seperti dana, sumber daya manusia, kewenangan, dan fasilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi 3 KUPP yang memperoleh bantuan dana, namun tidak berhasil survive. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan upaya pemberdayaan yang optimal dari pemerintah daerah. Minimnya dana, sumber daya manusia, dan fasilitas mengakibatkan pemerintah daerah kurang dalam melakukan upaya pendampingan pada 3 KUPP tersebut, yaitu : El Hawa, Bhakti Remaja, dan Karang Taruna Desa Kertarahayu. Dari aspek sikap dan birokrasi, dapat dikatakan sudah berjalan baik, karena meskipun minim dana dan fasilitas, aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi tetap melakukan kewajibannya untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Implementasi program pengembangan KUPP pada tahun 2010, dinilai sudah lebih baik, karena pemerintah daerah juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberlangsungan program pengembangan KUPP sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga 2009-2012, serta Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun 2010, yaitu kegiatan : pelatihan keterampilan, pendataan KUPP, dan sosialisasi KUPP. Selain itu, Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat pada pelaksanaan program pengembangan KUPP tahun 2010 telah melakukan pemantauan yang lebih intensif dengan melibatkan pihak lain yaitu dari pengurus Forum Pemuda Produktif (FPP) Jawa Barat.

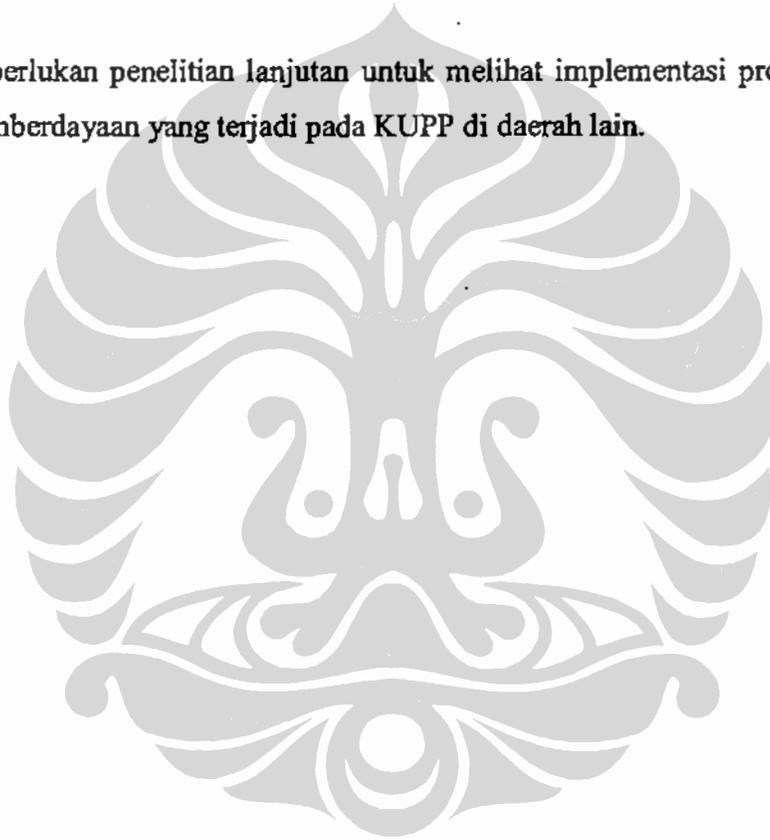
2. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah kunci dari suksesnya salah satu KUPP yang diteliti, yaitu KUPP Mekar Bahagia. KUPP yang terletak di daerah pesisir dan bergerak di budidaya rumput laut dan bandeng ini, memperoleh pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi sejak tahun 2008. KUPP Mekar Bahagia berhasil survive dan ketuanya dapat dikatakan memiliki karakter entrepreneur, antara lain : sifat inovatif, sifat instrumental, sifat prestatif, pengambilan resiko, kemandirian, dan swa kendali. Sementara itu, 3 KUPP yang memperoleh dana bantuan pengembangan KUPP pada tahun 2009 belum berhasil survive, salah satunya karena tidak memperoleh upaya pendampingan sebagaimana yang tercantum dalam Konsep Pengembangan KUPP dalam Buku Pedoman Pengembangan KUPP.

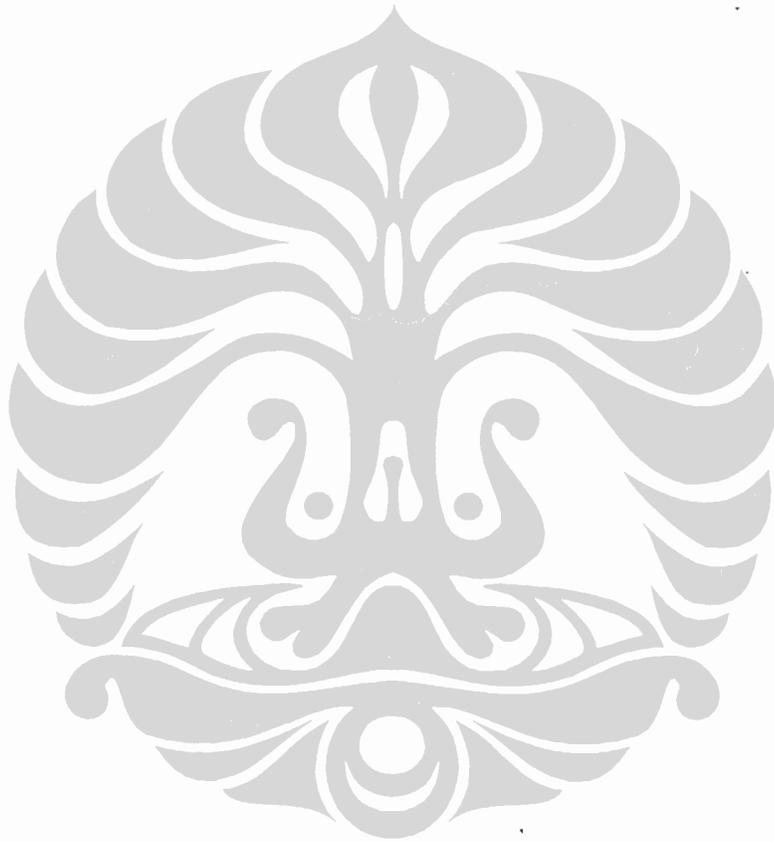
## 6.2. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Daerah, agar program pengembangan KUPP dapat berjalan lebih baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, adalah :
  - a. Komunikasi: sosialisasi dan komunikasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota harus dilakukan dengan lebih intensif. Disarankan agar dibuat peraturan yang lebih ketat, sehingga pelaporan dari daerah ke pusat dapat lebih teratur dan jelas. Hal tersebut akan memudahkan pemantauan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program di daerah.
  - b. Sumber-sumber : diperlukan sinkronisasi penganggaran dengan daerah, agar dapat mendukung pelaksanaan program pengembangan KUPP. Dengan sinkronisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam melakukan pemberdayaan bagi KUPP. Untuk Pemerintah Daerah, kapasitas sumber daya pelaksana program harus lebih diperkuat, agar pemahaman dan motivasi terhadap tugas dan fungsi lebih kuat.

- c. Disposisi: program pengembangan KUPP ini harus didukung oleh sikap pelaksana, meskipun dana tersedia namun tanpa didukung sikap pelaksana, maka KUPP akan sulit memperoleh pemberdayaan dan pendampingan yang merupakan salah satu kunci bertahannya suatu KUPP. Yang dimaksud dengan pelaksana dalam hal ini terutama adalah aparat Pemerintah Daerah.
  - d. Struktur: harus terdapat struktur birokrasi dan standar operasi prosedur yang lebih jelas untuk mendukung terlaksananya program ini lebih.
2. Diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat implementasi program ini dan pemberdayaan yang terjadi pada KUPP di daerah lain.





## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Adi, Rukminto, Isbandi, (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Ag.Subarno, (2004). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Ahmadi, Abu, (2007). *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.

Alston, Margaret & Bowles, Wendy (1998). *Research for Social Workers, An Introduction to Methods*, Allen and Unwin, Australia New South Wales.

Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (1992). *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, Allyn & Bacon, Boston.

Clinard, (1996). *Slums and Community Development*, Collier-Macmillan Canada,Ltd., Toronto, Ontario.

Conyers, Diana, (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Creswell, John W. (2003). *Research Design, Qualitative dan Quantitative Approaches*, Cet. 2 Edisi Revisi, Penerbit KIK Press, Jakarta.

Edward III, George, (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., Washington DC.

Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., & Donnely, Jr. J.H. (1993). *Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur Proses*, Erlangga, Jakarta.

Grinnell, Jr. Richard M. (1993). *Social Work Research and Evaluation, 4th Edition*, F.E. Peacock Publisher, Inc.

Ife, Jim (1995). *Community Development :Creating Community Vission, Analysis and Practice*. Longman Australia Pty Limited, Melbourne.

Jones, Charles O., (1984). *An Introduction to Study of Public Policy, Third Edition*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California.

Kemenegpora. *Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan KUPP Tahun 2009*. Jakarta : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemcnegpora), 2009.

Kemenegpora. *Buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Peran Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009*. Jakarta : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), 2009.

Kemenegpora. *Dokumen Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009*. Jakarta : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), 2009.

Kemenegpora. *Buku Data dan Informasi Pemuda dan Olahraga, Dinas Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan - Profil Umum Pemuda - Dana Dekonsentrasi Pemuda dan Olahraga-Kegiatan - Prasarana dan Sarana Olahraga - Mobil Pemuda dan Olahraga*. Jakarta :Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), Desember 2009.

Kemenpora. *Buku LAKIP Kemenpora Tahun 2009*, Kemenpora, 2009.

Leon, Juan Antonio & Gorgievski (2008). *Teaching Psychology of Entrepreneurship*, Universidad Nacional de Education a Distancia, Madrid.

Lupiyoadi, Rambat, (2007). *Entrepreneurship, from Mindset to Strategy*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

McGrath, Rita Gunther, (2000). *The Entrepreneurial Mindset*, Harvard Business School Press, Boston.

Merton, Robert K. (1965). *Social Theory and Social Structure*, Edisi direvisi, The Free Press, New York.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Method*, Sage, Beverly Hills, CA.

Moleong, Lexy.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Morris, Michael H., (1998). *Entrepreneurial Intensity*, Quorum Books, London.

Mulyana, Deddy, (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ncuman, W. Laurence (1997). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon, Boston.

Parson, Wayne, (2008). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Ed.1 Cet.3, Kencana, Jakarta.

Poerwandari, E. Kristi, (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, LPSP3 Fakultas Psikologi UI, Jakarta.

Robbins, Stephan P., (1995). *Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi*, terj. Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta.

Rubin, Herbert J. ,& Rubin, Irene S., (1992). *Community Organizing and Development*, Macmillan Publishing Company, New York.

Schwarz, Roger M., (1994). *The Skilled Facilitator*, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Suharto, Edi (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Edisi revisi. Alfabeta, Bandung.

Sunarto, Kamanto, (2004). *Pengantar Sosiologi*, Penerbit FE UI, Jakarta.

Wahab, Abdul, Solichin, (2001). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

#### **Tesis:**

Budiyanto. *Pengembang Strategi Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Pemuda pada Kementerian XYZ*. Tesis pada Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

Rakhmani. *Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha bersama di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan)*. Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kekhususan Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Rengkung, Leonardus Ricky. *Efektivitas Pengelolaan Dana IDT serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Suatu Studi pada Beberapa Kelompok Masyarakat/POKMAS di Kabupaten Minahasa)*. Tesis pada Fakultas Pascasarjana Bidang Ilmu Ekonomi-Manajemen Keuangan Universitas Indonesia. Jakarta, 1997.

#### **Laporan dan Makalah**

Kusmuljono. *Peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Untuk Kewirausahaan Muda Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Provinsi Tahun 2011, 7 April 2011, Bandung.

Saragih, Ramidin. *Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan*. Makalah yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Pemuda, pada tanggal 5 April 2011, Hotel Savoy Homann, Bandung.

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi. *Dokumen Hasil Pendataan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Kabupaten Bekasi*

*Tahun Anggaran 2010*, (2010). Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Cikarang.

Dokumen *Laporan Kegiatan Asisten Deputi Lembaga Kewirausahaan Pemuda Tahun 2005-2009*, Kemenegpora 2009.

Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, Periode 2009 – 2013.

Renstra Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Periode Tahun 2009 – 2012.

Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Periode Tahun 2010.

### **Jurnal**

Wijaya, Tony, (2007). Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 2.

Taylor, Michael, & Paul Plummer, (2003). Promoting local economic growth: The role of entrepreneurship and human capital, *Education & Training*, Vol. 45, Iss. 8/9; pg. 558, 6 pgs. (<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=25&did=537165641&SrchMode=1&sid=5&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1310584746&clientId=45625>).

### **Peraturan Perundangan**

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : PER.0013/MENPORA/II/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

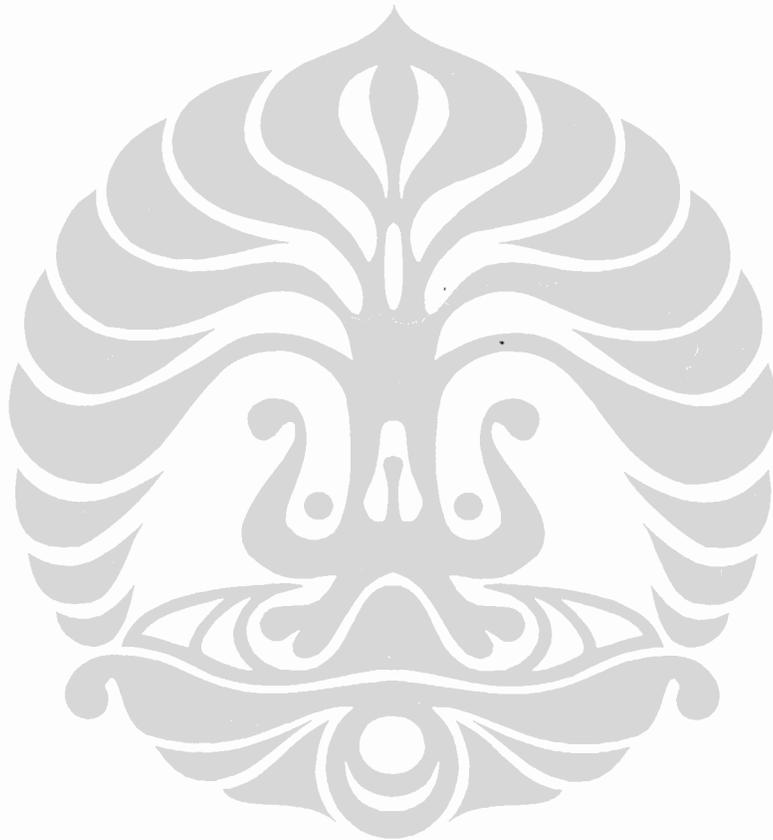
Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, nomor 427/374-BIDKEM, tanggal 13 Juli 2009, tentang Penerima Bantuan Penyelenggaraan KUPP Jawa Barat Tahun 2009.

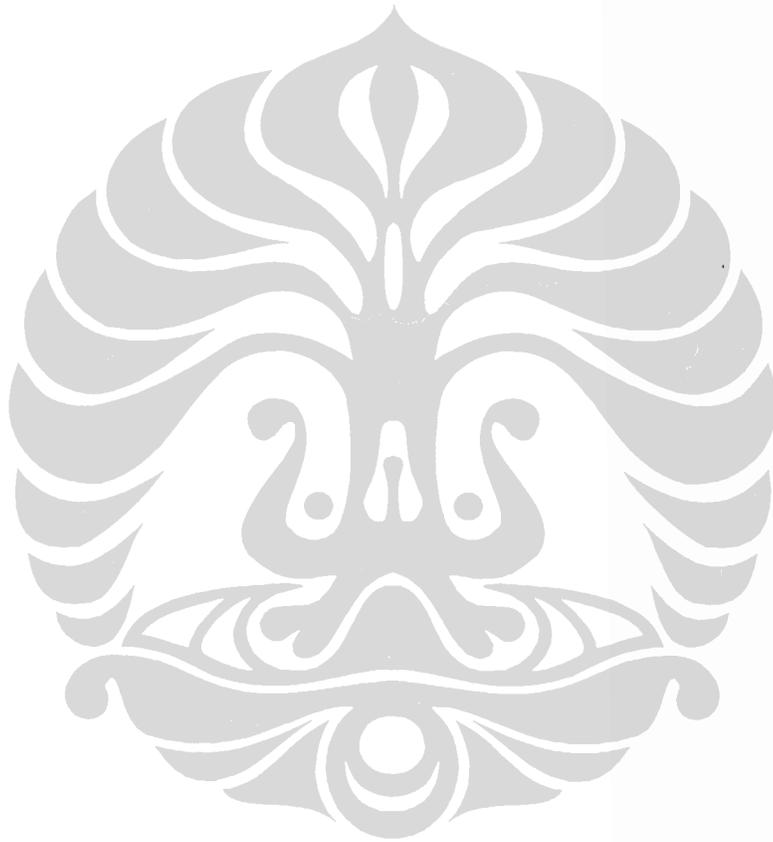
Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, nomor 188.4/942-Bidmud/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Penerima Dana untuk Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Sentra Pemberdayaan Pemuda, dan Lembaga Kepemudaan.

### Publikasi Elektronik

Menakertrans Targetkan 247 Juta Orang dapat Kerja. 22 Februari 2011. (<http://visijobs.com/beta/news/detail/2011/02/22/Menakertrans-Targetkan-247-Juta-Orang-Dapat-Kerja>)

Pembentukan KUPP Kelompok Usaha Pemuda Produktif Kecamatan Cikarang Barat. 3 Desember 2009. (<http://www.bekasinews.com/berita/daerah/1479-pembentukan-kupp--kelompok-usaha-pemuda-produktif-kecamatan-cikarang-barat.html>). Diunduh pada 1 April 2011.





## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### I. Pelaksanaan

Nomor Informan :  
Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Tempat, waktu interview :  
Pekerjaan :

#### II. Pertanyaan tentang program pengembangan KUPP dan implementasi program

Informan : Aparat Pemerintah (Pejabat Kemenpora, Pejabat Dinas Pemuda Propinsi Jawa Barat, Pejabat Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi)

1. Mohon dijelaskan tentang program pengembangan KUPP pada tahun 2009 dan tahun 2010.
2. Apa dasar hukum kebijakan program pengembangan KUPP pada tahun 2009 dan tahun 2010?
3. Bagaimana proses implementasi program pengembangan KUPP?
4. Mohon penjelasan tentang tahapan-tahapan implementasi program tersebut dan siapa saja yang terlibat didalam proses tersebut?
5. Sosialisasi seperti apa yang pernah diikuti berkaitan dengan program pengembangan KUPP? Siapa yang mengadakan kegiatan tersebut? Kapan dan dimana serta berapa kali anda mengikuti acara itu?
6. Mohon dijelaskan tentang sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini? Apakah sesuai dengan tuntutan pekerjaan/tugas ini?
7. Menurut Anda, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang melaksanakan kebijakan ini? Apakah sesuai dengan tuntutan tugas jika dilihat dari segi jumlah dan kapasitas?
8. Bagaimana akses terhadap informasi tentang program pengembangan KUPP ini?
9. Bagaimana keadaan kewenangan yang ada di unit kerja dalam rangka pelaksanaan program ini? Apakah mendukung berjalannya program, menghambat, atau tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap pelaksanaan program?
10. Bagaimana fasilitas yang ada di unit kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan program?
11. Mohon dijelaskan tentang sikap anda terhadap adanya program ini?
12. Menurut anda, bagaimana pengaruh adanya pelaksanaan program tersebut terhadap pekerjaan anda?
13. Bagaimana struktur birokrasi yang ada mendukung pelaksanaan program ini?

### **III. Pertanyaan tentang kelompok dan kelompok usaha**

Informan :KUPP

1. Mohon dijelaskan tentang kelompok dimana anda tercantum sebagai pengurus atau anggota. Berapa lama anda sudah bergabung dalam kelompok. Mengapa anda bergabung dalam kelompok ini?
2. Mohon dijelaskan tentang peran atau keterlibatan anda dalam kelompok tersebut.
3. Mohon dijelaskan apakah saudara merasa memiliki dukungan dengan bergabungnya saudara dalam kelompok ini?

### **IV. Pertanyaan tentang pemberdayaan**

Informan : Aparat Pemerintah (Pejabat Dinas Pemuda Propinsi Jawa Barat, Pejabat Dinas Pemuda Kabupaten Bekasi)

1. Bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah pada KUPP di Kabupaten Bekasi?
2. Apakah kelompok mengalami tahapan-tahapan pengembangan masyarakat? (peneliti menanyakan satu per satu tentang tahapan dalam pengembangan masyarakat, yaitu: tahap persiapan, asesment, perencanaan, formulasi rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, tahap evaluasi, tahap terminasi)

### **V. Pertanyaan tentang pemberdayaan**

Informan :Pengurus KUPP

1. Apakah anda merasa terdapat pendamping selama Saudara mendirikan KUPP atau melakukan kegiatan dalam kelompok anda?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah atau pihak lain pada kelompok anda?

### **VI. Pertanyaan tentang pemberdayaan**

Informan :Pendamping

1. Jelaskan proses keterlibatan anda dalam upaya pendampingan dalam kelompok ini?
3. Apakah kelompok ini mengalami tahapan-tahapan pengembangan masyarakat ?(peneliti menanyakan satu per satu tentang tahapan dalam pengembangan masyarakat, yaitu: tahap persiapan, asesment, perencanaan, formulasi rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, tahap evaluasi, tahap terminasi)

## **VII. Pertanyaan tentang pengembangan kewirausahaan**

Informan :KUPP

1. Jelaskan alasan anda bergabung dalam kelompok ini.
2. Apakah setelah mengikuti kegiatan kelompok ini, anda ingin mengembangkan suatu usaha?
3. Apa usaha anda dalam mencapai keinginan anda tersebut?
4. Apakah anda memikirkan tentang alternatif usaha yang akan dilakukan kelompok anda saat ini?
5. Jelaskan bagaimana anda memecahkan masalah yang dihadapi kelompok anda?

